

# ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pendidikan tidak pernah lepas dari kebijakan publik yang mengaturnya. Buku "Analisis Kebijakan Pendidikan" hadir sebagai panduan komprehensif untuk memahami bagaimana kebijakan lahir, dianalisis, dan diimplementasikan dalam dunia pendidikan.

Disajikan dengan bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini mengulas mulai dari konsep dasar kebijakan, model-model analisis, hingga penerapannya dalam konteks pendidikan Indonesia. Pembaca diajak menelaah faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang membentuk arah kebijakan pendidikan, sekaligus menilai dampaknya terhadap praktik di lapangan.

Tidak hanya kaya teori, buku ini juga menawarkan perspektif kritis dan aplikatif sehingga bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, hingga praktisi pendidikan yang ingin memahami seluk-beluk pengambilan keputusan di sektor pendidikan.

Buku ini adalah bekal penting untuk siapa saja yang peduli pada masa depan pendidikan dan bertekad menjadikannya lebih adil, relevan, dan berkelanjutan.

# ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN



## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN



M Fahmi Zakariyah, S.Pd., M.Pd., Desika Putri Mardiani, S.Pd., M.Pd.  
Suharyani, S.Pd.I., M.Pd., Danang Prastyo, S.Pd., M.Pd.  
Aries Edy Nugroho, S.E., M.M., Muchamad Arif, S.Pd., M.Pd.  
Varia Virdania Virdaus, S.Hum., M.A., Yahya Ado, S.S., M.Hum.  
Kholisussa'di, S.Pd., M.Pd., Herlina, S.P., M.Pd.  
Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si., Dr. Wiwin Yulianingsih, M.Pd.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, yang berjudul *Analisis Kebijakan Pendidikan*, dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan mendalam kepada pembaca mengenai kebijakan pendidikan, mulai dari konsep, analisis, hingga implementasi kebijakan yang relevan dengan tantangan zaman.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui kebijakan yang tepat dan terarah, diharapkan pendidikan dapat menjadi motor penggerak dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu menghadapi perubahan global. Buku ini mencoba menyajikan analisis yang komprehensif dengan pendekatan teoretis dan praktis, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, maupun pengambil keputusan di bidang pendidikan.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran selama proses penulisan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada kolega, mentor, serta lembaga yang telah menyediakan data dan referensi untuk melengkapi isi buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Harapan kami, buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan panduan dalam memahami serta mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

### **Bab I : Konsep analisis kebijakan pendidikan**

- A. Definisi Kebijakan Pendidikan
- B. Dimensi Kebijakan Pendidikan
- C. Model dan Pendekatan dalam Kebijakan Pendidikan
- D. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Pendidikan
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

### **Bab II : Teori Analisis Kebijakan Pendidikan**

- A. Pengertian Analisis Kebijakan
- B. Metode dan Teknik Analisis Kebijakan
- C. Tahapan dalam Analisis Kebijakan Pendidikan
- D. Teori-teori Kebijakan Dalam Pendidikan
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

### **Bab III : Isu & masalah Pendidikan untuk kebijakan Pendidikan**

- A. Kesenjangan Pendidikan di Indonesia
- B. Kebijakan Kurikulum dan Pembiayaan Pendidikan
- C. Dampak Isu Pendidikan terhadap Kebijakan
- D. Pendekatan dan Solusi untuk Kebijakan Pendidikan
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

### **Bab IV : Merumuskan masalah dan menentukan kebijakan pendidikan**

- A. Identifikasi Masalah dalam Pendidikan
- B. Jenis-jenis dan Analisis Faktor Permasalahan Pendidikan
- C. Metode Perumusan Masalah Pendidikan
- D. Proses Penentuan Kebijakan Pendidikan
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

#### **Bab V : Studi kasus tentang kebijakan Pendidikan**

- A. Studi Perbandingan: Kebijakan Pendidikan di Berbagai Negara (Negara berkembang dan maju)
- B. Kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan
- C. Tantangan dan Masa Depan Kebijakan Pendidikan
- D. Tantangan dan Implementasi Kebijakan Pendidikan
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

#### **Bab VI : Proses implementasi kebijakan pendidikan**

- A. Implementasi Kebijakan Pendidikan (mencakup pengertian dan pentingnya implementasi, faktor yg mempengaruhi, peran pemangku kepentingan)
- B. Prinsip-prinsip dalam Kebijakan Pendidikan
- C. Tahapan Formulasi Kebijakan Pendidikan
- D. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan
- E. Studi Kasus
- F. Kesimpulan
- G. Daftar Pustaka
- H. Identitas Penulis

#### **Bab VII : Proses dan teknik evaluasi kebijakan pendidik**

- A. Proses Evaluasi Kebijakan Pendidikan (mencakup identifikasi masalah, perumusan tujuan evaluasi, perencanaan evaluasi, implementasi pengumpulan data, analisis interpretasi data, rekomendasi)
- B. Teknik Evaluasi Kebijakan Pendidikan (bisa mencakup teknik kuantitatif, kualitatif, campuran, Alat dan Instrumen Evaluasi)

- C. Tantangan dan Peluang dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan
- D. Peran Teknologi dalam Evaluasi Kebijakan
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

### **Bab IX : Proses sosialisasi kebijakan Pendidikan**

- A. Konsep Dasar Sosialisasi Kebijakan
- B. Strategi dan Metode Sosialisasi Kebijakan Pendidikan
- C. Studi Kasus Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia
- D. Evaluasi dan Implikasi Sosialisasi Kebijakan
- E. Rekomendasi Untuk Proses Sosialisasi Kebijakan Yang Efektif
- F. Konteks Sosial, Politik, dan Budaya dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan
- G. Peran Pemangku Kepentingan dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan
- H. Inovasi dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan
- I. Implikasi Sosialisasi Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan
- J. Peran Komunikasi yang Efektif dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan
- K. Kesimpulan
- L. Daftar Pustaka
- M. Identitas Penulis

### **Bab X : Kebijakan desentralisasi Pendidikan**

- A. Desentralisasi dalam Konteks Pendidikan
- B. Teori-teori Terkait Desentralisasi Pendidikan
- C. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia
- D. Tantangan dan Peluang Desentralisasi Pendidikan
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

### **Bab XI : Kebijakan program pendidikan**

- A. Landasan Kebijakan Pendidikan (mencakup definisi dan konsep kebijakan pendidikan, landasan filosofis, yuridis, sosiologis, prinsip dasar)
- B. Proses Formulasi Kebijakan Pendidikan
- C. Implementasi Program Pendidikan(strategi, model, faktor pendukung penghambat)
- D. Isu dan Tantangan Masa Depan (pend era digital, kesetaraan akses pend, globalisasi dan dampak kebijakan)
- E. Kesimpulan
- F. Daftar Pustaka
- G. Identitas Penulis

# **BAB I**

## **Konsep analisis kebijakan pendidikan**

### **A. Definisi Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem pendidikan suatu negara. Secara umum, kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait dengan tujuan untuk mencapai sasaran pendidikan tertentu. Kebijakan ini tidak hanya mencakup perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga evaluasi terhadap berbagai program pendidikan yang dilaksanakan. Menurut McDonnell dan Elmore (1987), kebijakan pendidikan mencakup keputusan-keputusan yang menetapkan tujuan, arah, dan metode yang digunakan untuk mempengaruhi proses pendidikan di tingkat sistem atau lembaga. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan proses pengelolaan pendidikan, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien.

Pentingnya kebijakan pendidikan terletak pada peranannya dalam mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, pengembangan guru, hingga pendanaan pendidikan. Sebagai contoh, kebijakan mengenai kurikulum dapat mempengaruhi bagaimana materi ajar disusun dan disampaikan di sekolah-sekolah, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Menurut Hargreaves (2012), kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada perubahan struktural, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal dalam konteks yang lebih luas. Kebijakan pendidikan yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan, yang akhirnya mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus mampu menanggapi tantangan yang muncul di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan dalam pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan digital sangat penting di era informasi saat ini, di mana keterampilan teknologi menjadi kunci utama dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Ball (2015), kebijakan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta dampaknya terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat.

Selain kebijakan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan internal yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Lembaga pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, sering kali memiliki kebijakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik siswa dan staf pengajarnya. Kebijakan internal ini dapat mencakup berbagai hal, seperti pengaturan waktu pembelajaran, penataan fasilitas, hingga program pelatihan bagi tenaga pengajar. Kebijakan internal ini juga penting dalam menciptakan budaya sekolah yang mendukung keberhasilan akademik dan pengembangan karakter siswa. Menurut Lubienski (2013), kebijakan internal yang jelas dan konsisten dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar bagi siswa dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Lebih jauh lagi, kebijakan pendidikan juga harus dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang berbeda dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang melibatkan partisipasi aktif dari orang tua dan

masyarakat dapat memperkuat dukungan terhadap pendidikan di tingkat lokal. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan pendidikan. Menurut Sabates et al. (2010), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, karena kebijakan yang dibuat lebih mencerminkan kebutuhan dan kondisi lokal.

Dalam implementasinya, kebijakan pendidikan harus selalu dievaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa dan masyarakat. Evaluasi kebijakan pendidikan juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang perlu diperbaiki dalam kebijakan yang ada. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan tantangan baru dalam pendidikan, kebijakan pendidikan harus terus diperbarui dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Menurut O'Donoghue (2017), evaluasi kebijakan pendidikan harus bersifat berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk para ahli pendidikan, praktisi, serta komunitas pendidikan, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

## **B. Dimensi Kebijakan Pendidikan**

Dimensi kebijakan pendidikan meliputi berbagai aspek yang membentuk dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan tidak hanya merupakan produk dari proses legislatif atau administratif, tetapi juga refleksi dari dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, memahami dimensi-dimensi tersebut menjadi sangat penting untuk merancang kebijakan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai dimensi-dimensi utama dalam kebijakan pendidikan.

### **1. Dimensi Politik**

Kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik yang berkaitan dengan kepentingan partai politik, ideologi, dan

dinamika sosial dalam masyarakat. Keputusan-keputusan dalam kebijakan pendidikan sering mencerminkan prioritas politik tertentu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya, pemerintahan dengan ideologi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial cenderung memberikan perhatian lebih pada kesetaraan akses pendidikan, sementara pemerintahan dengan orientasi neoliberal mungkin lebih menekankan efisiensi dan kompetisi dalam sistem pendidikan (Ball, 2015).

Dalam beberapa kasus, kebijakan pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas, seperti meningkatkan stabilitas sosial atau mempromosikan identitas nasional. Sebagai contoh, kebijakan yang memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan sering dirancang untuk memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di antara warga negara (Hargreaves & Fullan, 2012). Namun, intervensi politik yang berlebihan dalam kebijakan pendidikan dapat menyebabkan konflik kepentingan dan mengurangi otonomi institusi pendidikan.

Kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok kepentingan, seperti serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan komunitas bisnis, yang memiliki kepentingan berbeda dalam pembentukan sistem pendidikan. Kelompok ini sering kali melobi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan agenda mereka, seperti kurikulum yang mendukung keterampilan kerja atau program pendidikan yang inklusif untuk kelompok-kelompok terpinggirkan (Mundy & Verger, 2015). Pengaruh ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan jika kepentingan berbagai kelompok saling bertentangan. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan pendidikan sering kali menjadi arena negosiasi dan kompromi yang kompleks.

Selain itu, globalisasi telah membawa dimensi baru dalam politik kebijakan pendidikan. Organisasi internasional, seperti UNESCO, OECD, dan Bank Dunia, semakin berperan dalam menentukan agenda pendidikan melalui inisiatif global, seperti

Pendidikan untuk Semua (Education for All) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Standar internasional dan perbandingan global, seperti Program for International Student Assessment (PISA), juga mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar kompetitif di tingkat global (Lingard & Sellar, 2016). Namun, adaptasi kebijakan ini tidak selalu sejalan dengan kebutuhan lokal, yang dapat menciptakan ketegangan antara tuntutan global dan prioritas nasional atau lokal dalam sistem pendidikan

## 2. Dimensi Ekonomi

Aspek ekonomi sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan, terutama dalam hal pendanaan dan distribusi sumber daya. Pendanaan pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan. Kebijakan anggaran pendidikan yang memadai dapat memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan fasilitas, bahan ajar, dan pelatihan bagi guru (OECD, 2021).

Namun, distribusi sumber daya sering kali menjadi tantangan dalam kebijakan pendidikan, terutama di negara-negara berkembang. Ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan sering kali tercermin dalam akses dan kualitas pendidikan yang tersedia. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah pedesaan mungkin menghadapi kekurangan guru, fasilitas yang buruk, dan akses yang terbatas ke teknologi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang baik harus memperhatikan alokasi sumber daya yang adil untuk mengurangi kesenjangan tersebut (UNESCO, 2020).

Selain itu, kebijakan pendidikan juga berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan sering kali diarahkan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan ekonomi global, seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kemampuan beradaptasi (Schleicher, 2018). Namun, fokus yang berlebihan pada aspek ekonomi dapat

mengabaikan nilai-nilai pendidikan yang lebih luas, seperti pengembangan karakter dan inklusivitas.

Pendanaan pendidikan memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan sistem pendidikan di berbagai negara. Menurut OECD (2021), alokasi anggaran yang memadai dapat memastikan bahwa sekolah memiliki akses ke sumber daya penting, termasuk fasilitas fisik, bahan ajar, dan pelatihan guru yang berkualitas. Dalam banyak kasus, negara-negara dengan anggaran pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki sistem pendidikan yang lebih baik dalam hal aksesibilitas dan kualitas. Namun, pengelolaan pendanaan yang kurang efektif dapat mengakibatkan inefisiensi, yang berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan yang strategis diperlukan untuk memaksimalkan dampak dari setiap investasi pendidikan.

Distribusi sumber daya menjadi tantangan utama, terutama di negara-negara dengan kesenjangan ekonomi yang besar. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan sering kali terlihat dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Misalnya, sekolah-sekolah di pedesaan sering kali menghadapi keterbatasan fasilitas, kekurangan tenaga pengajar, dan akses terbatas ke teknologi (UNESCO, 2020). Untuk mengatasi hal ini, kebijakan pendidikan perlu mengedepankan prinsip keadilan dalam alokasi sumber daya. Strategi seperti afirmasi anggaran untuk daerah tertinggal dan program peningkatan kapasitas guru dapat membantu mengurangi ketimpangan ini dan menciptakan kesempatan belajar yang lebih merata.

Selain memastikan pendanaan dan distribusi sumber daya yang adil, kebijakan pendidikan juga harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan pasar tenaga kerja. Schleicher (2018) menyoroti pentingnya pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan fleksibilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya siap bekerja tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Namun, penting untuk menyeimbangkan fokus pada aspek

ekonomi dengan nilai-nilai pendidikan yang lebih luas, seperti pengembangan karakter, pembentukan identitas sosial, dan inklusivitas. Pendidikan yang holistik akan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Dimensi Sosial

Dimensi sosial dalam kebijakan pendidikan berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat, seperti kesetaraan akses pendidikan, pengaruh kebijakan terhadap kelompok marginal, dan peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan. Kebijakan pendidikan yang inklusif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Menurut Banks (2015), kebijakan pendidikan harus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rendah, kelompok minoritas, dan individu dengan kebutuhan khusus.

Kesetaraan akses pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam banyak kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, program beasiswa dan subsidi pendidikan sering kali diperkenalkan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan. Selain itu, kebijakan pendidikan juga dapat membantu mengurangi ketimpangan gender dalam pendidikan, seperti yang terlihat dalam inisiatif global untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) (UNESCO, 2020).

Kebijakan pendidikan juga memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi sosial. Pendidikan yang inklusif dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi antar kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme dan inklusivitas dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan harmoni sosial (Ainscow, 2016).

### 4. Dimensi Kultural

Kebijakan pendidikan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dimensi kultural dalam kebijakan pendidikan mencakup bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan, melestarikan, atau bahkan mengubah nilai-nilai budaya tertentu. Sebagai contoh, kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan berbasis budaya lokal dapat membantu memperkuat identitas budaya siswa dan komunitasnya (Gay, 2018).

Namun, tantangan utama dalam dimensi kultural adalah menciptakan keseimbangan antara melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat global. Misalnya, sementara penting untuk menghormati bahasa dan tradisi lokal, kebijakan pendidikan juga harus memastikan bahwa siswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bersaing di tingkat internasional. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan pendidikan bilingual atau multibahasa yang menghormati bahasa lokal sekaligus memperkenalkan bahasa global seperti Inggris (Hornberger, 2009).

Selain itu, kebijakan pendidikan juga dapat berperan dalam mempromosikan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan beretika (Reimers, 2020).

### Integrasi Dimensi-Dimensi Kebijakan Pendidikan

Meskipun dimensi-dimensi kebijakan pendidikan sering kali dibahas secara terpisah, dalam praktiknya, dimensi-dimensi ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, keputusan politik tentang alokasi anggaran pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh prioritas ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan sosial dan kultural. Demikian pula, kebijakan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan inklusivitas sosial sering kali memerlukan dukungan ekonomi dan keselarasan dengan nilai-nilai budaya lokal.

Pendekatan holistik dalam merancang kebijakan pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat menjawab berbagai tantangan yang ada secara komprehensif. Dalam hal ini, analisis multidimensional dapat membantu pembuat kebijakan untuk memahami hubungan kompleks antara dimensi-dimensi tersebut dan merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (OECD, 2021).

Dimensi-dimensi kebijakan pendidikan—politik, ekonomi, sosial, dan budaya—sering kali berinteraksi secara dinamis dalam praktiknya. Keputusan politik terkait alokasi anggaran pendidikan, misalnya, tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kultural yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan yang mendorong pemerataan akses pendidikan di daerah pedesaan mungkin memerlukan justifikasi politik yang kuat, pendanaan yang signifikan, serta adaptasi terhadap norma budaya setempat. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari konteks multidimensional yang melingkupinya (OECD, 2021).

Pentingnya pendekatan holistik dalam kebijakan pendidikan semakin terlihat dalam upaya untuk mengatasi tantangan kompleks seperti ketimpangan pendidikan atau pengembangan keterampilan abad ke-21. Kebijakan inklusif yang dirancang untuk menjangkau kelompok-kelompok marjinal, misalnya, memerlukan integrasi antara dukungan ekonomi melalui anggaran pendidikan yang memadai dan keselarasan dengan nilai-nilai sosial serta budaya lokal. Menurut UNESCO (2020), kebijakan pendidikan yang mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya cenderung lebih berhasil dalam meningkatkan partisipasi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Analisis multidimensional menjadi alat penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk memahami hubungan kompleks antara dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga dapat merancang

kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. OECD (2021) menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang dirancang secara holistik memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inklusivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan dialog antara pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mengintegrasikan dimensi-dimensi kebijakan pendidikan.

## **C. Model dan Pendekatan dalam Kebijakan Pendidikan**

Berbagai model dan pendekatan dalam analisis kebijakan pendidikan digunakan untuk mengkaji dan memahami kebijakan yang ada. Setiap model dan pendekatan memiliki fokus dan metodologi yang berbeda, yang dapat membantu membuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pendidikan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan dampak kebijakan pendidikan secara lebih komprehensif. Berikut ini adalah beberapa model dan pendekatan yang sering digunakan dalam analisis kebijakan pendidikan.

### **1. Model Rasional**

Model rasional berfokus pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data dan informasi yang rasional. Kebijakan pendidikan yang dibuat dengan pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas melalui penggunaan sumber daya yang terbatas. Proses pengambilan keputusan dalam model rasional melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis alternatif solusi, dan pemilihan opsi terbaik berdasarkan kriteria yang jelas.

Menurut Weimer dan Vining (2017), model rasional sering digunakan dalam situasi di mana tujuan kebijakan dapat didefinisikan dengan jelas, dan data yang diperlukan tersedia untuk mendukung analisis. Namun, dalam konteks pendidikan, penerapan model ini sering kali menghadapi tantangan, seperti keterbatasan data, kompleksitas sistem pendidikan, dan

pengaruh faktor-faktor non-rasional, seperti tekanan politik atau ideologi.

Sebagai contoh, kebijakan peningkatan mutu pendidikan berbasis hasil belajar siswa sering kali menggunakan pendekatan rasional untuk merancang intervensi yang berbasis bukti. Namun, kritik terhadap model ini menyebutkan bahwa pendekatan yang terlalu teknokratis dapat mengabaikan aspek-aspek sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi kebijakan (Ball, 2015).

### Keunggulan Model Rasional dalam Kebijakan Pendidikan

Pendekatan rasional dalam kebijakan pendidikan memiliki keunggulan signifikan dalam hal struktur dan metodologi. Dengan memanfaatkan data yang relevan dan analisis yang terencana, model ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, kebijakan yang bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa melalui pengenalan program pelatihan guru berbasis data dapat memberikan panduan yang jelas tentang alokasi sumber daya yang efektif. Proses pengambilan keputusan yang sistematis ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan yang mungkin timbul akibat pengambilan keputusan berbasis intuisi atau tekanan politik (Weimer & Vining, 2017).

### Tantangan Implementasi Model Rasional

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan model rasional dalam kebijakan pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Kompleksitas sistem pendidikan, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, sering kali membuat proses pengambilan keputusan menjadi rumit. Selain itu, data yang dibutuhkan untuk mendukung analisis sering kali tidak lengkap, tidak akurat, atau sulit diakses, terutama di negara-negara berkembang. Contohnya, kebijakan yang dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh data demografis yang rinci dan terkini (Ball, 2015).

## Kritik terhadap Model Rasional

Salah satu kritik utama terhadap model rasional adalah kecenderungannya untuk terlalu teknokratis, sehingga mengabaikan dimensi sosial dan budaya yang penting dalam pendidikan. Kebijakan yang dirancang dengan pendekatan ini mungkin tidak memperhitungkan konteks lokal atau kebutuhan unik dari komunitas tertentu. Misalnya, kebijakan yang mengadopsi teknologi digital secara masif dalam pembelajaran mungkin tampak rasional dari perspektif efisiensi, tetapi dapat menghadapi resistensi dari masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan model rasional sangat bergantung pada kemampuan membuat kebijakan untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan perspektif multidimensional dalam proses pengambilan keputusan (Weimer & Vining, 2017; Ball, 2015).

## 2. Model Incremental

Model incremental lebih mengutamakan perubahan bertahap dalam kebijakan pendidikan. Dalam pendekatan ini, kebijakan yang ada dimodifikasi sedikit demi sedikit seiring berjalananya waktu, daripada mengubah secara besar-besaran dalam satu kali kebijakan. Model ini sering digunakan dalam situasi di mana perubahan drastis dianggap terlalu berisiko atau tidak realistik karena keterbatasan sumber daya atau resistensi dari pemangku kepentingan.

Menurut Lindblom (1959), pendekatan incremental lebih mencerminkan realitas pengambilan keputusan dalam konteks yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Dalam konteks pendidikan, model ini sering diterapkan dalam reformasi kurikulum atau peningkatan kualitas guru, di mana perubahan dilakukan secara bertahap untuk memungkinkan adaptasi dan evaluasi yang lebih baik.

Namun, pendekatan incremental juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah potensi untuk memperlambat perubahan yang mendesak, terutama dalam situasi di mana sistem

pendidikan menghadapi krisis atau tantangan besar. Sebagai contoh, di negara-negara berkembang, pendekatan incremental mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah akses pendidikan yang mendesak bagi kelompok marginal (UNESCO, 2020).

### Keunggulan Model Incremental dalam Kebijakan Pendidikan

Model incremental memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan pragmatisme. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat mengurangi risiko kegagalan yang sering kali terkait dengan perubahan besar yang tidak teruji. Misalnya, reformasi kurikulum dapat dimulai dengan mengubah beberapa elemen kecil, seperti pengintegrasian materi baru secara bertahap, sebelum diterapkan secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan adanya waktu untuk evaluasi dan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari pelaksana kebijakan, seperti guru dan kepala sekolah, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi (Lindblom, 1959).

### Implementasi Incremental dalam Sistem Pendidikan

Dalam praktiknya, model incremental sering digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan melalui program-program bertahap. Contohnya adalah pengembangan profesional guru, di mana pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kompetensi tertentu dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pendekatan ini juga umum diterapkan dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, seperti membangun fasilitas sekolah secara bertahap di daerah-daerah terpencil, sehingga distribusi sumber daya dapat dikelola lebih efektif (UNESCO, 2020).

## 3. Pendekatan Sistem

Pendekatan sistem melihat kebijakan pendidikan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yang mencakup berbagai komponen yang saling berinteraksi, seperti kurikulum, pengajaran, dan evaluasi. Pendekatan ini mengutamakan hubungan antar elemen-elemen pendidikan dan bagaimana kebijakan dapat memperbaiki atau mengoptimalkan keseluruhan sistem pendidikan.

Menurut Senge (2006), pendekatan sistem membantu membuat kebijakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu elemen dapat memengaruhi elemen lain dalam sistem pendidikan. Misalnya, kebijakan yang berfokus pada pelatihan guru juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kurikulum, evaluasi siswa, dan sumber daya sekolah.

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan sistemik yang menghalangi implementasi kebijakan. Sebagai contoh, analisis sistem dapat mengungkap bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan dapat menghadapi tantangan dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (OECD, 2021). Meskipun pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif, tantangannya terletak pada kebutuhan akan data yang luas dan kemampuan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi interaksi antar elemen sistem.

### Keunggulan Pendekatan Sistem dalam Kebijakan Pendidikan

Pendekatan sistem memungkinkan membuat kebijakan untuk melihat pendidikan secara holistik, sehingga dapat mengidentifikasi dan menangani masalah secara lebih efektif. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan akses teknologi di sekolah, pendekatan sistem dapat membantu memahami kebutuhan pelatihan guru, penyediaan infrastruktur pendukung, dan integrasi teknologi ke dalam kurikulum. Dengan mempertimbangkan hubungan antara komponen-komponen ini, kebijakan menjadi lebih terarah dan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan (Senge, 2006).

### Implementasi Pendekatan Sistem dalam Pendidikan

Dalam praktiknya, pendekatan sistem sering digunakan untuk mendesain reformasi pendidikan nasional. Misalnya, Program Pendidikan Universal di India mengadopsi pendekatan ini dengan mengintegrasikan upaya peningkatan partisipasi siswa, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, dan pengelolaan sumber daya pendidikan secara efisien. Selain itu, pendekatan ini

juga mendukung koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan komunitas, sehingga memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan (UNESCO, 2020).

### Kritik terhadap Pendekatan Sistem

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendekatan sistem juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan data yang akurat dan analisis yang komprehensif, yang sering kali sulit diperoleh, terutama di negara berkembang. Selain itu, kompleksitas sistem pendidikan dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat, karena berbagai elemen yang saling terkait harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, reformasi pendidikan yang melibatkan perubahan kurikulum sering kali terhambat oleh resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti guru atau orang tua, yang memerlukan pendekatan komunikasi dan pelibatan yang cermat (OECD, 2021).

### 4. Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis menekankan pada analisis mendalam terhadap struktur kekuasaan, ketidaksetaraan, dan dominasi dalam kebijakan pendidikan. Pendekatan ini menganggap bahwa kebijakan pendidikan sering kali mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan bertujuan untuk merubah struktur tersebut. Pendekatan kritis sering kali terinspirasi oleh teori-teori kritis seperti pemikiran Paulo Freire, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk pembebasan sosial (Freire, 2000).

Dalam analisis kebijakan pendidikan, pendekatan kritis sering digunakan untuk mengkaji bagaimana kebijakan tertentu dapat memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan. Sebagai contoh, kebijakan yang berfokus pada standar nasional dalam pendidikan sering dikritik karena dapat mengabaikan kebutuhan lokal dan memperkuat kesenjangan antara sekolah di daerah kaya dan miskin (Apple, 2018).

Pendekatan kritis juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan yang inklusif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan komunitas, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak (Giroux, 2020).

### Peran Pendekatan Kritis dalam Membongkar Ketidakadilan

Pendekatan kritis membantu mengungkap bagaimana kebijakan pendidikan sering kali mencerminkan dan memperkuat struktur sosial yang tidak adil. Misalnya, dalam konteks globalisasi, kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kompetisi sering mengabaikan kebutuhan kelompok marginal, seperti anak-anak dari komunitas miskin atau masyarakat adat. Dengan menggunakan pendekatan kritis, pembuat kebijakan dapat menilai apakah kebijakan yang diusulkan memperkuat ketidaksetaraan atau justru menawarkan solusi untuk mengatasinya (Freire, 2000).

### Kritik terhadap Standarisasi dalam Pendidikan

Salah satu isu yang sering disorot oleh pendekatan kritis adalah kebijakan standar nasional yang diberlakukan secara seragam. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, standar ini sering kali tidak memperhitungkan konteks lokal dan kebutuhan siswa di daerah tertentu. Sebagai contoh, penelitian Apple (2018) menunjukkan bahwa standar nasional cenderung menguntungkan sekolah di daerah kaya yang memiliki sumber daya lebih baik, sementara sekolah di daerah miskin justru semakin tertinggal. Hal ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan untuk mengakomodasi keragaman sosial dan ekonomi.

### Partisipasi Inklusif dalam Pembuatan Kebijakan

Pendekatan kritis juga mendorong pembuat kebijakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan

kepentingan kelompok dominan, tetapi juga memperhatikan suara kelompok yang sering kali terpinggirkan. Giroux (2020) menekankan bahwa partisipasi masyarakat, termasuk siswa, guru, dan komunitas lokal, dapat memperkuat legitimasi dan relevansi kebijakan pendidikan. Dengan cara ini, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk transformasi sosial yang lebih inklusif.

### Integrasi Model dan Pendekatan

Meskipun model dan pendekatan ini sering dibahas secara terpisah, dalam praktiknya, integrasi dari berbagai pendekatan sering kali diperlukan untuk mengatasi kompleksitas kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, pendekatan sistem dapat digunakan untuk memahami konteks kebijakan secara menyeluruh, sementara pendekatan kritis dapat membantu mengidentifikasi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, penggunaan pendekatan incremental dalam tahap awal implementasi kebijakan dapat membantu mengurangi resistensi dan memungkinkan adaptasi yang lebih baik. Namun, pendekatan rasional tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat dan tujuan yang jelas. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berbagai model dan pendekatan dalam analisis kebijakan pendidikan menawarkan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan. Model rasional memberikan pendekatan berbasis data untuk pengambilan keputusan, sementara model incremental menawarkan strategi perubahan bertahap. Pendekatan sistem memberikan pandangan holistik terhadap interaksi antar elemen dalam sistem pendidikan, dan pendekatan kritis menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, analisis kebijakan pendidikan dapat menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan yang ada.

## **D. Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Pendidikan**

Prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan pendidikan adalah pedoman yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan yang dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan pendidikan.

### **1. Prinsip Aksesibilitas**

Kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, kelompok marginal, atau individu dengan kebutuhan khusus.

Menurut UNESCO (2020), aksesibilitas pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah program pendidikan inklusif yang memungkinkan anak-anak dengan disabilitas untuk belajar di sekolah umum bersama dengan teman-temannya. Kebijakan seperti ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar yang setara tetapi juga mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dalam masyarakat.

Namun, tantangan dalam menerapkan prinsip aksesibilitas masih besar. Di banyak negara berkembang, hambatan geografis, ekonomi, dan budaya sering kali menghalangi akses pendidikan bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan solusi yang inovatif, seperti penggunaan teknologi untuk pendidikan jarak jauh atau pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu (World Bank, 2021).

### **2. Prinsip Kualitas**

Kebijakan pendidikan harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan kurikulum, tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan. Prinsip kualitas menekankan bahwa pendidikan yang tersedia tidak hanya harus dapat diakses tetapi juga harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan.

Menurut Darling-Hammond et al. (2020), kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, relevansi kurikulum, dan dukungan fasilitas yang memadai. Sebagai contoh, kebijakan pelatihan guru secara berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pengajaran di kelas. Selain itu, pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja juga merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Namun, peningkatan kualitas sering kali membutuhkan investasi yang besar. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan dilakukan secara efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang optimal. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan juga diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kualitas pendidikan tercapai (OECD, 2021).

### 3. Prinsip Keadilan

Kebijakan pendidikan harus memperhatikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan belajar bagi semua kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok yang kurang beruntung. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang sering kali disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, atau geografis.

Anderson dan Loeb (2021) menyatakan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak hanya berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, tetapi juga memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai contoh, kebijakan alokasi dana tambahan untuk sekolah di daerah tertinggal atau pemberian bantuan belajar kepada siswa dari

keluarga miskin merupakan langkah konkret untuk mewujudkan keadilan dalam pendidikan.

Namun, mewujudkan keadilan dalam pendidikan sering kali menghadapi resistensi, terutama dalam konteks alokasi sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan mendukung upaya tersebut.

#### 4. Prinsip Akuntabilitas

Setiap kebijakan pendidikan harus memiliki sistem evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Menurut Fullan dan Quinn (2016), akuntabilitas dalam pendidikan melibatkan pengukuran kinerja berdasarkan indikator yang jelas, seperti hasil belajar siswa, tingkat partisipasi, dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem akuntabilitas yang efektif dapat membantu pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Namun, akuntabilitas juga harus diimbangi dengan pendekatan yang mendukung, bukan menghukum. Sebagai contoh, guru yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa harus diberikan pelatihan tambahan, bukan hanya sekadar dinilai berdasarkan hasil ujiannya saja (Hargreaves & Fullan, 2020).

#### 5. Prinsip Partisipasi

Kebijakan pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif. Prinsip partisipasi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas.

Menurut Levin (2020), partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Sebagai contoh, konsultasi publik dalam perumusan kurikulum nasional dapat membantu memastikan bahwa kurikulum tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, partisipasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan.

Namun, tantangan dalam penerapan prinsip partisipasi adalah memastikan bahwa semua kelompok memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, kelompok marginal atau minoritas sering kali kurang terwakili. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus dirancang untuk menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dan representatif.

Prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan pendidikan, seperti aksesibilitas, kualitas, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi, merupakan pedoman penting untuk merancang kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh lapisan masyarakat dan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

## **E. Kesimpulan**

Kebijakan pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan yang efisien dan inklusif. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai definisi, dimensi, model, dan prinsip dasar kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik, adil, dan efektif. Kebijakan pendidikan yang dirancang dengan baik tidak hanya mencakup aspek teknis, seperti pengelolaan sumber daya dan kurikulum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya,

dan ekonomi yang memengaruhi akses dan kualitas pendidikan di berbagai lapisan masyarakat.

Dengan mengaplikasikan berbagai pendekatan analisis kebijakan, seperti pendekatan sistem dan pendekatan kritis, pembuatan kebijakan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak kebijakan yang ada secara komprehensif. Analisis ini memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan di masa depan. Sebagai contoh, pendekatan sistem membantu melihat hubungan antar elemen pendidikan, seperti hubungan antara kurikulum dan pelatihan guru, sedangkan pendekatan kritis mengkaji ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kohesi sosial. Selain itu, pendidikan yang baik juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Oleh karena itu, investasi dalam kebijakan pendidikan yang adil dan efektif adalah langkah strategis untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat dan negara.

## **F. Daftar Pustaka**

- Ainscow, M. (2016). *Struggles for Equity in Education: The Selected Works of Mel Ainscow*. Routledge.
- Anderson, L., & Loeb, S. (2021). *Improving Education Equity: Lessons from Policy and Practice*. Harvard Education Press.
- Apple, M. W. (2018). *Ideology and Curriculum*. New York: Routledge.
- Ball, S. J. (2015). *Education, Justice and the Human Good*. Routledge.

- Ball, S. J. (2015). *Education, Policy, and Social Justice: Practices and Principles*. London: Routledge
- Ball, S. J. (2015). Education, justice, and democracy: The struggle over ignorance and opportunity. In S. L. Robertson, K. Mundy, A. Verger, & F. Menashy (Eds.), *Public private partnerships in education: New actors and modes of governance* (pp. 145-157). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Routledge.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2020). *Effective Teacher Professional Development*. Learning Policy Institute.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Bloomsbury Publishing.
- Fullan, M., & Quinn, J. (2016). *Coherence: The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems*. Corwin Press.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. Teachers College Press.
- Giroux, H. A. (2020). *On Critical Pedagogy*. London: Bloomsbury Publishing.
- Hargreaves, A. (2012). *The Fourth Way: The Inspiring Future for Educational Change*. Corwin Press.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. Teachers College Press.
- Hornberger, N. H. (2009). Multilingual Education Policy and Practice: Ten Certainties (Grounded in Indigenous Experience). *Language Teaching*, 42(2), 197-211.
- Levin, B. (2020). *How to Change 5000 Schools: A Practical and Positive Approach for Leading Change at Every Level*. Harvard Education Press.

- Lindblom, C. E. (1959). "The Science of Muddling Through." *Public Administration Review*, 19(2), 79-88.
- Lingard, B., & Sellar, S. (2016). The global education race: Taking the measure of PISA and international testing. *Canadian Journal of Education Administration and Policy*, 185, 1-4.
- Lubienski, C. (2013). The Politics of the Charter School Movement: A Case Study of Educational Reform in the United States. *Educational Policy*, 27(2), 245-266.
- McDonnell, L. M., & Elmore, R. F. (1987). Getting the Job Done: Alternative Policy Instruments. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 9(1), 15-34.
- Mundy, K., & Verger, A. (2015). The World Bank and the global governance of education in a changing world order. *International Journal of Educational Development*, 40, 9-18. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.11.021>
- OECD. (2016). *PISA 2015 Results: Excellence and Equity in Education*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Education Policy Outlook 2021: Shaping Responsive and Resilient Education in a Changing World*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Education at a Glance 2021: OECD Indicators*. OECD Publishing.
- O'Donoghue, T. (2017). *Educational Policy and the Politics of Education*. Springer.
- Reimers, F. M. (2020). *Educating Students to Improve the World*. Springer.
- Sabates, R., Hossler, D., & Garcia, J. (2010). The Role of the Community in the Education Process. *Education Policy Analysis Archives*, 18(2), 23-39.
- Schleicher, A. (2018). *World Class: How to Build a 21st-Century School System*. OECD Publishing.

- Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. New York: Currency
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education*. UNESCO Publishing.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Routledge.
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. World Bank Publishing.

## **G. Identitas Penulis**



Muchamad Arif, adalah seorang dosen yang mengajar di Universitas Narotama, Universitas Hayam Wuruk Perbanas dan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Latar belakang pendidikan penulis adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris UNESA dan S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris Unika Widya Mandala Surabaya. Beberapa karya buku penulis adalah 5 Jurus Jitu Menulis Skripsi Deskriptif Kualitatif, Bule Jago Bahasa Indonesia dalam 1 Minggu, Intensive English for Environmental Health Sanitation, dan English for Healthcare Students.

## **Bab II**

### **Teori Analisis Kebijakan Pendidikan**

#### **A. Pengertian Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam bidang pendidikan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based) dan teori. Analisis ini mencakup kajian mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan pendidikan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi dampak kebijakan terhadap individu, institusi, dan masyarakat.

Secara konseptual, analisis kebijakan pendidikan berfokus pada dua dimensi utama: normatif dan empiris. Dimensi normatif berkaitan dengan nilai-nilai, tujuan, dan prinsip yang diinginkan dalam kebijakan pendidikan, seperti keadilan, efisiensi, dan inklusivitas. Sementara itu, dimensi empiris mengacu pada data dan fakta yang digunakan untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif.

Dalam konteks pendidikan, analisis kebijakan memiliki karakteristik yang khas karena menyangkut sektor strategis yang memengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menjadikan analisis kebijakan pendidikan tidak hanya sebagai aktivitas teknokratis, tetapi juga refleksi moral yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya.

#### **Tujuan Analisis Kebijakan Pendidikan**

##### **1. Identifikasi Masalah**

Mengungkap akar masalah dalam sistem pendidikan, seperti kesenjangan akses, kualitas pengajaran, atau kurangnya relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.

## **2. Formulasi Solusi**

Merancang alternatif kebijakan yang inovatif dan berbasis bukti untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.

## **3. Peningkatan Implementasi**

Memberikan panduan operasional dalam pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal.

## **4. Evaluasi Dampak**

Menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan.

## **Prinsip-Prinsip Analisis Kebijakan Pendidikan**

### **1. Berbasis Data**

Analisis harus didasarkan pada data empiris yang valid dan reliabel untuk memastikan keakuratan hasil evaluasi.

### **2. Inklusif dan Partisipatif**

Mengintegrasikan suara berbagai pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan komunitas, agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **3. Interdisipliner**

Melibatkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan ilmu politik, untuk memahami kompleksitas kebijakan pendidikan.

### **4. Adaptif**

Kebijakan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, teknologi, dan ekonomi.

## **Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Pendidikan**

### **1. Pendekatan Rasional-Komprehensif**

Mengutamakan analisis terstruktur yang mencakup semua alternatif kebijakan untuk memilih solusi terbaik.

### **2. Pendekatan Inkremental**

Melihat kebijakan sebagai proses bertahap yang didasarkan pada penyesuaian kecil dari kebijakan yang sudah ada.

### **3. Pendekatan Advocacy Coalition Framework**

Menekankan pentingnya koalisi antara kelompok yang memiliki kepentingan serupa dalam mendorong perubahan kebijakan.

### **Relevansi dalam Konteks Indonesia**

Di Indonesia, analisis kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi tantangan seperti disparitas pendidikan antarwilayah, rendahnya literasi, dan kurang optimalnya link and match antara pendidikan dan pasar kerja. Pendekatan berbasis bukti telah digunakan dalam program seperti Merdeka Belajar, yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di semua jenjang.

Analisis kebijakan pendidikan adalah upaya strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi sistem pendidikan, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan dan inklusivitas dalam akses dan hasil pendidikan. Dengan pendekatan berbasis data dan partisipasi, analisis ini mampu menghasilkan kebijakan yang relevan, responsif, dan berkelanjutan.

## **B. Metode dan Teknik Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan pendidikan membutuhkan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan yang efektif. Metode dan teknik analisis kebijakan mencakup beragam alat konseptual dan praktis yang dapat digunakan untuk memahami masalah, mengidentifikasi solusi, serta menilai dampak kebijakan pendidikan.

### **1. Metode Analisis Kebijakan Pendidikan**

Metode dalam analisis kebijakan pendidikan mencakup pendekatan strategis yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data, perspektif, dan tujuan. Beberapa metode utama adalah:

#### **a. Metode Kuantitatif**

Metode kuantitatif menggunakan data numerik untuk mengukur, memprediksi, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Alat ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan melalui statistik dan model matematika.

Contoh Penggunaan: Analisis tingkat partisipasi pendidikan, pengukuran literasi siswa (seperti PISA), atau evaluasi efektivitas kebijakan subsidi pendidikan.

#### **b. Metode Kualitatif**

Metode ini berfokus pada data non-numerik, seperti wawancara, studi kasus, atau observasi, untuk menggali pengalaman dan persepsi pemangku kepentingan terhadap kebijakan pendidikan.

Contoh Penggunaan: Studi dampak kebijakan kurikulum berbasis kompetensi terhadap motivasi guru dan siswa.

#### **c. Metode Campuran (Mixed Methods)**

Metode ini mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif.

Contoh Penggunaan: Evaluasi program pendidikan inklusif dengan menggunakan survei statistik (kuantitatif) dan wawancara dengan guru dan siswa (kualitatif).

#### **d. Metode Eksperimen dan Kuasi-Eksperimen**

Digunakan untuk menguji dampak langsung kebijakan tertentu dalam konteks pendidikan.

Contoh Penggunaan: Uji coba kebijakan pembelajaran digital di daerah terpencil untuk mengukur peningkatan hasil belajar.

### **2. Teknik Analisis Kebijakan Pendidikan**

Teknik analisis merupakan langkah teknis yang membantu menerjemahkan metode ke dalam tindakan praktis. Beberapa teknik utama meliputi:

**a. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)**

Teknik ini digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.

Contoh Penggunaan: Menganalisis implementasi program “Merdeka Belajar” di Indonesia.

**b. Analisis Stakeholder**

Teknik ini mengevaluasi kepentingan, pengaruh, dan kekuatan berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan pendidikan.

Contoh Penggunaan: Mengidentifikasi peran guru, orang tua, dan pemerintah dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif.

**c. Analisis Dampak (Impact Analysis)**

Teknik ini digunakan untuk mengevaluasi efek langsung dan tidak langsung dari kebijakan pendidikan.

Contoh Penggunaan: Menilai dampak kebijakan zonasi sekolah terhadap akses dan kualitas pendidikan.

**d. Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)**

Teknik ini menilai sejauh mana manfaat kebijakan pendidikan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Contoh Penggunaan: Menghitung keuntungan ekonomi jangka panjang dari investasi dalam program pendidikan anak usia dini.

**e. Analisis Risiko (Risk Analysis)**

Teknik ini mengevaluasi potensi risiko yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Contoh Penggunaan: Menganalisis risiko teknologi digital dalam pembelajaran online terkait privasi siswa.

#### **f. Evaluasi Multi-Kriteria (Multi-Criteria Analysis)**

Teknik ini membantu dalam membuat keputusan berdasarkan berbagai kriteria yang relevan dengan kebijakan pendidikan.

Contoh Penggunaan: Membandingkan beberapa opsi kebijakan untuk meningkatkan literasi siswa.

### **3. Tahapan dalam Penggunaan Metode dan Teknik Analisis**

1. Identifikasi Masalah: Menggunakan data kuantitatif atau kualitatif untuk mendefinisikan isu kebijakan.
2. Pengumpulan Data: Mengintegrasikan data primer (survei, wawancara) dan sekunder (laporan kebijakan, jurnal).
3. Formulasi Alternatif: Menggunakan teknik SWOT atau stakeholder analysis untuk merancang berbagai opsi kebijakan.
4. Evaluasi Alternatif: Menggunakan teknik seperti analisis biaya-manfaat atau evaluasi multi-kriteria.
5. Implementasi dan Pemantauan: Menggunakan metode kuasi-eksperimen atau analisis dampak untuk menilai implementasi kebijakan.
6. Rekomendasi: Memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan.

### **4. Relevansi dan Tantangan**

Dalam konteks Indonesia, penerapan metode dan teknik ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan data, resistensi pemangku kepentingan, dan kompleksitas masalah pendidikan. Namun, dengan pendekatan berbasis bukti, analisis kebijakan

pendidikan dapat memberikan solusi yang relevan dan berkelanjutan.

## **C. Tahapan dalam Analisis Kebijakan Pendidikan**

Analisis kebijakan pendidikan melibatkan serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk memahami permasalahan, mengidentifikasi alternatif solusi, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Tahapan ini membantu memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, efektif, dan berbasis bukti.

### **1. Identifikasi Masalah**

Langkah pertama dalam analisis kebijakan pendidikan adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Pada tahap ini, analis kebijakan harus mampu menjawab pertanyaan: Apa yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendidikan?

Tujuannya adalah memahami akar masalah, kelompok yang terdampak, dan dampaknya terhadap sistem pendidikan.

Kegiatan Utama:

- Mengumpulkan data dari laporan, survei, atau wawancara.
- Menganalisis konteks sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi masalah.
- Mengidentifikasi kesenjangan antara situasi yang diharapkan dan kondisi saat ini.

Contoh: Identifikasi rendahnya angka partisipasi pendidikan di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan.

### **2. Formulasi Tujuan Kebijakan**

Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, realistik, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Tujuannya adalah mendefinisikan hasil yang ingin dicapai kebijakan.

Kegiatan Utama:

- Menentukan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.
- Melibatkan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan tujuan.

Contoh: Meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar di pedesaan sebesar 15% dalam waktu 3 tahun.

### **3. Pengumpulan dan Analisis Data**

Tahap ini berfokus pada pengumpulan data yang relevan untuk memahami masalah secara mendalam dan mengidentifikasi alternatif solusi. Data yang dikumpulkan dapat berupa data primer (survei, wawancara) atau sekunder (laporan resmi, jurnal).

Tujuannya adalah memperoleh informasi yang akurat dan mendalam.

Kegiatan Utama:

- Menggunakan metode kuantitatif, seperti analisis statistik.
- Melakukan studi kualitatif untuk memahami konteks lokal.

Contoh: Menganalisis data tingkat kelulusan siswa berdasarkan faktor geografis, sosial, dan ekonomi.

### **4. Identifikasi dan Formulasi Alternatif Kebijakan**

Tahapan ini melibatkan pengembangan berbagai alternatif kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah. Alternatif yang diusulkan harus inovatif, relevan, dan realistik.

Tujuannya adalah mengidentifikasi berbagai pilihan solusi yang dapat diterapkan.

Kegiatan Utama:

- Menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap alternatif.
- Melibatkan pakar pendidikan dan pemangku kepentingan.

Contoh: Alternatif kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sekolah dasar dapat berupa:

- Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin.
- Pelaksanaan program sekolah gratis.
- Peningkatan fasilitas transportasi ke sekolah.

## **5. Evaluasi Alternatif Kebijakan**

Alternatif kebijakan yang telah dirumuskan kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan.

Tujuannya adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis berbasis bukti.

Kegiatan Utama:

- Melakukan analisis biaya-manfaat (Cost-Benefit Analysis).
- Menilai dampak sosial dan ekonomi dari setiap alternatif.

Contoh: Evaluasi menunjukkan bahwa program penyediaan beasiswa lebih efektif dibandingkan penyediaan transportasi.

## **6. Pengambilan Keputusan**

Tahap ini adalah penentuan kebijakan yang akan diterapkan berdasarkan hasil evaluasi alternatif. Keputusan biasanya

melibatkan pejabat pembuat kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan.

Tujuannya adalah memilih kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.

Kegiatan Utama:

- Mengomunikasikan hasil analisis kepada pembuat kebijakan.
- Memastikan dukungan dari berbagai pihak.

Contoh: Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan beasiswa bagi siswa miskin.

## **7. Implementasi Kebijakan**

Tahapan ini mencakup pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih. Implementasi yang baik memerlukan perencanaan operasional, alokasi sumber daya, dan pengawasan.

Tujuannya adalah menerapkan kebijakan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan Utama:

- Membuat pedoman operasional.
- Mengalokasikan anggaran dan sumber daya.
- Melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

Contoh: Program beasiswa mulai diberikan kepada siswa yang telah memenuhi syarat.

## **8. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan (monitoring) dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuannya adalah menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi kebutuhan untuk revisi.

Kegiatan Utama:

- Mengumpulkan data dampak kebijakan.
- Membandingkan hasil dengan tujuan awal.

Contoh: Evaluasi menunjukkan bahwa beasiswa meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar sebesar 10% dalam 2 tahun.

## **9. Revisi atau Perbaikan Kebijakan**

Jika kebijakan yang diterapkan tidak mencapai tujuan yang diinginkan, maka revisi atau perbaikan perlu dilakukan berdasarkan temuan dari proses evaluasi.

Tujuannya adalah memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif.

Kegiatan Utama:

- Mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi.
- Melakukan perubahan pada kebijakan yang dianggap perlu.

Contoh: Pemerintah menambah jumlah penerima beasiswa atau mengurangi persyaratan administratif.

## **D. Teori-Teori Kebijakan Dalam Pendidikan**

Teori kebijakan dalam pendidikan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan kebijakan pendidikan. Teori ini membantu para pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi untuk menjelaskan fenomena kebijakan, merumuskan strategi, serta mengevaluasi dampak kebijakan dalam sistem pendidikan.

Teori-teori kebijakan dalam pendidikan mencakup berbagai pendekatan yang bersumber dari disiplin ilmu seperti sosiologi,

politik, ekonomi, dan filsafat. Berikut ini adalah beberapa teori utama yang relevan:

## **1. Teori Rasional-Komprehensif (Rational-Choice Theory)**

Teori ini menekankan pendekatan berbasis logika dan data dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

### **Karakteristik:**

- Pembuat kebijakan dianggap sebagai aktor rasional yang memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis biaya-manfaat (Cost-Benefit Analysis).
- Fokus pada efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi sumber daya.

### **Aplikasi dalam Pendidikan:**

- Digunakan untuk merancang kebijakan subsidi pendidikan dengan mengukur dampak ekonominya.
- Memperkirakan hasil jangka panjang dari investasi dalam pendidikan anak usia dini.

## **2. Teori Inkremental (Incrementalism)**

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan berkembang secara bertahap melalui penyesuaian kecil terhadap kebijakan yang ada.

### **Karakteristik:**

- Kebijakan pendidikan sering kali berbasis pada kompromi antara berbagai kepentingan.
- Menghindari perubahan drastis untuk mengurangi risiko resistensi.

### **Aplikasi dalam Pendidikan:**

- Peningkatan kurikulum secara bertahap, seperti revisi bertahap dalam kurikulum 2013 di Indonesia.

- Kebijakan zonasi sekolah yang diterapkan secara bertahap untuk menyesuaikan kondisi lokal.

### **3. Teori Sistem (Systems Theory)**

Teori ini memandang kebijakan sebagai bagian dari sistem yang saling berinteraksi.

#### **Karakteristik:**

- Pendidikan dilihat sebagai sistem yang terdiri atas input (sumber daya), proses (pendidikan), dan output (hasil belajar).
- Kebijakan pendidikan dirancang untuk menjaga keseimbangan antara elemen-elemen sistem.

#### **Aplikasi dalam Pendidikan:**

- Digunakan untuk menganalisis efektivitas sistem pendidikan nasional.
- Menerapkan pendekatan holistik dalam reformasi pendidikan, seperti pengembangan SDM guru, fasilitas sekolah, dan kurikulum secara simultan.

### **4. Teori Kritis (Critical Theory)**

Teori ini bertujuan mengkritik dan mengubah struktur sosial yang dianggap tidak adil melalui kebijakan pendidikan.

#### **Karakteristik:**

- Pendidikan dilihat sebagai alat untuk memberdayakan kelompok yang terpinggirkan.
- Menekankan pentingnya keadilan sosial dan inklusivitas dalam kebijakan pendidikan.

#### **Aplikasi dalam Pendidikan:**

- Kebijakan pendidikan inklusif yang mengakomodasi kebutuhan siswa dengan disabilitas.

- Program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin atau marginal.

## **5. Teori Jaringan Kebijakan (Policy Network Theory)**

Teori ini menjelaskan bagaimana kebijakan dirancang dan diimplementasikan melalui jaringan aktor yang saling terhubung.

### **Karakteristik:**

- Kebijakan pendidikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.
- Menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

### **Aplikasi dalam Pendidikan:**

- Implementasi program pendidikan berbasis komunitas, seperti *School Community Partnership*.
- Kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dalam penyediaan teknologi pendidikan.

## **6. Teori Institusional (Institutional Theory)**

Teori ini menekankan peran institusi dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan pendidikan.

### **Karakteristik:**

- Kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan aturan yang berlaku di institusi terkait.
- Perubahan kebijakan sering kali membutuhkan perubahan dalam struktur institusi.

### **Aplikasi dalam Pendidikan:**

- Reformasi kelembagaan dalam sistem pendidikan nasional.
- Pembentukan lembaga akreditasi untuk meningkatkan standar pendidikan.

## 7. Teori Advokasi Koalisi (Advocacy Coalition Framework)

Teori ini berfokus pada peran kelompok advokasi dalam memengaruhi proses kebijakan.

### **Karakteristik:**

- Kebijakan dipengaruhi oleh koalisi kelompok dengan nilai dan kepentingan yang sama.
- Perubahan kebijakan terjadi ketika terjadi pergeseran nilai atau dinamika politik.

### **Aplikasi dalam Pendidikan:**

- Peran organisasi guru dalam mendorong reformasi pendidikan.
- Advokasi masyarakat untuk pendidikan inklusif.

## **E. K esimpulan**

Analisis kebijakan pendidikan merupakan proses penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan. Proses ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan politik yang kompleks. Dengan memahami pengertian, metode, tahapan, dan teori-teori kebijakan pendidikan, pembuat kebijakan dapat menghasilkan solusi yang lebih terarah dan berbasis bukti untuk mengatasi tantangan di sektor pendidikan.

Dalam pengertian dasarnya, analisis kebijakan pendidikan adalah alat untuk memahami masalah pendidikan, mengidentifikasi solusi potensial, serta mengevaluasi dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Analisis ini membutuhkan pendekatan interdisipliner yang mencakup dimensi normatif (keadilan, inklusivitas) dan empiris (data dan bukti). Dengan demikian, proses ini membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang.

Metode dan teknik analisis kebijakan pendidikan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menggali data dan mengevaluasi kebijakan. Berbagai metode, seperti kuantitatif, kualitatif, dan campuran, memberikan fleksibilitas bagi analis untuk memahami konteks dan kompleksitas masalah pendidikan. Teknik seperti analisis SWOT, analisis biaya-manfaat, dan analisis risiko memungkinkan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan sebelum diimplementasikan. Pemilihan metode dan teknik ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

Tahapan dalam analisis kebijakan pendidikan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan revisi kebijakan, merupakan siklus berkelanjutan yang memastikan kebijakan tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan. Identifikasi masalah membantu fokus pada isu prioritas, formulasi tujuan memberikan arah yang jelas, sementara evaluasi dampak memastikan kebijakan benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses analisis kebijakan pendidikan tidak berhenti pada implementasi, tetapi terus berkembang melalui evaluasi dan perbaikan.

Teori-teori kebijakan pendidikan, seperti teori rasional, inkremental, sistem, kritis, hingga teori advokasi koalisi, memberikan berbagai perspektif untuk memahami dan menganalisis kebijakan. Setiap teori memiliki kekuatan dan kelemahan, yang dapat digunakan sesuai dengan konteks dan tujuan kebijakan. Dengan memahami teori-teori ini, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada teori yang digunakan tetapi juga pada kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis.

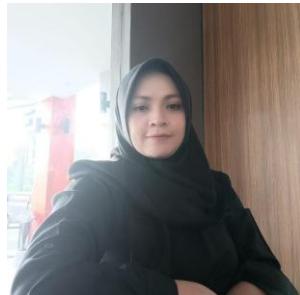
## **F. Daftar Pustaka**

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.

- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. Routledge.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Prentice-Hall.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Lindblom, C. E. (1959). *The Science of Muddling Through*. Public Administration Review.
- OECD (2021). *Education Policy Outlook 2021: Shaping Responsive and Resilient Education in a Changing World*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Routledge.
- Rhodes, R. A. W. (1996). *The New Governance: Governing without Government*. Political Studies.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities*. Sage.
- Simon, H. A. (1997). *Models of Bounded Rationality*. MIT Press.
- UNESCO (2021). *Global Education Monitoring Report 2021*. Paris: UNESCO Publishing.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.

## G.Identitas Penulis



Varia Virdania Virdaus, S.Hum., M.A. Lahir di Blitar, 18 Mei 1985. Menempuh pendidikan Sarjana Sastra Inggris di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan lulus pada tahun 2008. Melanjutkan studi S2 pada jurusan Magister Linguistik di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta serta lulus pada tahun 2011. Saat ini (2024) sedang melanjutkan studi Doktoral Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Penulis adalah seorang akademisi yang berprofesi sebagai Dosen di Universitas Narotama Surabaya dan mendalami berbagai aspek linguistik dan pendidikan. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan studi doktoral di bidang Ilmu Pendidikan dengan fokus pada pendekatan pembelajaran berbasis kasus yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

Selain aktif dalam dunia akademik, penulis juga memiliki ketertarikan mendalam terhadap penulisan ilmiah dan populer. Berbekal sertifikasi sebagai content writer, penulis telah menghasilkan berbagai karya tulis yang informatif dan menarik, baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Dengan perpaduan pengalaman akademik, kemampuan menulis, dan komitmen pada pengembangan pendidikan, penulis terus

berupaya berkontribusi secara positif dalam dunia ilmu pengetahuan dan pembelajaran.

## Bab III

### **Isu & masalah Pendidikan untuk kebijakan Pendidikan**

#### **A. Kesenjangan Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Disparitas geografis, sosial, dan ekonomi menciptakan kesenjangan dalam sistem pendidikan, sementara perubahan global, seperti digitalisasi dan kebutuhan tenaga kerja yang beragam, menuntut kebijakan yang adaptif dan inovatif.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui alokasi anggaran, reformasi kurikulum, dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Namun, berbagai permasalahan mendasar tetap menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Buku ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terkait isu dan masalah pendidikan di Indonesia serta solusi kebijakan yang dapat diterapkan.

**Isu pendidikan** merujuk pada berbagai topik, tantangan, atau topik hangat yang muncul dalam konteks pendidikan dan membutuhkan perhatian lebih. Isu dapat bersifat sementara atau jangka panjang, sering kali muncul dari dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, atau teknologi yang mempengaruhi sistem pendidikan. Isu pendidikan tidak selalu berarti masalah, tetapi lebih kepada hal-hal yang memerlukan pemikiran kritis dan solusi kebijakan.

Menurut **Peters (1966)** mendefinisikan isu sebagai pertanyaan atau subjek yang terbuka untuk perdebatan, diskusi, atau penelitian lebih lanjut. Dalam konteks pendidikan, isu pendidikan mencakup pertanyaan seputar kebijakan, praktik, dan tantangan yang berkembang dalam sistem pendidikan.

Sedangkan menurut **Fullan (2007)** menjelaskan isu dalam pendidikan sering berkaitan dengan reformasi dan inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, di mana isu-isu tersebut memerlukan adaptasi oleh sistem.

**Masalah pendidikan** adalah kendala atau tantangan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan. Masalah ini sering kali berdampak negatif pada proses dan hasil pendidikan, seperti kesenjangan dalam akses, kualitas, atau relevansi pendidikan. Masalah pendidikan membutuhkan solusi yang mendalam, baik dari segi kebijakan maupun praktik.

Menurut **Dewey (1938)** dalam bukunya *"Experience and Education"* menyatakan bahwa masalah dalam pendidikan muncul ketika ada kesenjangan antara tujuan pendidikan dengan realitas praktis di lapangan. Menurut Dewey, masalah pendidikan harus diatasi dengan pendekatan pragmatis yang berfokus pada pengalaman belajar siswa.

Lebih lanjut, **Freire (1970)** melalui pendekatan pendidikan kritisnya menunjukkan bahwa masalah pendidikan juga dapat bersifat struktural, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi menciptakan hambatan bagi

kelompok-kelompok marginal untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Perbedaan Utama Isu dan Masalah adalah: Isu pendidikan sering kali bersifat lebih luas dan umum, mencakup berbagai aspek yang mungkin belum menjadi masalah tetapi memerlukan perhatian. Masalah pendidikan adalah kendala atau hambatan yang sudah nyata dan membutuhkan

## Visi Indonesia Emas 1945: Pendidikan Berkualitas yang Merata



## Presentasi Bappenas: Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045

### B. Isu & Masalah Pendidikan untuk Kebijakan Pendidikan

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Beberapa isu utama meliputi rendahnya kualitas pendidikan, ketimpangan akses, kurangnya pendanaan yang efektif, dan keterbatasan implementasi kurikulum. Masalah ini

diperparah oleh disparitas geografis, kondisi sosial ekonomi, serta minimnya pelibatan masyarakat dan sektor swasta.

### **1. Kesenjangan Geografis**

Di daerah terpencil, seperti wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), akses terhadap sekolah berkualitas sangat terbatas. Banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor jarak, kurangnya tenaga pendidik, dan minimnya infrastruktur. Bahkan angka putus sekolah tergolong sangat tinggi.

### **2. Kesenjangan Sosial Ekonomi**

Anak-anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan. Ketidakmampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah, seperti seragam, buku, dan transportasi, menjadi penghalang utama.

### **3. Kesenjangan Gender dan Inklusi**

Walaupun telah ada peningkatan dalam kesetaraan gender di pendidikan, beberapa wilayah masih menunjukkan preferensi budaya yang membatasi akses pendidikan bagi anak perempuan. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan layanan pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan oleh kebijakan Pendidikan yang tidak inklusif.

## **C. Kesenjangan Pendidikan di Indonesia**

### **1. Aksesibilitas dan Kesetaraan**

Tantangan dalam aksesibilitas mencakup kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di banyak daerah pedesaan dan terpencil. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa hanya 60% desa di wilayah timur Indonesia yang memiliki akses ke sekolah menengah pertama dalam jarak 5 km.

### **2. Mutu dan Relevansi**

Mutu pendidikan sering kali tidak merata di seluruh Indonesia. Banyak sekolah menghadapi kekurangan guru berkualitas, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, survei mutu pendidikan tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 30% guru di daerah pedalaman yang mendapatkan pelatihan berkala.

### **3. Digitalisasi Pendidikan**

Digitalisasi pendidikan memberikan peluang besar untuk memperluas akses pembelajaran, tetapi juga memperbesar kesenjangan digital. Di daerah perkotaan, 80% sekolah memiliki akses internet, sedangkan di pedesaan angkanya hanya mencapai 25% (Kemdikbud, 2023).

## **D. Kebijakan Kurikulum dan Pembiayaan Pendidikan**

### **Kurikulum**

Kurikulum Merdeka yang tekla menjadi Kurikulum Nasional yang diluncurkan pada tahun 2021 bertujuan memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Namun, tantangan implementasi seperti kurangnya pelatihan bagi guru dan keterbatasan bahan ajar masih menjadi hambatan.

### **Pembiayaan**

Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN, distribusinya sering kali tidak merata. Di wilayah perkotaan, alokasi anggaran sering kali mencukupi, tetapi di wilayah 3T, dana yang diterima sekolah sering kali tidak mencukupi kebutuhan operasional dasar. Dana Operasional Sekolah (BOSP) seringkali menjadi kendala karena tidak digunakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan di sekolah. Untuk itu, sejak 2023, Rapor Pendidikan telah menjadi rujukan bagi sekolah untuk melakukan refleksi, dan pemberahan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah masing-masing.

Tabel: Contoh Alokasi Anggaran Pendidikan per Provinsi (2023)

<b>Provinsi</b>	<b>Alokasi (miliar)</b>	<b>Persentase Penggunaan</b>
Jawa Barat	12.500	85%
Nusa Tenggara Timur	4.200	60%
Papua	3.800	55%

## **E. Dampak Isu Pendidikan terhadap Kebijakan**

Berbagai isu pendidikan berdampak langsung pada penyusunan kebijakan. Ketimpangan akses menyebabkan kebutuhan akan kebijakan afirmatif, seperti program beasiswa untuk siswa miskin dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Sementara itu, rendahnya mutu pendidikan memacu pemerintah untuk fokus pada pengembangan kompetensi guru dan penyesuaian kurikulum.

## **Pendekatan dan Solusi untuk Kebijakan Pendidikan**

### **1. Peningkatan Aksesibilitas**

- Membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.
- Memberikan bantuan teknologi dan akses internet gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

### **2. Penguatan Mutu Pendidikan**

- Pelatihan intensif bagi guru dan tenaga kependidikan.
- Penyusunan materi pembelajaran berbasis lokal yang relevan.

### **3. Digitalisasi yang Inklusif**

- Mengembangkan platform pembelajaran daring yang dapat diakses tanpa internet.
- Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta untuk penyediaan perangkat teknologi.

### **4. Efisiensi Pembiayaan**

- Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
- Mengalokasikan dana lebih besar untuk wilayah prioritas.

## **E. Kesimpulan**

Isu dan masalah pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan mengatasi kesenjangan, meningkatkan mutu, dan mendorong digitalisasi, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Kebijakan pendidikan harus selalu berbasis data, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Secara umum dapat disimpulkan dalam poin-poin di bawah ini:

1. Pendidikan di Indonesia masih memiliki Isu dan permasalahan yang kompleks. Untuk menjawabnya, membutuhkan keberpihakan kebijakan yang berkelanjutan.
2. Visi Pendidikan Indonesia 2020-2024 dan sebelumnya, telah meyelesaikan permasalahan di eranya, dan harus bisa menjadi *bridging* transformasi menuju Visi Indonesia Emas 2024
3. Setiap tantangan butuh Inovasi. Pendidikan yang melingkup seluruh siklus hidup manusia, harus memberi penyadaran tentang

kerangka pikir manusia pada literasi manusia dan kecakapan hidup.

4. Pendidikan tidak membatasi diri pada pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai karakter dan sikap. Maka tugas Pendidik, harus menjadi teladan yang terbaik; *“Inng Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangungkarso, Tut Wuri Handayani.”*
5. Cita-cita Indonesia Emas hanya akan menjadi slogan, jika tidak ada keseriusan kerja kolaborasi, dan hanya akan melahirkan kebijakan setengah hati.

## **F. Daftar Pustaka**

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
2. Laporan Pendidikan Global UNESCO (2023).
3. Data Statistik Pendidikan Indonesia, BPS (2024).
4. Artikel tentang Digitalisasi Pendidikan di Indonesia, Jurnal Pendidikan Asia Tenggara (2024).
5. OECD. (2022). Education at a Glance: OECD Indicators.
6. World Bank. (2023). World Development Report: Education.
7. UNESCO Institute for Statistics. (2023). Global Education Monitoring Report.
8. Kemdikbudristek. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
9. ASEAN Secretariat. (2022). Regional Report on Education Access and Equity.
10. UNICEF. (2023). Inclusive Education: Global Perspectives and Regional Realities.
11. Human Development Report. (2023). United Nations Development Programme.
12. Presentasi Bappenas: Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045

## **G. Biodata Penulis:**



**Yahya Ado**, Lahir di Boleng, Adonara, Flores NTT pada 18 Mei 1978. Putra kedua dari lima bersaudara ini menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia Makassar pada tahun 2003. Pada 2016, ia melanjutkan studi S2 di Universitas Nusa Cendana Kupang dengan mengambil jurusan Ilmu Linguistik dan tamat tahun 2018. Saat ini, suami dari Suryati Malik dan ayah dari dua putera Arham dan Ghaizan ini sedang menyelesaikan pendikan S3 di Program Studi Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya sejak 2024.

Yahya bekerja sebagai aktivis kemanusiaan sejak tahun 2004 sampai sekarang. Ia pernah bekerja di Plan International Indonesia selama sebelas tahun (2004-2016), Konsultan Pendidikan di UNICEF Indonesia untuk NTT dan NTB sejak 2017-2019, dan saat ini menjadi Konsultan

Pendidikan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Maret 2024.

Ia menulis berbagai artikel, opini, dan berberapa buku motivasi ber-isbn. Ia juga adalah *Founder* sekaligus Direktur Yayasan Rumah Solusi Beta Indonesia (RSBI) dan Sekolah Alam Manusak di Kabupaten Kupang, yang menjadi sekolah alam pertama di NTT sejak 2019. Iya juga adalah *trainer*, fasilitator, pembicara, dan dosen tamu di berbagai kesempatan.

Motonya sederhana, **sekali berarti, lalu mati.**

## **Bab IV**

### **Merumuskan Masalah dan Menentukan Kebijakan Kependidikan**

#### **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan kemajuan bangsa. Sebagai salah satu faktor strategis, pendidikan memainkan peran sentral dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan kompetitif di tengah tantangan global yang terus berkembang. Melalui pendidikan yang efektif, bangsa dapat mengembangkan potensi individu secara optimal dan menciptakan generasi yang mampu berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bukanlah tugas yang mudah. Berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, disparitas kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, menjadi isu-isu utama yang memerlukan perhatian serius.

Merumuskan masalah dan menentukan kebijakan pendidikan adalah sebuah proses yang kompleks dan multidimensional. Sistem pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan sebelumnya, dinamika perubahan global, serta perkembangan teknologi. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus mampu menjadi solusi yang konkret terhadap permasalahan yang ada, sekaligus mendorong inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, proses ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan analisis mendalam berbasis data, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, tenaga pendidik, dunia usaha, dan masyarakat umum.

Dalam konteks era modern, tantangan dalam perumusan kebijakan pendidikan semakin kompleks. Perubahan demografi, seperti meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dan pekerja muda, menuntut adanya sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif. Globalisasi dan perkembangan teknologi digital juga menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang memerlukan inovasi kebijakan agar pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, meningkatnya ekspektasi terhadap mutu pendidikan, baik dari segi akademik maupun keterampilan praktis, menjadikan kebijakan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk menciptakan generasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Oleh karena itu, proses perumusan kebijakan pendidikan harus dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan berbasis bukti. Dimulai dengan identifikasi masalah yang mendalam dan komprehensif, hingga formulasi kebijakan yang mempertimbangkan berbagai tantangan dan potensi yang ada. Kebijakan yang dirancang tidak hanya harus efektif dalam implementasinya, tetapi juga terukur dalam dampaknya melalui evaluasi yang berkelanjutan.

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya merumuskan masalah dan menentukan kebijakan pendidikan secara strategis, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di era modern. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan pendidikan dapat menjadi pondasi kokoh bagi terciptanya sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung pengembangan potensi individu, mendorong pemerataan kesempatan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa secara menyeluruh.

## **B. Perumusan Masalah dalam Pendidikan**

Perumusan masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk di bidang pendidikan. Langkah ini menjadi pondasi dalam menentukan prioritas masalah dan solusi

yang akan diambil, sehingga kebijakan yang dihasilkan relevan dan efektif (Anderson, 2015). Dalam konteks pendidikan, masalah-masalah yang muncul biasanya bersifat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek akses, kualitas, kesenjangan pendidikan, hingga tantangan dalam menghadapi perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan masalah dalam pendidikan tidak hanya harus didasarkan pada data, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Masalah dalam pendidikan seringkali terkait dengan rendahnya mutu pengajaran, ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, minimnya infrastruktur sekolah, serta keterbatasan sumber daya manusia seperti guru dan tenaga pengajar yang berkualitas (UNESCO, 2020). Sebagai contoh, salah satu masalah signifikan di Indonesia adalah tidak meratanya akses pendidikan di daerah-daerah terpencil. Banyak daerah di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik dari segi infrastruktur, fasilitas, maupun kualitas pengajar. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa partisipasi sekolah di wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah perkotaan, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas.

Ketimpangan ini semakin diperparah dengan rendahnya kualitas pendidikan secara umum. Hasil survei PISA (*Programme for International Student Assessment*) tahun 2019 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional. Berdasarkan laporan OECD (2019), skor rata-rata siswa Indonesia dalam bidang membaca, matematika, dan sains berada di peringkat ke-74 dari 79 negara yang disurvei. Rendahnya kualitas pendidikan ini tidak hanya mempengaruhi prestasi siswa di tingkat nasional tetapi juga berdampak pada daya saing Indonesia di kancah global.

Dalam proses perumusan masalah, penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pendidikan saat ini tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan generasi muda, tetapi juga mempersiapkan mereka agar mampu bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital (Trilling & Fadel, 2009). Oleh karena itu, perumusan masalah pendidikan harus mencakup analisis kebutuhan masa depan, termasuk tuntutan pasar kerja dan perubahan teknologi, agar kebijakan yang dihasilkan dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dalam pendidikan para ahli sepakat bahwa perumusan masalah merupakan tahap krusial dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk di bidang pendidikan. langkah ini menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan solusi kebijakan yang relevan dan efektif. Rendahnya mutu pengajaran, ketimpangan akses antara perkotaan dan pedesaan, serta minimnya infrastruktur dan tenaga pengajar berkualitas. Di Indonesia, ketidakmerataan akses pendidikan di daerah terpencil menjadi tantangan signifikan, yang diperparah oleh rendahnya kualitas pendidikan secara umum. oleh sebab itu pendidikan harus mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Dengan demikian, perumusan masalah pendidikan perlu berorientasi masa depan, mempertimbangkan tuntutan pasar kerja, serta perubahan teknologi untuk menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong pengembangan sumber daya manusia unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman.

## **C. Identifikasi Masalah Pendidikan di Indonesia**

Identifikasi masalah pendidikan di Indonesia menjadi penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

### 1. Ketimpangan Akses Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan menjadi salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh Indonesia. Banyak anak-anak di wilayah terpencil masih kesulitan mengakses pendidikan dasar hingga menengah. Tingkat partisipasi sekolah di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam angka partisipasi sekolah, di mana daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas yang layak, dan transportasi. Infrastruktur yang tidak memadai memperburuk ketimpangan ini, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang holistik.

### 2. Kualitas Pendidikan yang Rendah

Survei internasional, seperti *Programme for International Student Assessment* (PISA), menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia berada di bawah rata-rata internasional (OECD, 2019). Rendahnya kualitas pendidikan ini mencerminkan masalah pada kurikulum, metode pembelajaran, dan kurangnya pelatihan optimal untuk guru. Sebagian besar tenaga pengajar belum sepenuhnya terlatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif pada siswa, yang menjadi keterampilan esensial di abad ke-21 (Trilling & Fadel, 2009).

### 3. Ketimpangan Kualitas Antardaerah

Ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal masih menjadi isu serius. Sekolah di daerah perkotaan atau provinsi-provinsi maju seperti Jawa memiliki fasilitas yang memadai, akses ke teknologi pendidikan, dan guru berkualitas tinggi. Sebaliknya,

sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas, laboratorium, atau buku pelajaran. Data BPS (2020) mengungkapkan bahwa ketimpangan ini berdampak pada rendahnya capaian pendidikan di daerah-daerah tertinggal, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

#### 4. Rendahnya Anggaran Pendidikan dan Efisiensi Pengelolaannya

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, efisiensi dalam penggunaannya masih dipertanyakan. Sebagian besar dana pendidikan terserap oleh birokrasi, sementara kebutuhan mendesak seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kompetensi guru belum sepenuhnya terpenuhi (Kemendikbud, 2021). Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih tepat sasaran.

#### 5. Relevansi Pendidikan dengan Dunia Kerja

Masalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja menjadi tantangan signifikan. Kurikulum yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi sering kali tidak sejalan dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja modern. Menurut World Bank (2020), banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan praktis dan literasi digital, yang semakin penting di era revolusi industri 4.0.

#### 6. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memperparah berbagai masalah pendidikan di Indonesia. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menimbulkan tantangan besar, terutama bagi siswa di daerah yang memiliki akses terbatas ke internet dan perangkat teknologi. Studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) menemukan bahwa siswa dari

keluarga berpenghasilan rendah mengalami learning loss yang signifikan selama pandemi, yang memperburuk ketimpangan pendidikan.

## 7. Masalah Sosial dan Ekonomi

Kemiskinan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam akses pendidikan. Banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama setelah jenjang dasar, meskipun pendidikan dasar sudah dijamin oleh pemerintah. Selain itu, banyak anak putus sekolah untuk membantu orang tua bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (UNICEF, 2021). Masalah ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat untuk memastikan akses pendidikan yang merata.

Identifikasi masalah ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan utama pendidikan di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam, kebijakan yang dirancang dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat simpulkan bahwa identifikasi masalah pendidikan di Indonesia adalah Masalah-masalah ini harus diatasi melalui kebijakan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis data untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan kebijakan yang holistik diperlukan untuk mengatasi ketimpangan akses, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki infrastruktur, serta menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan dunia kerja modern. Kebijakan pendidikan yang dirancang harus mencakup strategi jangka pendek dan jangka panjang, dengan fokus pada pemerataan pendidikan di semua wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai tantangan pendidikan ini. Pemerintah perlu memperkuat kemitraan dengan sektor swasta, misalnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pembangunan sekolah, penyediaan teknologi pendidikan, atau pelatihan guru. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan melalui partisipasi aktif, seperti keterlibatan dalam komite sekolah atau gerakan literasi. Selain itu, kerja sama dengan organisasi internasional juga dapat membantu menghadirkan solusi inovatif, seperti pendanaan, pelatihan, atau teknologi untuk mendukung pendidikan di daerah terpencil.

Upaya ini harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Dengan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas tinggi, sehingga mampu mencetak generasi muda yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

#### **D. Langkah-Langkah Perumusan Kebijakan Pendidikan**

Untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tujuan pendidikan, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam perumusan kebijakan pendidikan, yang dilengkapi dengan referensi akademis dan praktik kebijakan terkini:

##### **1. Identifikasi Masalah**

Langkah pertama dalam perumusan kebijakan adalah mengidentifikasi permasalahan utama dalam sistem pendidikan. Permasalahan ini dapat mencakup rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya infrastruktur,

ketimpangan akses, atau kurangnya tenaga pengajar. Identifikasi dilakukan melalui survei, penelitian lapangan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Misalnya, masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia telah diidentifikasi oleh berbagai penelitian sebagai salah satu tantangan utama (UNESCO, 2020).

## 2. Pengumpulan Data dan Informasi

Data yang relevan perlu dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang masalah yang dihadapi. Pengumpulan data melibatkan statistik nasional, laporan penelitian, dan studi komparatif internasional. Misalnya, data dari Programme for International Student Assessment (PISA) oleh OECD memberikan informasi penting tentang kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia dibandingkan negara lain (OECD, 2019).

## 3. Analisis Masalah

Data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu metode yang sering digunakan adalah analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada (Anderson, 2015). Analisis ini memberikan landasan untuk merancang solusi yang efektif dan berbasis bukti.

## 4. Perumusan Alternatif Solusi

Berdasarkan analisis masalah, berbagai alternatif solusi dirumuskan. Solusi ini dievaluasi berdasarkan efektivitas, efisiensi, biaya, dan dampak jangka panjang. Alternatif yang terpilih harus menjawab masalah inti dan memiliki potensi penerimaan oleh masyarakat (Trilling & Fadel, 2009).

## 5. Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan

Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan lembaga swadaya

masyarakat, sangat penting untuk memastikan kebijakan relevan dan dapat diterima. Proses ini juga membantu memverifikasi data dan menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan nyata (BPS, 2022).

## 6. Perumusan Kebijakan

Kebijakan dirumuskan dalam bentuk dokumen resmi yang mencakup tujuan, sasaran, strategi pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Dokumen ini harus dirancang dengan jelas agar mudah dipahami dan diimplementasikan (UNESCO, 2020).

## 7. Penetapan Kebijakan

Kebijakan yang dirumuskan kemudian diajukan kepada pihak berwenang untuk disahkan. Proses ini sering melibatkan negosiasi atau revisi untuk memastikan kebijakan sesuai dengan prioritas nasional atau daerah (Anderson, 2015).

## 8. Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Panduan pelaksanaan yang jelas harus tersedia untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan (OECD, 2019).

## 9. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah tahap penting untuk menilai keberhasilan kebijakan. Proses ini melibatkan pengukuran dampak kebijakan terhadap indikator kinerja, identifikasi masalah implementasi, dan analisis capaian tujuan (Trilling & Fadel, 2009).

## 10. Revisi Kebijakan (Jika Diperlukan)

Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan dapat direvisi untuk memastikan relevansinya dengan konteks yang berubah, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun teknologi. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang

belum optimal dan menyempurnakan implementasinya (UNESCO, 2020).

Dengan pendekatan yang sistematis seperti ini, kebijakan pendidikan yang dirancang dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan zaman.

## **E. Penentuan Kebijakan Pendidikan yang Efektif**

Penentuan kebijakan pendidikan yang efektif merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus beradaptasi dengan tantangan zaman. Kebijakan pendidikan yang baik harus didasarkan pada landasan yang kuat, termasuk hasil penelitian, kebutuhan lokal, serta visi jangka panjang pembangunan manusia. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam penentuan kebijakan pendidikan yang efektif:

### **1. Berbasis pada Data dan Bukti**

Kebijakan yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat dan penelitian yang kuat. Menggunakan data empiris dan bukti-bukti ilmiah memastikan bahwa keputusan yang diambil relevan dengan kondisi lapangan. Contoh data yang digunakan termasuk data hasil belajar siswa, aksesibilitas pendidikan, statistik pengajar, serta hasil evaluasi program pendidikan sebelumnya.

### **2. Fokus pada Tujuan Jangka Panjang**

Kebijakan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat sumber daya manusia, dan menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan berdaya saing. Penentuan kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada solusi sementara, tetapi juga harus mencakup visi jangka panjang yang berkelanjutan.

### 3. Melibatkan Pemangku Kepentingan

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat luas sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Konsultasi publik, dialog dengan guru, dan survei kepada siswa dapat membantu mengidentifikasi masalah nyata di lapangan dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak.

### 4. Penyesuaian dengan Konteks Lokal

Kebijakan pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan keragaman sosial, budaya, dan geografis dari masyarakat. Pendidikan di daerah perkotaan mungkin memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil. Fleksibilitas kebijakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

### 5. Dukungan Sumber Daya yang Memadai

Kebijakan yang baik harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, tenaga pengajar, maupun infrastruktur. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang dirumuskan hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang efektif. Oleh karena itu, penentuan kebijakan harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan upaya pengalokasiannya secara optimal.

### 6. Responsif terhadap Perubahan Zaman

Pendidikan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pendidikan harus responsif terhadap perubahan ini, seperti perubahan kebutuhan tenaga kerja, kemajuan teknologi dalam pengajaran, dan perubahan pola pikir generasi muda. Kebijakan yang fleksibel dan adaptif akan lebih efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan.

## 7. Pengaturan dan Standarisasi yang Jelas

Penentuan kebijakan pendidikan yang efektif memerlukan pengaturan yang jelas, termasuk standarisasi dalam hal kurikulum, kualifikasi guru, dan fasilitas pendidikan. Standar ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan yang merata di seluruh daerah dan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

## 8. Evaluasi dan Pemantauan BerkelaJutan

Kebijakan yang efektif harus disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Evaluasi memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya, apakah ada masalah dalam pelaksanaannya, dan apakah perlu dilakukan penyesuaian. Pemantauan terus-menerus juga dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan inovasi dalam kebijakan pendidikan.

## 9. Mengutamakan Inovasi dan Pembaruan

Pendidikan yang efektif memerlukan inovasi terus-menerus dalam metode pengajaran, kurikulum, serta penggunaan teknologi. Kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi pendidikan, seperti penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran atau pendekatan pedagogi baru, akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

## 10. Mendorong Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan kebijakan pendidikan yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan akan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, komunitas lokal juga dapat berperan dalam memantau

pelaksanaan kebijakan serta memberikan umpan balik yang konstruktif.

#### 11. Kebijakan yang Inklusif dan Berkeadilan

Kebijakan pendidikan yang efektif harus memastikan inklusivitas dan keadilan. Semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau fisik, harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Ini termasuk penyediaan fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antara daerah terpencil dan perkotaan.

Menentukan kebijakan pendidikan yang efektif memerlukan proses yang komprehensif, berbasis data, serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kebijakan harus berorientasi pada jangka panjang, fleksibel terhadap perubahan, dan diimbangi dengan sumber daya yang memadai serta evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan yang mampu memenuhi prinsip-prinsip tersebut akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan membangun generasi yang kompeten di masa depan.

### **F. Studi Kasus: Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi**

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai respons terhadap krisis ini. Namun, kebijakan ini menimbulkan masalah baru, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), banyak siswa di daerah terpencil yang kesulitan mengakses pembelajaran daring karena keterbatasan jaringan internet. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kesenjangan digital yang ada di masyarakat (Kemendikbud, 2020).

### **G. Kesimpulan**

Merumuskan masalah dan menentukan kebijakan pendidikan merupakan proses yang kompleks dan harus berbasis pada data serta analisis yang mendalam. Di Indonesia, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan menjadi masalah utama yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang efektif serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan merata. Pandemi COVID-19 menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pendidikan harus cepat beradaptasi terhadap situasi darurat, namun tetap memperhatikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.

## **H. Daftar Pustaka**

- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction*. Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan Indonesia 2022*.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Diunduh [https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU\\_no\\_20\\_th\\_2003.pdf](https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf) pada 22 Juli 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). December 4). Surat Edaran Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Retrieved from dikt. kemendikbud: <https://dikt.kemdikbud.go.id/pengumuman/surat-edaran-penyelenggaraan-pembelajaran-pada-semester-genap-tahun-akademik-2020-2021/>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. Paris: OECD Publishing.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. Jossey-Bass.

UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education*. Paris: UNESCO.

UNICEF, WHO, and World Bank Group. (2020). *Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2021 edition*. WHO, Geneva.

## I. Identitas Penulis



Penulis bernama Kholisussa'di, S.Pd., M.Pd. Lahir di Selong, 5 Agustus 1986. Memulai perjalanan akademiknya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram pada tahun 2004 dengan mengambil program studi Tadris IPS. Namun, pada tahun 2005 penulis memutuskan untuk melanjutkan studi di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram dengan memilih Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana penulis pada tahun 2009 penulis mengisi waktu dengan berwirausaha menjual bakso hingga tahun 2011. Meskipun usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan, dukungan dari kedua orang tua mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tahun 2012, penulis diterima di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk menempuh studi magister (S2). Selama menjalani studi S2, penulis juga bekerja di perusahaan "Harmonic Cloth" di Yogyakarta. Pada tahun 2015, IKIP Mataram yang kini telah berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA) menghubungi penulis untuk bergabung sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Menyadari peluang besar ini penulis memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus menyelesaikan studi S2. Penulis akhirnya diwisuda pada 16 Februari 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah itu, pada tahun 2016, penulis diangkat sebagai dosen tetap yayasan di IKIP Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA). Sebagai seorang akademisi, penulis memiliki

spesialisasi di bidang pendidikan non-formal dan informal / pendidikan masyarakat dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Saat ini, penulis sedang melanjutkan studi doktoral di Program Studi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dengan pengalaman akademik dan profesional yang luas, penulis terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam pengembangan pendidikan masyarakat.

## BAB V

### STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN

#### **I. Pendahuluan.**

##### **Pengertian Studi Kasus dalam Konteks Kebijakan Pendidikan**

Studi kasus merupakan penelitian mendalam terhadap suatu fenomena tertentu, dalam hal ini kebijakan pendidikan, untuk memahami kompleksitas dan dinamika yang terlibat. Studi kasus dalam kebijakan pendidikan bertujuan untuk menggambarkan dan memahami pengaturan atau fenomena tertentu dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan pendidikan dan praktiknya (Bassey, 1999; Cousin, 2005; Soy, 2015). Metode ini sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan inisiatif kebijakan (Soy, 2015).

##### **Mengapa Studi Kasus Penting dalam Kebijakan Pendidikan?**

- **Memahami Konteks:** Studi kasus membantu memahami kebijakan pendidikan dalam konteksnya yang unik. Setiap kebijakan diterapkan dalam lingkungan yang berbeda dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang khas.
- **Mengidentifikasi Faktor-faktor Kunci:** Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini mungkin tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif yang lebih luas.

- **Memberikan Rekomendasi:** Berdasarkan temuan studi kasus, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan relevan untuk perbaikan kebijakan pendidikan di masa depan.

### **Metode Penelitian Studi Kasus**

Studi kasus dalam kebijakan pendidikan umumnya menggunakan metode kualitatif, seperti:

- **Wawancara:** Mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti guru, siswa, kepala sekolah, pembuat kebijakan, dan orang tua.
- **Observasi:** Mengamati langsung proses pembelajaran, interaksi di kelas, dan implementasi kebijakan di lapangan.
- **Dokumen:** Menganalisis dokumen-dokumen terkait kebijakan, seperti kurikulum, rencana pembelajaran, laporan evaluasi, dan transkrip wawancara.

### **Tips untuk Menulis Artikel Studi Kasus tentang Kebijakan Pendidikan**

- **Pilih Topik yang Relevan:** Pilih topik kebijakan pendidikan yang menarik dan relevan dengan konteks pendidikan saat ini.
- **Rumuskan Pertanyaan Penelitian yang Jelas:** Pertanyaan penelitian akan memandu penelitian dan analisis Anda.

- **Kumpulkan Data yang Cukup:** Pastikan Anda mengumpulkan data yang cukup untuk mendukung analisis Anda.
- **Analisis Data dengan Cermat:** Gunakan metode analisis yang tepat untuk menganalisis data Anda.
- **Tulis Laporan yang Jelas dan Terstruktur:** Laporan Anda harus mudah dibaca dan dipahami.

## II. Pendekatan dan Metodologi

- A. Pendekatan Vertikal dan Horizontal: Studi kasus dapat melibatkan analisis pada berbagai tingkat, dari lokal hingga nasional, serta perbandingan bagaimana kebijakan diterapkan di lokasi yang berbeda (Bartlett & Vavrus, 2014; Pathmarajah, 2019).
- B. Pendekatan Holistik: Studi kasus memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi perilaku melalui perspektif aktor yang terlibat, melampaui hasil statistik kuantitatif (Soy, 2015).
- C. Metodologi Komparatif: Metode ini menggabungkan analisis sosio-kultural dan politik sebagai bagian eksplisit dari proses penelitian, yang sangat berguna dalam studi kebijakan (Pathmarajah, 2019).

## III. Isi.

**Efektivitas Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran**  
 Teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Studi kasus dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam berbagai aspek pembelajaran, seperti:

- **Peningkatan Hasil Belajar:** Teknologi dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa melalui berbagai cara, seperti menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas, memfasilitasi pembelajaran interaktif, dan memberikan umpan balik yang lebih cepat.
- **Pengembangan Keterampilan Abad ke-21:** Teknologi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang penting, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi, dan keterampilan digital.
- **Peningkatan Motivasi dan Keterlibatan Siswa:** Teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar.<sup>1</sup>

## **Dampak Teknologi terhadap Interaksi Guru-Siswa**

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat memengaruhi interaksi antara guru dan siswa. Studi kasus dapat meneliti bagaimana teknologi mengubah peran guru, bagaimana teknologi memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa, dan bagaimana teknologi dapat mengatasi tantangan dalam interaksi guru-siswa.

## **Kesenjangan Digital**

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Studi kasus dapat meneliti

bagaimana kesenjangan digital mempengaruhi akses siswa terhadap pendidikan berkualitas, bagaimana teknologi dapat memperburuk atau mengurangi kesenjangan digital, dan bagaimana kebijakan pendidikan dapat mengatasi kesenjangan digital.

### **Contoh Studi Kasus**

Berikut adalah beberapa contoh studi kasus yang dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dampaknya terhadap interaksi guru-siswa, dan kesenjangan digital:

- **Implementasi Pembelajaran Blended:** Studi kasus dapat meneliti bagaimana sekolah mengimplementasikan pembelajaran blended, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Studi kasus ini dapat mengevaluasi efektivitas pembelajaran blended dalam meningkatkan hasil belajar siswa, interaksi guru-siswa, dan mengatasi kesenjangan digital.
- **Penggunaan Aplikasi Pembelajaran:** Studi kasus dapat meneliti bagaimana siswa menggunakan aplikasi pembelajaran tertentu dalam proses belajar mereka. Studi kasus ini dapat mengevaluasi efektivitas aplikasi pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelajaran, motivasi belajar siswa, dan interaksi siswa dengan guru dan teman sebaya.
- **Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Inklusif:** Studi kasus dapat meneliti bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus dalam

pendidikan inklusif. Studi kasus ini dapat mengevaluasi efektivitas teknologi dalam membantu siswa dengan kebutuhan khusus belajar dan berpartisipasi di kelas, serta dampaknya terhadap interaksi siswa dengan guru dan teman sebaya.

#### **IV. Keunggulan dan Tantangan**

A. Keunggulan: Studi kasus dapat memberikan wawasan unik dan pemahaman yang lebih dalam tentang konteks tertentu, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui metode kuantitatif (Simons, 1996; Yazan, 2015).

B. Tantangan: Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menggeneralisasi temuan dari satu kasus ke kasus lain, meskipun ini dapat diatasi dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual (Simons, 1996; Elliott & Lukes, 2008).

#### **V. Contoh Studi Kasus dalam Pendidikan**

##### **1. Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Pendidikan di Aceh**

Studi kasus di Aceh, Indonesia, menunjukkan bagaimana kebijakan politik dapat mempengaruhi standar pendidikan. Setelah tahun 2005, otonomi politik yang meningkat di Aceh memungkinkan kebijakan pendidikan yang lebih disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan regional. Hal ini meningkatkan partisipasi siswa dan pembelajaran dengan memasukkan studi bahasa dan budaya lokal. Stabilitas politik juga memfasilitasi pendanaan sekolah dan distribusi

sumber daya, meningkatkan infrastruktur dan pelatihan guru. Namun, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan standar pendidikan nasional dengan kebutuhan lokal dan memastikan akses yang adil ke pendidikan berkualitas di berbagai distrik di Aceh (Jumaidi et al., 2024).

## **2. Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Konteks Globalisasi**

Penelitian di Denmark, Nepal, dan China mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan diimplementasikan dalam konteks globalisasi. Studi ini memperkenalkan konsep "policyscape" yang menggambarkan bagaimana fenomena pendidikan di satu negara harus dipahami dalam hubungan yang berkelanjutan dengan kasus-kasus lain. Hal ini menyoroti tantangan dalam memahami peran negara dalam reformasi pendidikan dan bagaimana dinamika internasional mempengaruhi kebijakan lokal (Carney, 2008).

## **3. Studi Kasus Kualitatif dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan**

Penggunaan desain studi kasus kualitatif dalam penelitian kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan di Ghana, menekankan pentingnya generalisasi temuan penelitian. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun studi kasus bersifat individual, generalisasi dapat dilakukan jika didukung oleh landasan teori yang kuat. Metodologi ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang

pengalaman hidup siswa, guru, dan manajer sekolah dalam konteks kebijakan pendidikan (Ibrahim & Victoria, 2022).

#### 4. Pendekatan Studi Kasus Vertikal

Pendekatan studi kasus vertikal menggabungkan analisis pada tingkat mikro, meso, dan makro untuk melacak produksi dan sirkulasi kebijakan pendidikan secara global. Studi ini menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan diadopsi dan diadaptasi di berbagai lokasi dan waktu, seperti yang ditunjukkan dalam studi etnografi tentang pedagogi berpusat pada pelajar di Tanzania (Bartlett & Vavrus, 2014).

#### 5. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Serbia

Studi tentang implementasi kebijakan pendidikan di Serbia menunjukkan bahwa meskipun tidak semua faktor implementasi kuat, kemajuan tetap dapat dicapai. Faktor-faktor seperti konteks, komitmen, dan keterlibatan aktor mendorong kemajuan implementasi, meskipun ada hambatan dalam dimensi konten dan kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi implementasi yang sempurna tidak selalu diperlukan untuk mencapai kemajuan (Caves & Oswald-Egg, 2023).

## **VI. Penutup.**

Studi kasus dapat memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dampaknya terhadap interaksi guru-siswa, dan kesenjangan digital. Studi kasus dapat membantu para pembuat kebijakan,

guru, dan pihak terkait lainnya untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi tantangan-tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

- Jumaidi, A., Mustanir, M., Yusuf, T., & Sanusi, S. (2024). Political Study Analyses of Education Policy to Improve Education Quality. Emerging Science Journal. <https://doi.org/10.28991/esj-2024-08-04-011>
- Carney, S. (2008). Negotiating Policy in an Age of Globalization: Exploring Educational “Policyscapes” in Denmark, Nepal, and China. Comparative Education Review, 53, 63 - 88. <https://doi.org/10.1086/593152>
- Ibrahim, M., & Victoria, D. (2022). Reflections on the use of qualitative case study design in education policy research: contributing to the debate of Generalisation in research. International Journal of Social Sciences and Humanities Invention. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v9i09.09>
- Bartlett, L., & Vavrus, F. (2014). Transversing the Vertical Case Study: A Methodological Approach to Studies of Educational Policy as Practice. Anthropology & Education Quarterly, 45, 131-147. <https://doi.org/10.1111/AEQ.12055>
- Caves, K., & Oswald-Egg, M. (2023). An Empirical Case of Education Policy Implementation in Serbian VET. International Journal for Research in Vocational Education and Training. <https://doi.org/10.13152/ijrvet.10.2.3>
- Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. \*\*.
- Bartlett, L., & Vavrus, F. (2014). Transversing the Vertical Case Study: A Methodological Approach to Studies of Educational Policy as Practice. Anthropology & Education Quarterly, 45, 131-147. <https://doi.org/10.1111/AEQ.12055>

- Simons, H. (1996). The Paradox of Case Study. Cambridge Journal of Education, 26, 225-240. <https://doi.org/10.1080/0305764960260206>
- Cousin, G. (2005). Case Study Research. Journal of Geography in Higher Education, 29, 421 - 427. <https://doi.org/10.1080/03098260500290967>
- Elliott, J., & Lukes, D. (2008). Epistemology As Ethics In Research And Policy: The Use of Case Studies. Journal of Philosophy of Education, 42, 87-119. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9752.2008.00629.X>
- Pathmarajah, M. (2019). Comparative Case Study Methodology and Teacher Education. Oxford Research Encyclopedia of Education. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.464>
- Yazan, B. (2015). Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, Merriam, and Stake. The Qualitative Report, 20, 134-152.
- Soy, S. (2015). The Case Study as a Research Method. \*\*.
- Cantimer, G., & Şengül, S. (2022). INVESTIGATION OF STUDIES ON CASE STUDY METHOD IN EDUCATION. IEDSR Association. <https://doi.org/10.46872/pj.463>

## Identitas Penulis



Aries Edy Nugroho, pria kelahiran Pacitan pada 26 September 1973, adalah seorang profesional di bidang pendidikan dengan pengalaman lebih dari dua dekade. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sidoarjo, posisi yang diembannya sejak tahun 2021. Lulusan program S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang (1996) dan S2 Ilmu Manajemen Universitas Yapan Surabaya (2021), Aries kini sedang menyelesaikan studi doktoralnya di bidang Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Dengan kompetensi dalam bahasa Indonesia dan Inggris serta keahlian teknologi seperti Microsoft Office dan Canva, Aries juga dikenal sebagai sosok yang multitalenta, menguasai keterampilan mengemudi, bermain musik, dan berenang. Putra pasangan Achmad Santoso dan Syariyatun ini berdomisili di Sidoarjo bersama keluarganya, terus berdedikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sektor anak usia dini dan pendidikan nonformal.

## Bab VI

### Proses dan Teknik Evaluasi Kebijakan Pendidikan

#### **A. Pentingnya Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

Evaluasi kebijakan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan. Kebijakan pendidikan sering kali mencakup banyak hal, seperti kualitas, pemerataan, akses, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, kebijakan mungkin tidak mencapai hasil yang diinginkan atau bahkan dapat memperburuk ketimpangan saat ini.

Anderson (2015) menyatakan bahwa melakukan evaluasi kebijakan pendidikan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah saat ini. Pihak terkait dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dengan melakukan evaluasi kebijakan secara teratur. Hal ini sangat penting mengingat sumber daya pendidikan seringkali terbatas.

Evaluasi kebijakan juga membantu menjamin akuntabilitas. Hasil evaluasi dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menunjukkan bahwa kebijakan mereka telah membantu masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan pemerintah secara keseluruhan, akuntabilitas sangat penting (Hatr 2019).

Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yang merupakan bukti pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Evaluasi kebijakan membantu memastikan bahwa semua aspek pendidikan, mulai dari manajemen sekolah hingga kurikulum, berjalan sesuai dengan rencana. Mulyasa (2017) menyatakan bahwa evaluasi yang efektif juga dapat mendorong pembaruan dan inovasi kebijakan yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Keadilan sosial juga dicapai melalui evaluasi kebijakan pendidikan. Evaluasi membantu membuat kebijakan menemukan kelompok yang kurang terlayani oleh sistem pendidikan dan membuat solusi yang tepat. Misalnya, evaluasi program bantuan pendidikan dapat menunjukkan apakah program itu mencapai kelompok sasarannya atau tidak.

Dalam era digital dan globalisasi, evaluasi kebijakan pendidikan juga semakin penting. Pendidikan harus mampu bersaing di tingkat internasional dan memenuhi kebutuhan lokal. Untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat menangani tantangan global saat ini, evaluasi kebijakan yang berbasis data dan bukti (policy-based evidence) sangat penting. Menurut OECD (2021), evaluasi kebijakan memungkinkan negara untuk mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain dan mengadopsi praktik pendidikan terbaik.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pendidikan bukan hanya alat untuk mengukur keberhasilan tetapi juga dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Kebijakan pendidikan yang lebih efisien, efisien, dan inklusif dapat dicapai melalui evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh dan menyeluruh.

## **B. Pengertian dan Tujuan Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengukur sejauh mana kebijakan pendidikan yang diterapkan telah mencapai tujuan yang diinginkan, serta memberikan gambaran mengenai efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Rossi et al. (2018), evaluasi kebijakan tidak hanya sekadar mengukur hasil, tetapi juga menilai proses implementasi serta relevansi kebijakan terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya.

Dalam konteks pendidikan, evaluasi kebijakan mencakup berbagai aspek seperti aksesibilitas, kualitas pembelajaran, keberlanjutan program, serta dampaknya terhadap pemerataan kesempatan belajar. Seperti yang dijelaskan oleh Fitzpatrick, Sanders, dan

Worthen (2017), evaluasi kebijakan harus mampu memberikan informasi yang valid, reliabel, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Tujuan utama evaluasi kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut: Proses sistematis untuk mengukur seberapa baik kebijakan pendidikan yang diterapkan telah mencapai tujuan dan memberikan gambaran tentang efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kebijakan tersebut disebut evaluasi kebijakan pendidikan. Rossi et al. (2018) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan mencakup evaluasi bukan hanya hasil tetapi juga proses implementasi kebijakan dan relevansinya terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasari.

Evaluasi kebijakan dalam pendidikan mencakup banyak hal, seperti kualitas pembelajaran, aksesibilitas, keberlanjutan program, dan dampaknya terhadap kesempatan belajar yang sama. Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang relevan, kredibel, dan valid, menurut Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen (2017).

Untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan, tujuan utama adalah sebagai berikut:

1. Menilai Efektivitas Evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang diterapkan. Kesesuaian antara hasil yang dicapai dan tujuan yang dirumuskan merupakan cara untuk mengukur efektivitas.
2. Menilai efisiensi, Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk menerapkan kebijakan telah digunakan dengan benar. Analisis biaya, waktu, dan sumber daya yang dihabiskan untuk pelaksanaan kebijakan termasuk dalam kategori ini.
3. Untuk menjamin keadilan dan inklusi, evaluasi kebijakan membantu memastikan bahwa kebijakan akan menguntungkan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
4. Meningkatkan Akuntabilitas: Pembuat kebijakan dapat menunjukkan tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan dengan melakukan evaluasi. Hasil evaluasi digunakan untuk menjelaskan keuntungan dan hasil kebijakan yang diterapkan.

5. Mendukung Keputusan: Hasil evaluasi memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan strategis, seperti mengubah atau mengembangkan kebijakan baru.

6. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Evaluasi kebijakan memungkinkan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Kekuatan dan kelemahan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan di masa mendatang.

Dalam konteks global, evaluasi kebijakan pendidikan sering digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tertentu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Sebagaimana dinyatakan oleh UNESCO (2020), evaluasi kebijakan pendidikan menjadi alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dalam pendidikan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

## **C. Tahapan Proses Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

Evaluasi kebijakan pendidikan adalah Proses sistematis untuk mengevaluasi keberhasilan, efisiensi, dan dampak kebijakan pendidikan dikenal sebagai evaluasi kebijakan pendidikan. Untuk memastikan bahwa hasil evaluasi memberikan informasi yang benar dan relevan untuk pengambilan keputusan, proses evaluasi ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terorganisir. Agar hasilnya dapat dimaksimalkan untuk perbaikan kebijakan

### **1. Identifikasi Masalah dan Penentuan Tujuan Evaluasi**

a. Deskripsi Tahapan: Tahapan ini dimulai dengan evaluasi untuk menentukan masalah utama yang ingin diselesaikan. Pertanyaan seperti apakah kebijakan telah mencapai tujuannya atau berdampak pada kelompok sasaran dibuat oleh evaluator.

b. Tujuan: Menentukan fokus evaluasi agar proses evaluasi dapat dilakukan dengan baik dan sesuai kebutuhan.

c. Referensi: Wholey, Hatry, dan Newcomer (2016) mengatakan bahwa fokus evaluasi yang jelas membantu dalam menentukan metode pengumpulan

## 2. Perencanaan Evaluasi

a. Deskripsi Tahapan: Penyusunan rencana evaluasi termasuk tujuan, desain penelitian, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal pelaksanaan.

b. Komponen Utama:

- ilihan antara metode kuantitatif, kualitatif, atau campuran
- Membuat indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan berhasil.
- Membuat alat evaluasi seperti kuesioner, panduan wawancara, dan pedoman observasi.
- Tujuan: Membuat proses evaluasi berjalan dengan cara yang teratur dan efektif.
- Referensi: Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen (2017) menekankan bahwa evaluasi harus direncanakan dengan baik untuk menghasilkan hasil yang relevan.

## 3. Pengumpulan Data

a. Deskripsi Tahapan: Data dikumpulkan dari wawancara, survei, dokumen kebijakan, atau observasi lapangan. Metode yang digunakan disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan.

b. Pendekatan:

- Data primer terdiri dari informasi langsung yang diperoleh dari responden melalui wawancara, survei, atau fokus kelompok.
  - Data sekunder berasal dari statistik, laporan resmi, atau dokumen sebelumnya.
- c. Tujuan: Mendapatkan data yang akurat dan relevan untuk menjawab pertanyaan evaluasi.
- d. Referensi: Sugiyono (2018) menyoroti pentingnya triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil evaluasi.

## 4. Proses Analisis Data

a. Deskripsi Tahapan: Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk menemukan hubungan, pola, atau temuan yang

signifikan. Analisis dapat kualitatif (tematik) atau kuantitatif (statistik).

b. Teknik Analisis:

- Untuk data kuantitatif, statistik inferensial atau deskriptif
- Pengkodean dan analisis data tematik dari data kualitatif
- Analisis kombinasi untuk pendekatan yang lebih luas.
  - c. Tujuan: Menghasilkan temuan yang bermakna sebagai dasar interpretasi dan rekomendasi.
  - d. Referensi: Miles, Huberman, & Saldaña (2020) menekankan pentingnya validasi data dalam analisis untuk memastikan keakuratan hasil.

5. **Interpretasi Hasil Evaluasi**

- a. Deskripsi Tahapan: Deskripsi Tahapan: Hasil analisis data ditafsirkan sesuai dengan kebijakan yang dievaluasi. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi dan konsekuensi dari temuan.
- b. Komponen Utama:

- Penafsiran temuan berdasarkan pertanyaan evaluasi.
- Penyusunan narasi tentang apa yang berhasil, apa yang tidak, dan mengapa.
  - c. Tujuan: Memberikan pemahaman yang jelas tentang seberapa baik atau buruk kebijakan.
  - d. Referensi: Patton (2015) menyatakan bahwa interpretasi yang baik harus mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan ekonomi.

6. **Penyusunan Laporan Evaluasi**

- a. Deskripsi Tahapan: Hasil evaluasi dan analisisnya disusun dalam dokumen tertulis yang sistematis yang mencakup pendahuluan, metodologi, temuan utama, analisis, dan saran.
- b. Format Laporan:
  - Laporan lengkap yang dimaksudkan untuk pemangku kepentingan teknis.

- Ringkasan eksekutif untuk pemangku kepentingan
- data visualisasi untuk umum.
- Tujuan: Membuat hasil evaluasi jelas dan mudah dipahami.
- Referensi: Few (2013) menekankan bahwa visualisasi data sangat penting untuk membuat laporan lebih menarik.

## 7. Diseminasi Hasil Evaluasi

- Proses: Menyampaikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan melalui berbagai platform, seminar, dan jurnal.
- Tujuan: Menjamin bahwa hasil evaluasi tersedia dan bermanfaat bagi audiens yang tepat.
- Sumber: Weiss (2018) menekankan bahwa strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk menyebarkan hasil evaluasi. dalam diseminasi hasil evaluasi.

## 8. Pemanfaatan Hasil Evaluasi

- Deskripsi Tahapan: Tujuan evaluasi digunakan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan untuk merancang kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang ada.
- Langkah Utama:
  - Untuk memantau implementasi rekomendasi.
  - Membuat kebijakan baru berdasarkan bukti evaluasi.
- Tujuan: Meningkatkan efisiensi kebijakan dan bagaimana kebijakan berdampak pada masyarakat.
- Referensi: Hatry (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan hasil evaluasi adalah langkah penting menuju pembuatan kebijakan yang relevan dan berbasis bukti.

## 9. Prinsip dalam Pelaksanaan Tahapan Evaluasi

- Sistematis: Untuk memastikan hasil evaluasi yang kredibel, setiap langkah harus dilakukan secara sistematis.
- Berbasis Data: Data yang valid dan dapat diandalkan harus digunakan untuk membuat keputusan dalam setiap tahap evaluasi.

c. Kontekstual: Dalam proses evaluasi, konteks sosial, ekonomi, dan budaya kebijakan harus dipertimbangkan.

d. Partisipatif: Untuk membuat hasil evaluasi lebih diterima, libatkan pemangku kepentingan di setiap tahap.

Untuk memastikan bahwa evaluasi memberikan informasi yang relevan dan aplikatif, tahapan proses evaluasi kebijakan pendidikan merupakan kerangka kerja yang sistematis. Pembuat kebijakan dapat melakukan langkah-langkah ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan serta mengembangkan solusi perbaikan yang berbasis bukti.

Proses evaluasi kebijakan pendidikan terdiri dari banyak tahapan yang saling terkait. Untuk memastikan bahwa hasil evaluasi memberikan informasi yang benar, akurat, dan relevan, setiap langkah memerlukan pendekatan yang sistematis. Penjelasan mendalam tentang langkah-langkah tersebut diberikan di bawah ini:

1. Proses evaluasi kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah dan tujuan evaluasi. Isu-isu yang relevan, tujuan kebijakan yang akan dievaluasi, dan pertanyaan evaluasi yang ingin dijawab semuanya harus diidentifikasi oleh evaluator. Wholey et al. (2016) menyatakan bahwa fokus pada tujuan evaluasi yang jelas akan membantu dalam menentukan metode dan pendekatan yang paling cocok. Misalnya, apakah tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya, efektivitas kebijakan, atau dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran tertentu?

2. Desain dan Perencanaan Evaluasi: Pada titik ini, evaluator merancang kerangka evaluasi, yang mencakup indikator yang akan digunakan, metodologi, dan metode pengumpulan data. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan waktu yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dan bagaimana data dapat diakses. Fitzpatrick et al. (2017) menekankan bahwa untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan secara praktis, diperlukan penetapan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART indicators).

3. Pengumpulan Data: Proses pengumpulan data sangat penting untuk evaluasi. Ada banyak cara untuk mendapatkan data, seperti observasi, wawancara, survei, dan analisis dokumen. Tujuan evaluasi dan jenis informasi yang diperlukan memengaruhi pilihan metode. Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang implementasi kebijakan, data yang dikumpulkan harus mengandung informasi kuantitatif dan kualitatif, seperti yang dinyatakan Rossi et al. (2018).

4. Analisis dan Interpretasi Data: Untuk menghasilkan hasil yang relevan, data yang dikumpulkan harus diolah dan ditafsirkan. Bergantung pada jenis data yang tersedia, teknik analisis dapat mencakup statistik deskriptif, analisis inferensial, atau analisis tematik. Pada tahap ini, evaluator harus memastikan bahwa interpretasi hasil dilakukan secara tidak bias dan mempertimbangkan konteks kebijakan. Wholey et al. (2016) menegaskan bahwa triangulasi data sangat penting untuk meningkatkan validitas hasil.

5. Pelaporan dan Diseminasi Hasil Evaluasi: Laporan harus jelas dan sistematis. Latar belakang kebijakan, metode evaluasi, hasil utama, dan saran harus dimasukkan dalam laporan ini. Dimungkinkan untuk menyebarkan hasil evaluasi melalui berbagai cara, seperti presentasi, jurnal, atau laporan kepada pemangku kepentingan. Menurut Harty (2019), laporan evaluasi harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan audiens sehingga data dapat dipahami dan digunakan secara efektif.

6. Memanfaatkan Hasil Evaluasi untuk Pengambilan Keputusan Tahapan Terakhir adalah penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan saat ini. Setelah evaluasi, evaluator harus bekerja sama dengan pembuat kebijakan untuk merumuskan tindakan konkret. Anderson (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan hasil evaluasi sangat bergantung pada rekomendasi yang baik dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses evaluasi.

Evaluasi kebijakan pendidikan dapat sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan memahami dan menerapkan setiap tahapan ini secara menyeluruh. Dengan memahami dan menerapkan setiap tahapan ini secara sistematis, Evaluasi kebijakan pendidikan dapat sangat membantu meningkatkan

kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan memahami dan menerapkan setiap tahapan ini secara menyeluruh.

## **D. Teknik Pengumpulan Data dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan**

Dalam evaluasi kebijakan pendidikan, teknik pengumpulan data sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar, akurat, dan relevan. Tujuan evaluasi, sumber daya yang tersedia, dan jenis informasi yang dibutuhkan adalah semua faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih teknik-teknik ini. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing metode:

1. **Wawancara.** Evaluator dapat mengumpulkan informasi mendalam dari pemangku kepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, dan pembuat kebijakan, melalui wawancara. Metode ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman individu tentang persepsi, pengalaman, dan perspektif terkait implementasi kebijakan. Seperti yang dinyatakan oleh Kvale dan Brinkmann (2015), wawancara semi-terstruktur dan terstruktur menawarkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi masalah tertentu sambil tetap mengkonsentrasi pada tujuan evaluasi.
2. **Kuesioner.** Kuisisioner Secara efektif, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Faktor-faktor seperti kepuasan, efektivitas program, dan hasil pembelajaran dapat diukur dengan teknik ini. Untuk menghindari bias peserta, desain kuesioner harus mempertimbangkan kejelasan, kesederhanaan, dan relevansi pertanyaan (Fowler, 2014).
3. **Observasi.** Observasi memungkinkan evaluator melihat implementasi kebijakan di lapangan secara langsung. Data empiris tentang perilaku, interaksi, dan kondisi lingkungan diberikan melalui metode ini, yang mungkin tidak dapat diperoleh melalui wawancara atau kuesioner. Cohen et al. (2017) menekankan bahwa, tergantung pada peran evaluator dalam konteks yang diamati, observasi dapat bersifat partisipatif atau non-partisipatif.

4. Dokumentasi. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis seperti laporan, catatan administratif, dan kebijakan tertulis. Memahami konteks kebijakan, sejarah program, dan hasilnya membutuhkan teknik ini. Bowen (2009) menyatakan bahwa analisis dokumen adalah cara yang murah dan efektif untuk mendapatkan data sekunder yang relevan.
5. Studi Kasus Studi kasus memungkinkan penyelidikan mendalam tentang penerapan kebijakan dalam situasi tertentu. Teknik ini memberikan gambaran yang lebih luas dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Menurut Yin (2018), studi kasus sangat bermanfaat untuk memahami fenomena kompleks di dunia nyata.
6. Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah diskusi kelompok yang difasilitasi untuk mengeksplorasi perspektif kolektif tentang masalah tertentu. Metode ini bermanfaat untuk menemukan kebutuhan, persepsi, dan cara berpikir berbagai pemangku kepentingan. Menurut Krueger dan Casey (2015), keberhasilan Focus Group Discussion (FGD) bergantung pada siapa yang mengatur diskusi untuk tetap terfokus dan produktif.

Evaluator dapat memperoleh data yang lengkap dan triangulasi informasi untuk meningkatkan validitas temuan dengan menggabungkan berbagai teknik ini. Pilihan teknik harus mempertimbangkan konteks evaluasi, tujuan, dan sumber daya yang tersedia.

## **E. Analisis Data dan Interpretasi Hasil Evaluasi**

Analisis data dan interpretasi hasil evaluasi adalah langkah penting dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Analisis yang berkualitas harus dapat menjawab pertanyaan evaluasi secara menyeluruh, mendalam, dan berbasis bukti. Untuk membuat rekomendasi yang relevan, interpretasi hasil analisis harus mempertimbangkan konteks kebijakan.

## **1. Pengertian Analisis Data**

Proses sistematis untuk mengolah, mengorganisasi, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan selama proses evaluasi dikenal sebagai analisis data. Untuk mendukung kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, analisis ini dilakukan untuk menemukan pola, tren, dan hubungan dalam data (Creswell & Creswell, 2018).

### **a. Jenis analisis data meliputi:**

- 1) Analisis Kuantitatif: Digunakan untuk data numerik seperti penggunaan anggaran atau statistik capaian siswa.
- 2) Analisis Kualitatif digunakan untuk data non-numerik seperti observasi, dokumen, atau wawancara.
- 3) Analisis Campuran (*Mixed Methods*): Menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pandangan yang lebih holistik.

### **b. Metode Analisis Data**

- 1) Analisis Kuantitatif
- 2) Statistik Deskriptif: Ini merangkum data menggunakan tabel, grafik, rata-rata, median, dan modus.
- 3) Statistik inferensial seperti uji-t, regresi, dan ANOVA membantu membuat generalisasi berdasarkan sampel atau memahami hubungan antar variabel (Field, 2018).
- 4) Analisis Kualitatif
- 5) Pengkodean Data: Ini adalah proses di mana data dikelompokkan ke dalam kategori atau tema tertentu..
- 6) Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema utama yang muncul dalam data kualitatif.
- 7) Teknik Triangulasi: Digunakan untuk memastikan validitas dan keandalan data dengan membandingkan berbagai sumber informasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2020).

8) Analisis Campuran (Mixed Methods) Pendekatan ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan hasil yang lebih kaya. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengevaluasi kebijakan yang kompleks, seperti dampak pendidikan terhadap kesetaraan sosial (Creswell & Plano Clark, 2018).

#### **c. Visualisasi Data**

Salah satu alat penting dalam analisis adalah visualisasi data, yang bertujuan untuk membuat data lebih mudah dipahami oleh audiens. Informasi disajikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami melalui penggunaan visualisasi seperti infografis, grafik, tabel, dan diagram alur (Few, 2013).

#### **d. Interpretasi Hasil Analisis**

Interpretasi adalah proses menafsirkan hasil analisis dengan mempertimbangkan konteks kebijakan. Hasil interpretasi yang baik harus:

- 1) Berbasis Data: Hasil interpretasi harus didukung oleh data yang valid dan reliabel.
- 2) Kontekstual: Mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan.
- 3) Transparan: Menyajikan temuan dengan jujur dan tanpa bias.
- 4) Menurut Patton (2015), interpretasi yang baik memerlukan pemahaman mendalam tentang tujuan evaluasi dan kemampuan untuk menyampaikan temuan secara jelas kepada para pemangku kepentingan.

#### **Tantangan dalam Analisis dan Interpretasi**

- 1) Kualitas Data: Data yang kurang valid atau tidak lengkap dapat mengurangi keakuratan analisis.
- 2) Bias Analisis: Bias dari evaluator dapat memengaruhi hasil interpretasi.
- 3) Kompleksitas Kebijakan: Kebijakan yang melibatkan banyak variabel dapat mempersulit analisis dan interpretasi.

Analisis data dan interpretasi hasil evaluasi adalah tahap penting dalam memastikan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan

keputusan. Pendekatan yang sistematis, berbasis bukti, dan mempertimbangkan konteks kebijakan adalah kunci keberhasilan dalam tahap ini. Top of Form

## **F. Pelaporan dan Diseminasi Hasil Evaluasi**

Laporan dan penyebaran hasil evaluasi adalah langkah terakhir dalam proses evaluasi kebijakan pendidikan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyampaikan hasil analisis dan interpretasi secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pelaporan dan penyebaran yang baik memastikan bahwa hasil evaluasi tercatat dan berguna untuk perbaikan kebijakan (Hatr, 2019).

### **1. Pengertian Pelaporan dan Diseminasi**

- a. Pelaporan: Proses penyusunan hasil evaluasi dalam bentuk dokumen tertulis, seperti laporan formal, ringkasan eksekutif, atau infografis. Pelaporan bertujuan menyampaikan hasil evaluasi secara rinci, mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi (Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2017).
- b. Diseminasi: Proses penyebarluasan informasi hasil evaluasi kepada audiens yang relevan, baik melalui presentasi, publikasi, diskusi panel, atau media digital. Diseminasi bertujuan memastikan bahwa hasil evaluasi diketahui dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (Weiss, 2018).

### **2. Komponen Utama Pelaporan Hasil Evaluasi**

- a. Pendahuluan
  - Latar belakang kebijakan.
  - Tujuan dari evaluasi.
  - Pertanyaan evaluasi yang memerlukan jawaban.
- b. Metode Evaluasi
  - Pendekatan dan teknik pengumpulan data.
  - Penjelasan mengenai metodologi analisis.
- c. Temuan Utama
  - Temuan didasarkan pada informasi kualitatif dan kuantitatif.

- Identifikasi kelebihan dan kekurangan kebijakan.
- d. Analisis dan Interpretasi
  - Hubungan antara hasil dan objektif evaluasi.
  - Hasil analisis menentukan implikasi kebijakan.
- e. Rekomendasi
  - Langkah-langkah Perbaikan yang dapat dilakukan
  - Strategi untuk memastikan bahwa kebijakan akan bertahan.
- f. Kesimpulan

Ringkasan utama hasil penilaian.

### **3. Format Pelaporan**

- a. Laporan Formal Laporan mencakup setiap aspek evaluasi. Laporan ini ditujukan untuk peneliti dan pembuat kebijakan.
- b. Ringkasan Eksekutif adalah dokumen singkat yang menekankan poin-poin penting dari evaluasi. Audiens seperti pengambil keputusan dan eksekutif yang membutuhkan informasi cepat adalah target format ini.
- c. Untuk membuat hasil evaluasi lebih mudah dipahami, visualisasikan data menggunakan grafik, tabel, atau infografis. Menurut Few (2013), visualisasi membantu menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang menarik.

### **4. Strategi Diseminasi Hasil Evaluasi**

- a. Presentasi kepada Pemangku Kepentingan
  - Menyampaikan hasil evaluasi melalui seminar, diskusi panel, atau lokakarya.
  - Untuk menjelaskan temuan utama, gunakan presentasi visual yang efektif (Hatr, 2019).
- b. Publikasi
  - Hasil evaluasi diterbitkan dalam jurnal akademik, laporan resmi, atau artikel media.
  - Publikasi meningkatkan jangkauannya ke audiens yang lebih luas, termasuk praktisi dan akademisi.
- c. Media Digital
  - Untuk menyebarkan hasil evaluasi, gunakan platform online seperti situs web, media sosial, atau yang lainnya.

- Dengan format digital, informasi menjadi lebih mudah diakses untuk audiens yang tersebar di seluruh dunia.

**d. Focus Group Discussion (FGD)**

- Mengundang kelompok kecil pemangku kepentingan untuk berbicara tentang hasil evaluasi.
- Umpam balik langsung terhadap hasil dan saran dimungkinkan dengan pendekatan ini.

**5. Prinsip dalam Pelaporan dan Diseminasi**

- a. Informasi yang berkelanjutan harus sesuai dengan kebutuhan audiens dan membantu mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan (Weiss, 2018).
- b. Transparansi pelaporan harus mencakup hasil secara menyeluruh, termasuk kekangan evaluasi dan topik penelitian tambahan (Fitzpatrick et al., 2017).
- c. Untuk memastikan bahwa hasil evaluasi diterima dan dimanfaatkan secara luas, audiens diseminasi harus terlibat, termasuk pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat.
- d. Adaptasi Format: Pelaporan dan diseminasi harus disesuaikan dengan audiens. Laporan formal untuk pembuat kebijakan dan infografis untuk masyarakat umum adalah contohnya (Hatr, 2019).

**6. Tantangan dalam Pelaporan dan Diseminasi**

- a. Kompleksitas Data: Menyederhanakan data tanpa mengurangi keakuratan adalah masalah utama dalam pelaporan dan penyebaran.
- b. Keterbatasan Sumber Daya: Proses diseminasi yang luas membutuhkan lebih banyak sumber daya, termasuk waktu dan biaya.
- c. Resistensi terhadap Hasil Evaluasi: Beberapa pemangku kepentingan mungkin tidak setuju dengan hasilnya, terutama jika hasilnya menunjukkan kekurangan kebijakan.

Untuk memastikan bahwa hasil evaluasi dapat diakses, dipahami, dan digunakan oleh pemangku kepentingan, langkah penting adalah pelaporan dan penyebaran hasil evaluasi. Evaluasi kebijakan pendidikan dapat benar-benar mempengaruhi pembangunan dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan metode pelaporan yang teratur dan disebarluaskan.

## **G. Pemanfaatan Hasil Evaluasi untuk Perbaikan Kebijakan**

Hasil evaluasi harus dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka menjadi laporan formal dan dasar pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan. Hasil evaluasi yang diolah dengan baik dapat memberikan saran konkret tentang bagaimana kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan efektif (Hatry, 2019).

### **1. Pengertian dan Tujuan Pemanfaatan Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi digunakan untuk membuat keputusan kebijakan yang lebih baik. Komunikasi, interpretasi, dan tindakan berbasis bukti yang dihasilkan dari evaluasi adalah bagian dari proses ini, menurut Weiss (2018). Adapun Tujuan dari Penggunaan Hasil Evaluasi

#### **a. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan**

Meningkatkan Efektivitas Kebijakan: Menemukan masalah dalam pelaksanaan kebijakan dan menyelesaiakannya untuk meningkatkan hasil yang diinginkan.

#### **b. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya**

Memberikan wawasan tentang cara meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tenaga kerja, dan waktu.

#### **c. Mendorong Akuntabilitas**

Memastikan pembuat kebijakan bertanggung jawab atas pilihan mereka dengan bukti evaluasi.

d. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data  
Membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih tepat dan relevan berdasarkan bukti empiris (Creswell & Creswell, 2018).

e. Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mendorong pemangku kepentingan untuk berbicara secara terbuka tentang perubahan kebijakan.

## 2. Tahapan Pemanfaatan Hasil Evaluasi

a. Transformasi Temuan menjadi Rekomendasi

- Hasil evaluasi harus ditulis menjadi saran praktis yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
- Rekomendasi harus spesifik, realistik, dan praktis (Hatr, 2019).

b. Komunikasi Temuan kepada Pemangku Kepentingan

- Mengkomunikasikan temuan evaluasi melalui laporan, presentasi, atau diskusi panel.
- Penggunaan visualisasi data dan infografis untuk meningkatkan pemahaman

c. Integrasi Hasil Evaluasi dalam Proses Kebijakan

- Hasil evaluasi digunakan dalam perencanaan atau revisi kebijakan baru.
- Rekomendasi efektif diterapkan melalui pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan (Patton, 2015).

f. Monitoring Implementasi

- Proses pelaksanaan rekomendasi harus dipantau untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai rencana.
- Untuk mengukur dampak implementasi, indikator keberhasilan harus dibuat (Fitzpatrick et al., 2017).

## 7. Penyebaran Informasi

Didistribusikan secara luas, hasil evaluasi dapat digunakan oleh banyak orang, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

### 3. Prinsip Pemanfaatan Hasil Evaluasi

- a. Berbasis Bukti; Semua keputusan yang dibuat harus didasarkan pada hasil evaluasi yang valid dan dapat diandalkan.
- b. Kontekstual: Ketika hasil evaluasi digunakan, hal-hal sosial, ekonomi, dan budaya yang berkaitan dengan kebijakan harus dipertimbangkan.
- c. Proses kolaboratif; melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membuat solusi yang inklusif dan berkelanjutan (Weiss, 2018).
- d. Berorientasi pada Tindakan; Hasil evaluasi harus memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan, bukan hanya analisis teoretis.

### 4. Tantangan dalam Pemanfaatan Hasil Evaluasi

- a. Kurangnya Komitmen Pembuat Kebijakan: Hasil evaluasi mungkin tidak diterima oleh beberapa pembuat kebijakan jika hasilnya bertentangan dengan kebijakan atau agenda politik yang sudah ada.
- b. Sumber Daya Terbatas: Rekomendasi seringkali memerlukan sumber daya tambahan, seperti anggaran dan tenaga kerja.
- c. Ada kemungkinan bahwa pemangku kepentingan tidak memahami sepenuhnya hasil evaluasi, yang dapat menyebabkan kesulitan untuk memahami dan memanfaatkan hasilnya.
- d. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa pihak mungkin menentang rekomendasi evaluasi, terutama jika perubahan tersebut berdampak pada kepentingan mereka.

### 5. Strategi Mengatasi Tantangan

- a. Meningkatkan Literasi Evaluasi: Mengajarkan pemangku kepentingan membaca, memahami, dan menggunakan hasil evaluasi.
- b. Dengan menggunakan pendekatan partisipasi, semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses evaluasi untuk meningkatkan penerimaan hasil evaluasi.
- c. Komunikasi yang efektifKomunikasi hasil evaluasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh berbagai audiens.
- d. Penyediaan Sumber Daya yang Memadai: Pastikan anggaran dan tenaga kerja dialokasikan dengan tepat untuk menerapkan rekomendasi evaluasi.

## **6. Contoh Implementasi Pemanfaatan Hasil Evaluasi**

### **a. Perbaikan Kurikulum Pendidikan**

Perbaikan Kurikulum Pendidikan: Hasil evaluasi program pendidikan dapat digunakan untuk merevisi kurikulum untuk menjadi lebih sesuai dengan masyarakat dan kebutuhan siswa.

### **b. Optimalisasi Program Bantuan**

Optimalisasi Program Bantuan: Hasil evaluasi distribusi bantuan pendidikan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas program.

### **c. Pengembangan Pelatihan Guru**

Pengembangan Pelatihan Guru: Evaluasi pelatihan guru dapat membantu mengembangkan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan hasil evaluasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dievaluasi, tetapi juga ditingkatkan berdasarkan bukti yang relevan. Dengan mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam proses pengambilan keputusan, pembuat kebijakan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif, efisien, dan inklusif.

## **H. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Untuk membuat sistem pendidikan yang responsif, inklusif, dan berbasis bukti, sangat penting untuk melakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat dibuat:

### **1. Kesimpulan**

- a. Untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pendidikan memungkinkan untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Untuk memperbaiki kebijakan, para pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat harus berkomitmen sebagai pengguna utama sistem pendidikan.

### **2. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan**

- a. Peningkatan Kualitas Evaluasi: Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan berbasis data, menggunakan teknik yang valid, dan mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat.
- b. Penguatan Kapasitas Evaluator: Evaluator kebijakan harus dilatih secara menyeluruh agar mereka dapat mengelola data, melakukan analisis, dan membuat rekomendasi yang relevan.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Untuk pengumpulan data yang efisien, analisis berbasis algoritma, dan diseminasi hasil yang cepat dan luas, sistem evaluasi harus menggunakan teknologi informasi.
- d. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, proses evaluasi dan pemanfaatan hasilnya harus melibatkan pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat sipil.

e. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Untuk memastikan bahwa hasil evaluasi digunakan dengan benar dan memiliki efek yang signifikan, perbaikan kebijakan harus diikuti dengan proses pemantauan yang berkelanjutan.

Jadi, evaluasi kebijakan pendidikan adalah cara untuk mengukur keberhasilan program dan membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Rekomendasi harus dilaksanakan dengan baik, memiliki efek nyata, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

## REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Few, S. (2013). *Data Visualization: A Practical Introduction*. MIT Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hatry, H. P. (2019). *Performance Measurement: Getting Results*. Urban Institute Press.

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2017). *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. Pearson.
- Weiss, C. H. (2018). *Evaluation Research: Methods for Assessing Program Effectiveness*. Prentice Hall.
- OECD. (2021). *Education Policy Outlook*. OECD Publishing.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2016). *Handbook of Practical Program Evaluation*. Jossey-Bass.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2018). *Evaluation: A Systematic Approach*. SAGE Publications.
- Few, S. (2013). *Data Visualization: A Practical Introduction*. MIT Press.

#### A. dentitas Penulis



Penulis bernama Suharyani, S.Pd.I.,M.Pd. Lahir di Lombok Timur, 31 Desember 1973. pada tahun 1996 mengawali kariernya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dengan mengambil program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Setelah

menyelesaikan pendidikan sarjana, pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dengan

mengambil Program Studi Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pada tahun 2007 diterima di IKIP Mataram yang sekarang telah berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA) sebagai dosen tetap yayasan di Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Pada tahun 2013-2017 diberikan kepercayaan sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Pada tahun 2017-2022 diberikan kepercayaan sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Mandalika. Pada tahun 2022-Sekarang diberikan kepercayaan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) Universitas Pendidikan Mandalika. Sebagai seorang akademisi dan sekaligus sebagai praktisi pendidikan, penulis memiliki konsentrasi di bidang pendidikan non-formal dan informal dengan fokus pada Pemberdayaan Masyarakat. Saat ini, penulis sedang melanjutkan studi doktoral di Program Studi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Dengan pengetahuan dan pengalaman akademik dan profesional yang dimiliki, penulis terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk pengembangan dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan Nonformal Informal atau Pendidikan Masyarakat pada khususnya.

## **BAB VII**

### **PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

#### **A. Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya, berbagai pihak, terutama pemerintah, yang memiliki otoritas untuk merancang dan menerapkan kebijakan, harus sangat memperhatikan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi alat penting untuk mengatur sistem pendidikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah.

Meskipun kebijakan pendidikan sudah direncanakan dengan baik, masalah terbesar terletak pada bagaimana mereka diterapkan. Kebijakan pendidikan tidak sekadar mengikuti peraturan. Ini adalah proses yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengambil keputusan dan perumusan hingga pelaksanaan di lapangan, termasuk guru, sekolah, dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kebijakan yang optimal, proses ini tentunya memerlukan perhatian yang teliti.

Buku ini bertujuan untuk membahas secara menyeluruh Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan. Dalam buku ini, kami akan membahas berbagai topik penting seperti definisi kebijakan pendidikan, tujuan, prinsip-prinsip, tahapan formulasi kebijakan Pendidikan dan pentingnya implementasi yang efektif dari kebijakan tersebut, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Terakhir, buku ini juga memberikan saran yang

dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif di masa depan.

Pentingnya buku ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kesulitan yang terlibat dalam penerapan kebijakan pendidikan. Pembaca diharapkan untuk memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana suatu kebijakan pendidikan seharusnya dibuat dan dijalankan dalam konteks dunia yang terus berubah. Mereka juga diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Melalui buku ini, kita semua diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut beberapa penelitian literatur, kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai kumpulan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengatur sistem pendidikan negara atau wilayah dengan tujuan menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian hasil pendidikan yang diinginkan. Banyak hal termasuk dalam kebijakan ini, seperti peraturan, program pendidikan, dan strategi untuk memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hough (2010), kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai proses yang terdiri dari interaksi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat, dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan efektif.

Secara umum, kebijakan pendidikan melibatkan elemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang saling terkait untuk memastikan akses, kualitas, relevansi, dan keberlanjutan pendidikan di semua tingkat. Hal ini sesuai dengan definisi Fullan (2007), yang menekankan bahwa kebijakan pendidikan bukan hanya tentang membuat undang-undang tetapi juga tentang

melakukannya, yang berarti mengubah sistem dan meningkatkan semua aspek pendidikan.

## **1. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses penerapan keputusan atau peraturan yang telah dirumuskan oleh otoritas pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem pendidikan (Howlett & Ramesh, 2020). Menurut Sabatier dan Mazmanian (1983), implementasi kebijakan mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau individu untuk menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi hasil nyata. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktivitas seperti penyediaan sumber daya, pelatihan guru, dan pemantauan efektivitas kebijakan.

Bergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi suatu negara, tujuan kebijakan pendidikan berbeda-beda dalam literatur. Namun, secara umum, tujuan kebijakan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yang diperkuat oleh banyak literatur penting.

- a. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan: Salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kraak (2008), kebijakan pendidikan yang efektif harus dapat memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari status sosial-ekonomi, ras, atau wilayah, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, ini mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, terutama antara kota dan pedesaan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Meningkatkan kualitas pendidikan adalah salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kurikulum yang diperbaiki, pelatihan guru yang lebih baik, dan penguatan sistem penilaian yang lebih adil dan komprehensif dapat dilakukan (Darling-Hammond, 2000).

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja.

- c. Relevansi Kurikulum dengan Kebutuhan Zaman: Tujuan kebijakan pendidikan adalah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemajuan teknologi, permintaan pasar tenaga kerja, dan tuntutan zaman.
- d. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat: Kebijakan pendidikan yang baik harus mendorong orang tua, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, Pritchett (2013). menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendidikan akan meningkatkan efektivitas kebijakan dan meningkatkan rasa kepemilikan atas sistem pendidikan.
- e. Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya: Tujuan utama kebijakan pendidikan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan sumber daya pendidikan. Kebijakan pendidikan, menurut Barber (2007), harus mempertimbangkan bagaimana mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan pelatihan guru.
- f. Membentuk Identitas dan Kewarganegaraan Kebijakan pendidikan juga membentuk karakter siswa; mereka akan menghasilkan generasi yang tidak hanya berpendidikan tinggi tetapi juga memiliki moral, etika, dan kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dewey (1916), yang menekankan bahwa pendidikan membentuk kewarganegaraan yang baik dan intelektual.

## **1. Pentingnya Implementasi**

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat memiliki dampak yang diinginkan, tahapan implementasi kebijakan pendidikan sangat penting. Meskipun kebijakan

pendidikan sudah dirancang dengan baik, hasilnya bisa sangat terbatas atau bahkan tidak tercapai sama sekali jika tidak diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, memahami alasan mengapa implementasi itu penting sangat penting, terutama dalam hal dampak pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru dan siswa.

1. Pengaruh Terhadap Kualitas Pendidikan: Salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan pendidikan adalah kualitas pendidikan. Implementasi kebijakan dengan benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa kebijakan telah diterapkan secara efektif di setiap level pendidikan. Sebaliknya, implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kebijakan tidak mencapai tujuan yang diinginkan, meskipun kebijakan tersebut mungkin sudah dirancang dengan baik.
  - a. Penyampaian Kurikulum yang Efektif: Untuk meningkatkan pembelajaran dan kualitas pengajaran, kebijakan pendidikan sering kali melibatkan perubahan atau penyempurnaan kurikulum. Kurikulum baru mungkin tidak dipahami dengan baik oleh guru atau diikuti dengan baik oleh sekolah jika tidak diterapkan dengan baik. Implementasi yang buruk, seperti kekurangan sumber daya untuk mendukung kurikulum baru atau kurangnya pelatihan guru, dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan (Fullan, 2007).
  - b. Peningkatan Kualitas Pengajaran: Implementasi kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pengajaran. Misalnya, kebijakan yang mengutamakan pelatihan berkelanjutan bagi guru memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan pengajar mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima siswa. Namun, jika pelatihan ini tidak dilaksanakan dengan cara yang sistematis dan terencana, hasilnya mungkin tidak maksimal. Kegagalan untuk

- melaksanakan kebijakan ini, seperti kurangnya follow-up setelah pelatihan
- c. Infrastruktur dan Sarana Pendidikan: Pembangunan dan perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan membangun sekolah baru, memperbaiki fasilitas sekolah, atau menyediakan teknologi pembelajaran harus dilaksanakan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa dan guru.
2. Kesejahteraan Siswa dan Guru: Pelaksanaan kebijakan pendidikan juga memengaruhi kesejahteraan siswa dan guru. Dalam pendidikan, kesejahteraan tidak hanya bergantung pada ekonomi; itu juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan profesional.
- a. Kesejahteraan Siswa: Kebijakan pendidikan yang ada, seperti kebijakan inklusi, dukungan psikososial, dan program kesehatan sekolah, sangat memengaruhi kesejahteraan siswa. Jika dilaksanakan dengan benar, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup siswa, seperti memberikan konseling atau mengubah kurikulum menjadi lebih relevan dengan kehidupan siswa, akan berhasil. Sebaliknya, siswa tidak akan merasakan manfaat dari kebijakan tersebut jika pelaksanaannya terhambat, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Contohnya, kebijakan yang meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental atau mengurangi kekerasan di sekolah hanya akan berhasil jika dilaksanakan dengan baik. Ini mencakup memastikan bahwa karyawan terlatih, program pemantauan yang berfungsi, dan budaya sekolah yang mendukung kesehatan siswa.

b. Kesejahteraan Guru: Kebijakan pendidikan yang diterapkan juga berdampak besar pada kesejahteraan guru. Jika dilaksanakan dengan benar, kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kompensasi, tunjangan, dan kesejahteraan sosial untuk guru akan meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang mereka berikan. Misalnya, jika ada kebijakan yang mendukung pengembangan karir dan pelatihan profesional guru, tetapi tidak diterapkan karena kekurangan anggaran atau pelaksanaan yang salah, kesejahteraan fisik dan mental guru dapat terganggu.

Sebaliknya, stres, kelelahan, dan ketidakpuasan kerja yang disebabkan oleh kebijakan kesejahteraan guru yang buruk, seperti kurangnya dukungan untuk beban kerja yang berlebihan, atau kurangnya mekanisme untuk meningkatkan karir guru, dapat memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.

c. Keseimbangan Beban Kerja dan Penilaian: Kebijakan yang mengatur evaluasi dan penilaian kinerja guru juga mempengaruhi kesehatan mereka. Pengaturan yang memungkinkan pengurangan beban administratif, penghargaan untuk pencapaian, dan evaluasi yang lebih fleksibel dapat meningkatkan kesehatan guru. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan adalah faktor kunci dalam menentukan apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru dan siswa. Implementasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat mengoptimalkan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan semua orang yang terlibat dalam sistem pendidikan. Dengan kata lain, implementasi bukan hanya menjalankan kebijakan; itu juga memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan benar, sehingga siswa dan guru dapat melihat hasilnya.

Implementasi kebijakan pendidikan yang efektif sangat penting karena berkontribusi pada:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan: Dengan kebijakan yang diimplementasikan dengan baik, standar pendidikan dapat ditingkatkan.
- b. Pemerataan akses pendidikan: Implementasi yang tepat memastikan kebijakan pendidikan inklusif dapat mengatasi disparitas dalam akses pendidikan (World Bank, 2018).
- c. Penguatan daya saing sumber daya manusia: Pendidikan yang berkualitas menghasilkan individu yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global (OECD, 2020).

Menurut Grindle (1980), faktor-faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan meliputi:

- a. Konteks kebijakan: Kejelasan tujuan, konsistensi, dan kompleksitas kebijakan memengaruhi implementasi.
- b. Sumber daya: Ketersediaan dana, infrastruktur, dan tenaga kerja terampil adalah elemen kunci.
- c. Kapabilitas implementor: Kapasitas dan komitmen individu atau lembaga pelaksana memegang peran penting.
- d. Dukungan politik: Dukungan dari pihak pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sangat menentukan keberhasilan kebijakan.
- e. Partisipasi masyarakat: Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua dan komunitas lokal, dapat memperkuat implementasi kebijakan pendidikan (Fullan, 2016).

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

- a. Pemerintah: Bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, alokasi anggaran, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
- b. Lembaga pendidikan: Melaksanakan kebijakan di tingkat operasional melalui pengelolaan sekolah dan kegiatan belajar mengajar.
- c. Guru dan tenaga pendidik: Sebagai pelaksana kebijakan di tingkat kelas, mereka memegang peranan utama dalam penerapan kurikulum dan metode pembelajaran.
- d. Orang tua dan masyarakat: Memberikan dukungan moral dan material untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.
- e. Organisasi internasional dan mitra eksternal: Memberikan bantuan teknis dan keuangan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan pendidikan (UNESCO, 2021).

## **A. Prinsip-Prinsip dalam Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan adalah landasan utama dalam membangun sistem pendidikan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Beberapa prinsip utama dalam kebijakan pendidikan yang sering dikemukakan dalam literatur meliputi:

### **1. Prinsip Keadilan**

Keadilan adalah prinsip utama dalam kebijakan pendidikan, yang bertujuan memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. UNESCO (2015) menekankan pentingnya keadilan untuk mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, baik secara geografis, gender, maupun ekonomi. Prinsip ini juga tercermin dalam Sustainable Development Goal (SDG) 4, yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan inklusif dan merata bagi semua.

### **2. Prinsip Efisiensi**

Efisiensi dalam kebijakan pendidikan berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. Levin (2001) menyatakan bahwa kebijakan

pendidikan harus dirancang untuk memaksimalkan hasil pembelajaran dengan biaya yang minimal, tanpa mengorbankan kualitas. Efisiensi juga mencakup alokasi anggaran yang tepat, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, dan pengurangan pemborosan dalam sistem pendidikan.

### 3. Prinsip Relevansi

Relevansi menuntut agar kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan global. Menurut Tilak (2008), kebijakan pendidikan harus dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan, termasuk kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Relevansi juga melibatkan integrasi nilai-nilai lokal dan budaya dalam kurikulum untuk menjaga identitas nasional.

### 4. Prinsip Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kebijakan pendidikan yang efektif melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Fullan (2016) menekankan bahwa keterlibatan berbagai pihak dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, memfasilitasi implementasi, dan memperkuat hasil pendidikan.

### 5. Prinsip Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan adalah prinsip yang menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip ini menjadi inti dari agenda global seperti UNESCO (2017), yang menyebutkan bahwa pendidikan harus menjadi pilar dalam pembangunan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pendidikan lingkungan, kesadaran global, dan literasi digital.

### 6. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas menuntut adanya transparansi dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Barber dan Mourshed (2007), sistem pendidikan yang sukses memiliki mekanisme yang jelas untuk mengevaluasi kebijakan, mengukur kinerja, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.

## 7. Prinsip Inovasi

Inovasi dalam kebijakan pendidikan menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan global, seperti perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. OECD (2019) menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan harus mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memperkenalkan metode pengajaran yang inovatif, dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan kolaborasi.

## B. Tahapan Formulasi Implementasi Kebijakan

Untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif di lapangan, implementasi kebijakan pendidikan adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai tahapan. Secara umum, proses pelaksanaan kebijakan dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan. Untuk kebijakan pendidikan berhasil, harus melewati langkah-langkah ini. Semua langkah-langkah tersebut dijelaskan di sini.

### 1. Perencanaan.

Perencanaan adalah tahap awal yang sangat penting dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan akan relevan dan efektif, dua komponen utama yang harus dilakukan pada tahap ini adalah analisis kebutuhan dan penyusunan rencana aksi.

#### a. Analisis Kebutuhan:

Analisis kebutuhan adalah langkah pertama dalam proses membuat kebijakan pendidikan adalah melakukan analisis kebutuhan. Sebelum membuat kebijakan atau program pendidikan, sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi sistem pendidikan, termasuk masalah akses, kualitas, dan relevansi. Ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat solusi yang tepat sasaran.

Menurut Fullan (2007), analisis kebutuhan mencakup pengumpulan data tentang berbagai aspek sistem pendidikan, seperti kualitas pengajaran, jumlah siswa, dan fasilitas pendidikan. Analisis kebutuhan yang mendalam akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Sebagai contoh, UNESCO (2015) menekankan bahwa data sangat penting untuk memahami disparitas pendidikan. Ini ditunjukkan dengan melakukan survei pendidikan untuk mengetahui kualitas pendidikan atau tingkat partisipasi siswa di berbagai daerah. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan kebijakan yang tepat untuk kebutuhan pendidikan di lapangan.

b. Penyusunan Rencana Aksi:

Setelah analisis kebutuhan selesai, langkah selanjutnya adalah membuat rencana aksi. Rencana ini berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan kebijakan, dan mencakup penjadwalan, alokasi anggaran, dan tindakan konkret yang harus diambil. Selain itu, rencana tindakan harus mencakup indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian mereka, Miller dan Williams (2015) menyatakan bahwa rencana tindakan yang efektif harus terperinci, realistik, dan didukung oleh sumber daya yang cukup. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan, rencana tindakan juga harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah pusat dan daerah.

2. Sosialisasi:

Sosialisasi adalah tahap yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dipahami dengan baik oleh guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Kebijakan yang dibuat

mungkin tidak diterima atau dilaksanakan dengan baik jika tidak ada sosialisasi yang efektif.

a. Penyuluhan kepada Pemangku Kepentingan:

Langkah pertama dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan adalah penyuluhan kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama dalam pendidikan termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan orang tua. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada semua pihak yang terlibat tentang tujuan, keuntungan, dan cara implementasi kebijakan.

Menurut Cohen, Manion, dan Morrison (2013), penyuluhan kepada pihak-pihak terkait harus diberikan secara menyeluruh dan melibatkan komunikasi dua arah untuk memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan perspektif dan masalah mereka. Pembuat kebijakan dan penerima kebijakan dapat berinteraksi secara aktif dalam forum diskusi, seminar, dan workshop untuk memberikan penyuluhan ini.

b. Pelibatan Masyarakat:

Agar kebijakan pendidikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, masyarakat harus berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Berpartisipasi dalam proses pendidikan adalah penting bagi masyarakat, termasuk komunitas lokal dan orang tua. Kebijakan pendidikan yang melibatkan masyarakat akan lebih mudah diterima dan menghasilkan hasil yang lebih baik (Barber, 2007).

Pelibatan masyarakat juga dapat membantu mereka menjalankan kebijakan pendidikan dengan membentuk kelompok kerja, mengadakan pertemuan komunitas, dan mengawasi program pendidikan. UNESCO (2015) juga menyarankan agar seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua hingga masyarakat lokal, terlibat dalam program pendidikan untuk membuat lingkungan pendidikan yang mendukung.

### 3. Pelaksanaan Kebijakan:

Tahap di mana kebijakan dilaksanakan secara langsung di lapangan. Pada titik ini, berbagai sumber daya yang dibutuhkan harus tersedia dan beroperasi dengan baik untuk memastikan bahwa kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### a. Sumber Daya yang Dibutuhkan:

Sumber daya manusia, dana, dan sarana dan prasarana pendidikan adalah semua sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan pendidikan. Darling-Hammond (2000) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Kebijakan pendidikan tidak akan berhasil tanpa dukungan anggaran, pelatihan, dan fasilitas yang cukup.

Selain itu, Pritchett (2013) menyatakan bahwa alokasi anggaran harus disesuaikan dengan prioritas pendidikan saat ini untuk menerapkan kebijakan pendidikan. Agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik, pengendalian sumber daya ini harus efektif dan terbuka.

b. Peran Guru dan Administrator: Guru dan administrator sekolah sangat penting dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Pritchett, L. (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada peran guru yang aktif sebagai penggerak perubahan di dalam kelas. Guru harus siap untuk menerima pendekatan pengajaran baru, beradaptasi dengan kurikulum yang diubah, dan mendukung siswa dalam mencapai tujuan pendidikan.

Administrator sekolah juga ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Miller dan Williams (2015) mencatat bahwa administrator sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, menjamin koordinasi antar-pihak, dan menilai hasil implementasi kebijakan. Selain itu, mereka membantu dan mendorong guru untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada implementasinya melalui tahapan perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan. Kebijakan pendidikan akan diterima dan diterapkan dengan baik jika kebutuhan diperiksa dengan benar, rencana aksi dibuat dengan realistik, dan stakeholder dan masyarakat diberi pelatihan yang baik. Pada tahap pelaksanaan, sumber daya yang memadai dan partisipasi aktif administrator dan guru sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan.

## **C. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Monitoring dan evaluasi adalah dua elemen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Monitoring berfokus pada pelacakan proses pelaksanaan kebijakan, sementara evaluasi berorientasi pada penilaian hasil untuk menentukan efektivitas kebijakan serta memberikan masukan untuk perbaikan.

### **1. Monitoring**

Monitoring merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana. Dua aspek utama dalam monitoring adalah:

#### **a. Metode Pengawasan**

Menurut Patton (2015), metode pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan kompleksitas kebijakan dan konteks implementasi, serta melibatkan pemantauan langsung untuk memastikan keakuratan data. Metode pengawasan yang digunakan dalam monitoring dapat beragam, tergantung pada kebutuhan kebijakan. Beberapa metode umum mencakup:

- Observasi Langsung: Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan, seperti kegiatan pembelajaran di sekolah atau penerapan prosedur tertentu.

- Laporan Berkala: Penerimaan laporan dari pelaksana kebijakan di berbagai tingkat, seperti laporan bulanan dari kepala sekolah atau guru.
- Audit Proses: Pemeriksaan dokumen dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan.

#### b. Pengumpulan Data

Rossi, Lipsey, dan Freeman (2018) menekankan pentingnya validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan agar monitoring dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam monitoring untuk mendapatkan informasi faktual tentang pelaksanaan kebijakan. Teknik pengumpulan data meliputi:

- Kuesioner dan Survei: Untuk mengukur kepuasan stakeholder, termasuk guru, siswa, dan orang tua.
- Wawancara: Untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai kendala atau keberhasilan implementasi.
- Analisis Dokumen: Mengkaji dokumen kebijakan, rencana aksi, dan laporan hasil pelaksanaan.

## 2. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

#### a. Menilai Hasil Implementasi

Menurut Stufflebeam dan Coryn (2014), evaluasi yang baik harus mencakup pengukuran hasil yang sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah dirancang sejak awal. Penilaian hasil implementasi berfokus pada:

- Kesesuaian Tujuan: Apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

- Efisiensi Proses: Apakah sumber daya digunakan secara optimal.
- Dampak Kebijakan: Apakah kebijakan memberikan manfaat yang signifikan bagi sasaran, seperti peningkatan kualitas pembelajaran atau kesejahteraan siswa.

#### b. Feedback untuk Perbaikan

Scriven (2017) menyebutkan bahwa umpan balik yang jelas, berbasis data, dan relevan dapat membantu pelaksana kebijakan memperbaiki strategi implementasi secara berkelanjutan. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pembuat kebijakan dan pelaksana. Langkah-langkah penting dalam pemberian umpan balik meliputi:

- Identifikasi Kelemahan: Menguraikan aspek kebijakan yang kurang efektif.
- Rekomendasi Perbaikan: Memberikan solusi konkret untuk meningkatkan implementasi kebijakan di masa depan.
- Diskusi Stakeholder: Melibatkan stakeholder dalam pembahasan hasil evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang beragam.

Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi dalam implementasi kebijakan pendidikan. Monitoring memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana melalui pengumpulan data yang akurat, sementara evaluasi memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan dan umpan balik untuk perbaikan. Keduanya harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan kebijakan yang optimal.

### **Tantangan dalam Implementasi**

Berbagai kesulitan seringkali menghalangi pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan. Keengganan terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang kurang efektif adalah beberapa contoh masalah yang dapat muncul. Kajian mendalam tentang setiap masalah diberikan di bawah ini:

#### Resistensi terhadap Perubahan

Resistensi terhadap perubahan adalah tantangan umum dalam implementasi kebijakan pendidikan. Resistensi ini dapat muncul dari berbagai kelompok, termasuk guru, siswa, orang tua, dan administrator sekolah. Penyebab resistensi meliputi:

- a. Ketidakpastian: Orang cenderung enggan meninggalkan cara lama yang sudah mereka kuasai.
- b. Kurangnya Pemahaman: Stakeholder tidak memahami tujuan kebijakan secara menyeluruh.
- c. Ketakutan akan Beban Tambahan: Guru dan administrator mungkin merasa kebijakan baru akan meningkatkan tanggung jawab mereka tanpa dukungan yang memadai.

Menurut Fullan (2007), resistensi terhadap perubahan biasanya terjadi ketika pelaksana kebijakan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan sosialisasi kebijakan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut maka dapat dilakukan berbagai cara diantaranya adalah dengan :

- a. Melibatkan stakeholder sejak awal.
- b. Memberikan pelatihan untuk membangun kapasitas mereka dalam mengadopsi kebijakan baru.

#### 2. Keterbatasan Sumber Daya

Implementasi kebijakan sering terhambat oleh kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun infrastruktur. Contohnya adalah:

- a. Kekurangan Anggaran: Dana yang tidak memadai membuat banyak kebijakan tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

- b. Tenaga Kerja yang Tidak Siap: Guru atau administrator mungkin kurang terlatih dalam memahami dan melaksanakan kebijakan baru.
- c. Keterbatasan Fasilitas: Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kebijakan tidak tersedia atau tidak memadai.

Grindle (2017) menekankan bahwa implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang mencukupi untuk mendukung setiap tahapan, dari perencanaan hingga evaluasi. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Merancang kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
- b. Menggandeng mitra eksternal untuk membantu memenuhi kebutuhan.

### 3. Komunikasi yang Kurang Efektif

Komunikasi yang buruk antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan stakeholder lainnya dapat menyebabkan miskomunikasi, kurangnya pemahaman, dan penolakan terhadap kebijakan. Beberapa masalah yang sering muncul meliputi:

- a. Kurangnya Transparansi: Informasi tentang kebijakan tidak disampaikan secara jelas dan terbuka.
- b. Distribusi Informasi yang Tidak Merata: Tidak semua pihak menerima informasi kebijakan pada waktu yang sama.
- c. Minimnya Ruang Diskusi: Stakeholder tidak memiliki forum untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan.

Spillane, Reiser, dan Reimer (2002) mencatat bahwa komunikasi yang buruk sering kali menjadi penghalang utama dalam mengimplementasikan kebijakan yang kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat diatasi dengan cara:

- a. Menggunakan berbagai saluran komunikasi (media digital, tatap muka, dokumen tertulis) untuk memastikan informasi sampai kepada semua pihak.
- b. Mengadakan sesi diskusi atau konsultasi untuk mendengarkan masukan dari stakeholder.

Tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan komunikasi yang kurang efektif memerlukan perhatian khusus. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk melibatkan semua orang sejak awal, memastikan sumber daya tersedia, dan meningkatkan komunikasi. Strategi ini dapat membantu membuat lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

## **D. Studi Kasus Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)**

### **1. Latar Belakang**

Kebijakan Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di universitas Indonesia berasal dari kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif untuk era 4.0. Program ini merupakan perubahan besar dari kurikulum 2013 sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pendekatan pendidikan yang lebih luas dengan fokus pada hard skills dan soft skills, serta kualitas kepemimpinan (Maulana, 2022). Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk terlibat dalam berbagai pengalaman pendidikan, baik di dalam maupun di luar kampus. Program ini akan mempromosikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, yang merupakan bagian penting dari identitas Indonesia (Wati et al., 2023). Untuk memastikan bahwa tujuan MBKM terintegrasi secara efektif dalam proses belajar mengajar, pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi dan

pemahaman di antara semua pemangku kepentingan, termasuk tenaga kependidikan, siswa, dan dosen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan perguruan tinggi (D3, D4, dan S1) mencapai sekitar 5,98% pada Agustus 2021, tetapi turun sedikit pada Februari 2022, TPT untuk lulusan perguruan tinggi tetap tinggi, yaitu 5,65%. Ini menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya siap untuk bekerja.

Lebih dari 50% perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di bidang teknologi, manajemen, dan komunikasi, menurut laporan dari World Bank dan McKinsey & Company.

Hasil survei The Future of Jobs Report dari World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi Indonesia kurang menguasai keterampilan kritis seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Padahal keterampilan ini sangat penting dalam industri modern.

Data tersebut menunjukkan betapa pentingnya melakukan pembaharuan pada sistem pendidikan tinggi Indonesia. Program MBKM pemerintah bertujuan untuk mempersiapkan lulusan untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berubah. Program ini memberikan pengalaman kerja praktis, keterampilan kerja yang relevan, dan akses ke pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dengan memberikan pengalaman belajar praktis di luar kampus, program MBKM bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan ini. Menurut Wicaksono (2022), tujuan program MBKM adalah untuk mengurangi jarak antara pendidikan dan dunia kerja. Dengan demikian, siswa yang terlibat dalam kegiatan MBKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka dalam lingkungan kerja nyata. Program seperti ini dianggap dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan berdaya saing.

## **2. Tujuan Kebijakan**

Tujuan kebijakan MBKM adalah untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, inovatif, dan siap kerja. Mereka juga ingin meningkatkan sistem pendidikan tinggi yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Tujuan utama kebijakan ini, menurut Nadiem Makarim (2020), penggagas utama MBKM, adalah untuk memberi mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka melalui pengalaman praktis di luar kampus. Diharapkan bahwa pengalaman ini akan meningkatkan daya saing profesional mahasiswa dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui lulusan yang berkualitas tinggi

Berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2020), indikator keberhasilan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mencakup beberapa elemen penting yang dapat diukur melalui pencapaian hasil yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan dampak pada lulusan. Berikut adalah indikator:

- a. Peningkatan Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan MBKM: peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti berbagai program MBKM, seperti magang, pertukaran pelajar, kewirausahaan, proyek penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini merupakan indikator keberhasilan program.
- b. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Mahasiswa: Mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan hard skills yang relevan dengan industri dan soft skills seperti komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah.
- c. Sesuaikan Kurikulum dengan Kebutuhan Industri: Perguruan tinggi yang berhasil menyesuaikan kurikulum MBKM dengan kebutuhan industri akan menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri.

- d. Pengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Lulusan: Salah satu indikator dampak jangka panjang MBKM adalah penurunan tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi, yang diharapkan akan semakin rendah dengan keterampilan dan pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa melalui program MBKM. Pengalaman yang menguntungkan dalam magang, proyek lapangan, atau penelitian termasuk dalam indikator ini.
- e. Penilaian dan Pengakuan dari Dunia Industri: Pengakuan dan pengakuan dari dunia industri atau pihak mitra terhadap kualitas dan kontribusi mahasiswa MBKM mencerminkan keberhasilan program ini dalam menghasilkan lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pasar kerja.

### **3. Stakeholder Terkait**

Buku panduan implementasi (2020) menyatakan bahwa berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam kebijakan MBKM, termasuk:

- a. Mahasiswa: Sebagai pelaksana utama program MBKM yang akan memberikan pengalaman belajar di luar kampus.
- b. Perguruan Tinggi: Bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan mengelola program MBKM secara keseluruhan.
- c. Dosen: Berfungsi sebagai pembimbing akademik untuk siswa dan memastikan kegiatan memenuhi standar pembelajaran.
- d. Mitra Industri dan Pemerintah: Ini termasuk bisnis, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah yang membantu mahasiswa dengan magang, penelitian, dan kerja sama lainnya.
- e. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): berfungsi sebagai regulator yang mengatur keberhasilan program MBKM dengan memberikan pedoman, sumber daya, dan pengawasan.

## 4. Analisis Kebijakan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memulai kebijakan MBKM dengan tujuan utama untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dengan dunia kerja dan masyarakat serta memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi pengalaman belajar di luar kurikulum formal.

Beberapa aspek utama terdiri dari isi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), menurut Panduan Implementasi MBKM:

- a. Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus: MBKM memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengambil bagian dalam delapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dapat diakui sebagai Satuan Kredit Semester (SKS). Mereka termasuk magang, proyek penelitian, pertukaran siswa, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, pembelajaran melalui studi independen, sekolah, dan proyek desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan meningkatkan keterampilan praktis mereka sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja.
- b. Fleksibilitas Kurikulum dan Konversi SKS: Perguruan tinggi diharapkan mengubah kurikulum mereka untuk memungkinkan pengakuan SKS dari kegiatan di luar kampus. Artinya, pengalaman mahasiswa dalam program MBKM ini dimasukkan ke dalam beban SKS yang harus diselesaikan oleh siswa dalam kurikulum formal. Oleh karena itu, kebijakan ini mendorong integrasi antara pendidikan akademik dan keterampilan praktis dan menekankan bahwa pendidikan tinggi harus relevan dengan tuntutan industri.
- c. Pemberdayaan Perguruan Tinggi dalam Penyesuaian dan Pelaksanaan MBKM: Pedoman yang telah ditetapkan memungkinkan perguruan tinggi merancang program MBKM sesuai dengan kebutuhan mereka. Perguruan tinggi

dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa, bekerja sama dengan mitra industri, dan menyesuaikan program dengan kondisi lokal dengan cara ini.

- d. Kerja Sama dengan Industri, Pemerintah, dan Organisasi Masyarakat: Kebijakan MBKM mendorong institusi pendidikan tinggi untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi, seperti bisnis, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Ini bertujuan untuk memperluas jaringan kerja perguruan tinggi dengan sektor industri dan masyarakat serta memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam situasi dunia nyata.
- e. Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan MBKM: Kementerian juga menetapkan bahwa setiap program MBKM harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui seberapa efektif dan berdampak pada peningkatan keterampilan siswa, tingkat serapan kerja, dan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar.

(Departemen Pendidikan, 2020)

Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga menjelaskan bagaimana kebijakan MBKM dibuat. Proses ini mencakup beberapa tahap, termasuk:

- a. Survei dan Analisis Kebutuhan Pasar Kerja: kemendikbudristek melakukan survei untuk mengetahui tentang keterampilan yang diperlukan di pasar kerja saat ini. Data, misalnya, menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi seringkali tidak memiliki keterampilan yang diperlukan di tempat kerja. Berdasarkan informasi ini, pemerintah mengatakan bahwa pendidikan tinggi harus lebih terkait dengan pekerjaan nyata.
- b. Studi Perbandingan Internasional: Model MBKM didasarkan pada kebijakan pendidikan di negara lain. Misalnya, pendidikan terintegrasi di Australia dan pendidikan kooperatif di Kanada adalah contohnya. Pemerintah menilai efektivitas pembelajaran berbasis pengalaman dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan

dalam studi ini. Hasil perbandingan ini menciptakan dasar untuk kebijakan MBKM, terutama dalam hal fleksibilitas pembelajaran di luar kampus dan integrasi pengalaman kerja dengan pendidikan tinggi.

- c. Konsultasi Publik dan Diskusi Terbuka dengan Pemangku Kepentingan: Konsultasi publik dan diskusi terbuka dengan pemangku kepentingan juga digunakan dalam proses perumusan kebijakan MBKM. Organisasi mahasiswa, guru, dan universitas juga terlibat dalam proses ini. Metode ini menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk tentang kesulitan dan peluang yang terkait dengan pelaksanaan program MBKM. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan MBKM sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan masalah di tingkat pelaksanaan.
- d. Pelatihan dan Sosialisasi bagi Perguruan Tinggi: pemerintah mendukung penerapan kebijakan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi perguruan tinggi setelah kebijakan dibuat. Ini dilakukan melalui lokakarya, webinar, dan panduan teknis yang membantu perguruan tinggi memahami aspek teknis pelaksanaan MBKM, seperti pemantauan hasil, pelaporan kegiatan, dan konversi SKS.
- e. Uji Coba dan Implementasi Tahap Awal: untuk mengetahui seberapa efektif dan sulit pelaksanaannya, kebijakan MBKM pertama kali diuji di beberapa universitas. Uji coba ini melibatkan evaluasi langsung terhadap kesiapan kurikulum, keterlibatan mitra kerja sama, dan dukungan infrastruktur. Hasil uji coba ini kemudian digunakan untuk membuat penyesuaian kebijakan sebelum skala penuh diterapkan.

(Departemen Pendidikan, 2020)

## **5. Implementasi Kebijakan**

Panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020 mencakup kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk

mengintegrasikan pengalaman praktis mahasiswa dengan kurikulum akademik. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan MBKM berjalan efektif dan memiliki dampak positif bagi mahasiswa, pedoman ini harus diikuti oleh perguruan tinggi saat menyiapkan kurikulum, menyiapkan sumber daya, dan bekerja sama dengan mitra eksternal.

Menurut panduan MBKM, tahapan implementasi MBKM di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan kurikulum yang fleksibel: Perguruan tinggi diminta untuk membuat kurikulum yang mendukung kebebasan belajar di luar kampus. Pengakuan SKS untuk kegiatan MBKM seperti magang, proyek penelitian, dan kewirausahaan adalah salah satu penyesuaianya. Panduan ini menetapkan bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat dimasukkan ke dalam beban SKS yang harus diselesaikan mahasiswa. Agar pengalaman akademik mahasiswa diperhitungkan, perguruan tinggi harus memiliki sistem yang mengakui SKS dari program MBKM. Misalnya, pengalaman magang dapat diubah menjadi mata kuliah tertentu berdasarkan relevansi dan durasi.
- b. Pengembangan Program: Program MBKM menawarkan delapan bentuk kegiatan pembelajaran, dan perguruan tinggi memiliki pilihan untuk menerapkan tiga dari delapan bentuk kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satu dari delapan bentuk ini adalah pertukaran siswa ke universitas lain, proyek penelitian, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, proyek desa atau pendidikan khusus tematik, pengajaran di sekolah, dan studi atau proyek independen.

Setiap kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa sesuai bidang mereka dan juga meningkatkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Untuk memungkinkan kegiatan di luar kampus diakui sebagai bagian dari kurikulum akademik, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menetapkan standar penilaian yang sesuai.

- c. Bimbingan dan Pembimbingan untuk Mahasiswa: Selama MBKM, setiap mahasiswa harus memiliki pembimbing, baik dari perguruan tinggi maupun dari mitra kerja sama, seperti perusahaan atau organisasi masyarakat. Memberikan umpan balik terkait pembelajaran, memantau kemajuan siswa, dan membantu mereka merencanakan kegiatan, semua tanggung jawab guru ini.

Menurut Panduan MBKM, perguruan tinggi harus memastikan bahwa bimbingan terstruktur dan terjadwal diberikan kepada mahasiswa selama kegiatan di luar kampus agar mahasiswa mendapatkan panduan yang jelas dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Di universitas, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Ini termasuk infrastruktur, kesiapan staf, dan perubahan kurikulum. Berikut ini adalah beberapa hambatan utama yang sering dihadapi selama proses pelaksanaan MBKM:

- a. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung: Keterbatasan ini merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan MBKM, terutama untuk kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti magang, penelitian, dan kewirausahaan. Perguruan tinggi yang terpencil atau kekurangan dana seringkali tidak dapat mengakses fasilitas laboratorium, koneksi internet yang memadai, atau kerja sama dengan industri.
- b. Kesiapan dan Kompetensi Dosen: Untuk melaksanakan MBKM, dosen harus memiliki kemampuan dalam pengajaran berbasis praktik, supervisi magang, dan kerja sama lintas disiplin dengan berbagai mitra industri. Namun, banyak dosen tidak terbiasa dengan model pengajaran berbasis praktik di lapangan atau kerja sama industri.
- c. Penyesuaian Kurikulum MBKM: Perguruan tinggi harus menyesuaikan kurikulumnya untuk mendukung berbagai kegiatan pembelajaran di luar kampus, seperti magang,

penelitian, dan kegiatan sosial. Ini memerlukan proses yang rumit dan waktu yang lama, karena kurikulum tradisional biasanya berfokus pada pembelajaran di dalam kelas.

d. Kerjasama dengan Mitra industry

Keberhasilan MBKM sangat bergantung pada kerja sama perguruan tinggi dengan perusahaan atau organisasi eksternal. Namun, membangun kerja sama dengan mitra industri tidak selalu mudah—terutama di daerah yang jauh dari pusat industri. Selain itu, beberapa industri mungkin menolak untuk berpartisipasi karena mereka perlu menyediakan fasilitas dan instruksi untuk mahasiswa magang.

e. Kesiapan Mahasiswa dan Adaptasi dengan Dunia Kerja:

Banyak mahasiswa kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia kerja nyata karena mereka belum terbiasa dengan model pembelajaran berbasis praktik. Mereka mungkin kekurangan keterampilan seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kerja sama tim, sehingga mereka membutuhkan bimbingan khusus untuk menyesuaikan diri dengan program magang atau proyek lapangan.

## 6. Dampak Kebijakan

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) memiliki berbagai dampak bagi program studi (prodi) di perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa dampak positif implementasi tersebut:

a. Reformulasi Kurikulum

- 1) Penyesuaian Mata Kuliah: Prodi perlu merevisi kurikulum untuk mengintegrasikan elemen MBKM, seperti mata kuliah berbasis proyek dan pengalaman praktis.
- 2) Fleksibilitas dalam Penawaran: Prodi harus menyediakan mata kuliah pilihan yang lebih beragam, memungkinkan mahasiswa untuk memilih dari program lain atau universitas mitra.

b. Kolaborasi dengan Industri

- 1) Peningkatan Kerjasama: Prodi perlu menjalin kemitraan lebih erat dengan industri untuk menciptakan peluang magang, penelitian kolaboratif, dan proyek nyata.
  - 2) Feedback dari DUDI: Dengan keterlibatan industri, prodi dapat memperoleh masukan yang berguna untuk memperbaiki dan memperbarui kurikulum agar relevan dengan kebutuhan pasar.
- c. Peningkatan Kualitas Lulusan
- 1) Keterampilan Praktis: Lulusan prodi akan memiliki pengalaman praktis yang lebih baik, meningkatkan employability mereka di dunia kerja.
  - 2) Kemandirian Mahasiswa: Dengan memberi mahasiswa pilihan dalam pendidikan mereka, prodi dapat membantu mengembangkan sikap mandiri dan inisiatif.
- d. Dukungan Akademik
- 1) Pelatihan Dosen: Dosen perlu dilatih untuk mengadopsi metode pengajaran baru yang sesuai dengan MBKM, termasuk pembelajaran berbasis proyek dan penilaian yang lebih inovatif.
  - 2) Peningkatan Sumber Daya: Prodi mungkin perlu meningkatkan sumber daya yang tersedia, seperti akses ke laboratorium, fasilitas pelatihan, dan dukungan administratif.
  - 3) Peningkatan Keterampilan Praktis: Mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata yang relevan dengan dunia kerja.
  - 4) Keterlibatan Industri: Meningkatnya kerjasama antara perguruan tinggi dan industri, yang dapat memperkuat link and match.
  - 5) Fleksibilitas Pembelajaran: Mahasiswa merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas pendidikan mereka.

Beberapa dampak negatif yang muncul disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan institusi, kesiapan mahasiswa, dan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari implementasi kebijakan MBKM

- a. Potensi Penurunan Kualitas Pembelajaran, Salah satu dampak negatif dari MBKM adalah potensi penurunan kualitas pembelajaran, terutama jika institusi belum siap sepenuhnya dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, magang, atau pengalaman luar kampus lainnya. Banyak perguruan tinggi yang kesulitan menyesuaikan kurikulum dan sistem pembelajaran dengan MBKM, sehingga pengawasan dan penilaian terhadap proses belajar mahasiswa menjadi kurang optimal.
- b. Ketimpangan Akses antara Perguruan Tinggi di Perkotaan dan Daerah Terpencil, Implementasi MBKM seringkali lebih mudah diakses oleh perguruan tinggi di perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap dan kerja sama dengan industri yang lebih luas. Di sisi lain, perguruan tinggi di daerah terpencil menghadapi kesulitan dalam menyediakan kegiatan luar kampus seperti magang atau proyek berbasis komunitas karena keterbatasan akses ke mitra industri atau lembaga lainnya.
- c. Kesulitan dalam Adaptasi Mahasiswa pada Dunia Kerja, Meskipun MBKM dirancang untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, banyak mahasiswa yang justru mengalami kesulitan beradaptasi dengan kondisi di luar kampus. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterampilan soft skills yang diperlukan, seperti komunikasi, manajemen waktu, dan etika profesional, yang tidak didapatkan secara maksimal di kampus.
- d. Beban Administratif dan Birokrasi yang Meningkat bagi Perguruan Tinggi, Untuk menjalankan program MBKM, perguruan tinggi harus menyiapkan berbagai dokumen administratif, prosedur pelaksanaan, dan laporan yang

- cukup rumit. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi dosen dan staf administrasi, yang sering kali mengurangi waktu mereka untuk kegiatan utama seperti pengajaran dan penelitian.
- e. Tidak Optimalnya Dukungan dan Kesiapan Industri, Banyak industri yang belum siap atau tidak memiliki sumber daya untuk menerima mahasiswa magang atau bekerja sama dengan perguruan tinggi. Industri yang lebih kecil, terutama di daerah, sering kali tidak memiliki program khusus untuk mahasiswa, sehingga pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa tidak maksimal atau kurang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan.
  - f. Kendala Pendanaan bagi Mahasiswa dan Perguruan Tinggi, Implementasi MBKM membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik dari segi pelaksanaan kegiatan di luar kampus maupun dukungan fasilitas dan logistik. Bagi mahasiswa, biaya untuk transportasi, akomodasi, dan biaya hidup selama program magang atau kegiatan luar kampus lainnya bisa menjadi kendala, terutama bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah.

Evaluasi terhadap pencapaian tujuan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi (PT) merupakan upaya untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Evaluasi ini perlu dilaksanakan dan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan MBKM tidak hanya diterapkan, tetapi juga memberikan hasil yang signifikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi MBKM dilaksanakan dengan berbagai pendekatan, diantaranya dengan berbagai model diantaranya adalah dengan menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Daniel L. Stufflebeam dan Teori Evaluasi Efektivitas Kebijakan (Thomas R. Dye). Adapun kriteria

yang digunakan untuk mengukur keefektivan implementasi kebijakan MBKM adalah dengan melihat tingkat partisipasi mahasiswa dalam program MBKM, seperti magang dan proyek independen, penilaian kompetensi mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti program MBKM (pre-test dan post-test). kepuasan mahasiswa dan dosen, yang dapat diukur melalui survei atau kuesioner terkait pengalaman mereka dalam program MBKM, hubungan dengan industri, yang diukur dari jumlah kemitraan yang dibentuk dan kontribusi industri dalam program MBKM, tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja, yang mengindikasikan relevansi program MBKM dengan kebutuhan industry dan dampak pada kurikulum, yaitu seberapa jauh program MBKM mempengaruhi perubahan atau inovasi kurikulum di perguruan tinggi (Kemendikbudristek 2023).

Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa, secara umum, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.

## 7. Perbandingan dengan Kebijakan dengan negara lain

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan kebijakan pendidikan tinggi di beberapa negara lain. Untuk memahami seberapa efektif dan inovatif kebijakan ini, kita harus membandingkannya dengan kebijakan serupa di negara lain, terutama dalam hal kolaborasi dengan industri, fleksibilitas kurikulum, dan peningkatan keterampilan siswa. Kebijakan MBKM Indonesia dan kebijakan pendidikan tinggi di beberapa negara lain dibandingkan di sini.

	Jerman	Finlandia	Amerika	Indonesia
--	--------	-----------	---------	-----------

<b>Tujuan Utama</b>	<b>Dual Study Program</b> s di Jerman mengabungkan pendidikan akademis dengan pelatihan kerja langsung di industri. Mahasiswa terdaftar di universitas sambil bekerja paruh waktu di perusahaan mitra, sehingga mendapatkan pengalaman kerja nyata.	Pendidikan tinggi di Finlandia terkenal dengan <b>Problem-Based Learning (PBL)</b> dan <b>Project-Based Learning</b> , di mana mahasiswa belajar melalui proyek nyata yang dihadapi oleh industri dan masyarakat.	<b>Cooperative Education (Co-op)</b> di AS adalah program yang memungkinkan mahasiswa untuk bekerja penuh waktu di perusahaan sebagai bagian dari program studi mereka. Mahasiswa menghabiskan satu atau dua semester bekerja di industri, yang dihitung sebagai kredit akademik.	Memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka, memperkaya pengalaman praktis, dan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan industri. Program ini mencakup magang, pertukaran pelajar, penelitian, proyek independen, wirausaha, serta kegiatan lain di luar kampus.
---------------------	---	---	---	---

<b>Kebijakan dan Program</b>	Mahasiswa dual study memiliki kontrak kerja dengan perusahaan dan memperoleh gaji sambil belajar. Kurikulum dirancang bersama oleh universitas dan industri untuk memastikan relevansi.	Pembelajaran didasarkan pada pemecahan masalah nyata, dengan fokus pada kolaborasi, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis. Universitas sering bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk menyediakan proyek bagi mahasiswa.	Program ini umumnya ditemukan di universitas teknik dan bisnis. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang dibayar dan mengembangkan jaringan profesional sebelum lulus.	Ada kegiatan yang menjadi fokus MBKM, seperti magang bersertifikat, proyek desa, dan asistensi mengajar.	8
<b>Fokus Evaluasi</b>	Pengurangan kesenjangan antara teori dan praktik, kesiapan kerja lulusan, dan pengurangan tingkat pengangguran	Keterlibatan aktif mahasiswa, pengembangan keterampilan abad ke-21, dan kesiapan lulusan untuk inovasi.	Employability, keterampilan profesional, dan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.	Kompetensi lulusan, kolaborasi dengan industri, relevansi kurikulum, serta peningkatan employability mahasiswa.	

lulusan perguruan tinggi.			
---------------------------	--	--	--

## 8. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan implementasi kebijakan Pendidikan adalah :

1. Penguatan Kebijakan yang Responsif terhadap Kebutuhan Lokal
  - a. Pastikan kebijakan pendidikan disusun berdasarkan analisis kebutuhan lokal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah.
  - b. Integrasikan unsur budaya lokal, nilai-nilai kearifan lokal, dan keberagaman sosial dalam kurikulum pendidikan.
2. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan
  - a. Selenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap kebijakan pendidikan terbaru, termasuk kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan teknologi pendidikan.
  - b. Fasilitasi pengembangan profesional guru melalui program mentoring, pelatihan tematik, dan kolaborasi antar sekolah.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
  - a. Perluas akses dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, terutama di daerah terpencil, melalui pelatihan teknologi untuk guru dan penyediaan perangkat pendukung.

- b. Kembangkan platform digital untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan memberikan umpan balik secara real-time.
- 4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
  - a. Lakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan pendidikan melalui instrumen yang jelas dan berbasis data.
  - b. Libatkan lembaga independen atau pihak ketiga untuk memberikan penilaian objektif atas pelaksanaan kebijakan.
- 5. Peningkatan Partisipasi Orang Tua dan Masyarakat
  - a. Libatkan orang tua dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan melalui forum diskusi, kelompok kerja, dan kegiatan sekolah.
  - b. Kembangkan program kemitraan antara sekolah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan.
- 6. Peningkatan Keadilan dan Inklusi
  - a. Pastikan kebijakan pendidikan memberikan akses yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus, anak miskin, dan anak di daerah tertinggal.
  - b. Kembangkan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif melalui pelatihan khusus untuk guru dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas.

## **E. Kesimpulan**

Untuk memastikan kebijakan pendidikan berjalan dengan baik, pendekatan sistematis dan kerja sama diperlukan. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, dan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci dari proses sistematis. Analisis kebutuhan lokal yang menyeluruh, berbasis data, dan relevan harus menjadi dasar untuk kebijakan pendidikan. Untuk menjaga konsistensi antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai,

diperlukan penetapan langkah-langkah implementasi yang jelas, pemantauan rutin, dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Kedua, keberhasilan kebijakan pendidikan bergantung pada kerja sama. Pemerintah, institusi pendidikan, guru, orang tua, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Melalui partisipasi kolektif dalam pengembangan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, kerja sama ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memperluas cakupan dampak positif kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efisien dan menguntungkan dan memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas pendidikan jika proses sistematis dan kerja sama yang erat digunakan.

## **F. Daftar Pustaka**

Badan Pusat Statistik (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022*.

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). *How the world's best-performing school systems come out on top*. McKinsey & Company.

Barber, M. (2007). *Instruction to the New Zealand Curriculum: What We Know and What We Need to Learn*. OECD Publishing.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). *Research Methods in Education* (7th ed.). Routledge.

Darling-Hammond, L. (2000). *Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence*. *Educational Policy Analysis Archives*, 8(1), 1-44.

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.

Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change* (4th ed.). Teachers College Press.

Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.

- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Hough, D. L. (2010). *Policy and the Politics of Education*. Sage Publications.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023). *Laporan Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi*.
- Kraak, A. (2008). *The Political Economy of Education and Skills Development in South Africa*. HSRC Press.
- Levin, H. M. (2001). *Cost-effectiveness analysis: Methods and applications* (2nd ed.). Sage Publications.
- Pritchett, L. (2013). *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Center for Global Development.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2015). *Education for all 2000-2015: Achievements and challenges*. UNESCO Publishing.
- Maulana, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mewujudkan SDM Unggul dan Kompetitif di Perguruan Tinggi* (Berdasarkan Survey SPADA di Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022). Al-Qisth Law Review, 6(1)
- Makarim, Nadiem. (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*.
- Miller, J., & Williams, P. (2015). *Policy and Governance in Education*. Pearson Education.
- OECD. (2019). *Trends shaping education 2019*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Education policy outlook 2020: Shaping responsive and resilient education in a changing world*. OECD Publishing.

- Pritchett, L. (2013). *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Center for Global Development.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2018). *Evaluation: A Systematic Approach* (8th ed.). Sage Publications.
- Scriven, M. (2017). *Key Evaluation Checklist*. Beverly Hills: Sage.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1983). *Policy implementation*. In S. Nagel (Ed.), Encyclopedia of policy studies (pp. 143-169). CRC Press.
- Spillane, J. P., Reiser, B. J., & Reimer, T. (2002). *Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research*. *Review of Educational Research*, 72(3), 387–431.
- Tilak, J. B. G. (2008). *Education, development, and equity: Indian and international perspectives*. Springer.
- Wati, D.S.S., Aziz, A. & Fitri, A.Z. (2023). *Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi*. *Journal of Education Research*, 4(3), 1021–1030. Available at: <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.248>.
- Wicaksono, Dr. (2022). *Mengembangkan Kompetensi Lulusan melalui Kampus Merdeka*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 15(2), 78-90.
- World Bank. (2018). *World development report: Learning to realize education's promise*. World Bank Publications.

## G. Identitas Penulis



Herlina, S.P., M.Pd. adalah seorang pendidik dan penulis yang lahir di Bima salah satu Kota Kabupaten di Pulau Sumbawa. Perjalanan akademiknya dimulai pada tahun 1991 dengan menempuh Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Malang, mengambil jurusan Pertanian. Pada tahun 2000, penulis melanjutkan studi ke Program Magister (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta, dengan fokus pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Saat ini, pada tahun 2024, penulis sedang menempuh Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya.

Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA). Dalam perannya sebagai akademisi, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium PLS UNDIKMA pada periode 2014-2016, dan sejak tahun 2016 hingga kini, penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi PLS di UNDIKMA.

Bidang spesialisasi penulis adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada pengembangan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah. Pengalaman dan dedikasi penulis dalam bidang ini menjadikannya sebagai salah satu penggerak dalam inovasi dan pengembangan pendidikan di lingkungan akademik.

## **BAB VIII**

### **PROSES SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

#### **A. Konsep Dasar Sosialisasi Kebijakan**

Sosialisasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi, pemahaman, dan pemanfaatan kebijakan kepada pemangku kepentingan (Waluyo & Syarifuddin, 2022). Dalam konteks pendidikan, sosialisasi kebijakan mencakup kegiatan penyebarluasan informasi kepada guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat (Tanjung et al., 2025). Hal ini mencakup tidak hanya komunikasi satu arah, tetapi juga interaksi yang memungkinkan para pemangku kepentingan memberikan umpan balik dan partisipasi aktif dalam implementasi kebijakan.

##### **1. Definisi dan Tujuan Sosialisasi Kebijakan**

Sosialisasi kebijakan adalah proses komunikasi strategis yang dirancang untuk memperkenalkan, menjelaskan, dan mempromosikan penerapan kebijakan tertentu kepada berbagai kelompok masyarakat (Herdiana, 2018). Dalam konteks pendidikan, tujuan utama dari sosialisasi kebijakan adalah: (Adima, 2021).

- a. Membangun pemahaman yang jelas mengenai isi dan tujuan kebijakan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kebijakan bagi sistem pendidikan dan masyarakat luas.
- c. Memobilisasi dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan.
- d. Meminimalkan potensi resistensi atau kesalahpahaman yang dapat menghambat implementasi kebijakan.

##### **2. Prinsip-Prinsip Sosialisasi Kebijakan**

Proses sosialisasi kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: (Adima, 2021).

- a. Transparansi: Informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
  - b. Inklusivitas: Semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang terjangkau, harus terlibat dalam proses sosialisasi.
  - c. Relevansi: Konten sosialisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing kelompok sasaran.
  - d. Keberlanjutan: Sosialisasi bukanlah kegiatan satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kebijakan dan konteks lapangan.
3. Aktor dalam Proses Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Aktor-aktor utama meliputi: (Syuhada et al., 2024).

- a. Pemerintah: Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk merancang dan mengarahkan proses sosialisasi.
- b. Lembaga Pendidikan: Sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijakan kepada tenaga pendidik, siswa, dan orang tua.
- c. Organisasi Masyarakat: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi lokal dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang sulit dijangkau oleh pemerintah.
- d. Media Massa: Televisi, radio, surat kabar, dan media digital berfungsi sebagai saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan informasi secara luas.
- e. Individu Berpengaruh: Tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan influencer dapat menjadi agen perubahan yang membantu meningkatkan pemahaman dan penerimaan kebijakan di tingkat lokal.

Dengan memahami konsep dasar sosialisasi kebijakan, bab ini memberikan landasan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai strategi dan metode yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan sosialisasi yang efektif.

## **B. Strategi dan Metode Sosialisasi Kebijakan Pendidikan**

Sosialisasi kebijakan pendidikan memerlukan pendekatan strategis agar informasi mengenai kebijakan dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Strategi dan metode yang diterapkan harus mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi audiens. Dalam bab ini, akan dibahas secara rinci beberapa strategi utama dalam sosialisasi kebijakan pendidikan.

### **1. Penyampaian melalui Media Massa**

Media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar, merupakan alat yang efektif untuk menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat. Beberapa metode spesifik yang dapat digunakan melalui media massa meliputi: (Haryanto, 2018, hal. 43).

- a. Iklan Layanan Masyarakat: Informasi tentang kebijakan dapat dikemas dalam bentuk iklan singkat yang menarik perhatian, menggunakan bahasa yang sederhana dan visual yang kuat.
- b. Wawancara: Menampilkan wawancara dengan pejabat pemerintah atau ahli pendidikan untuk menjelaskan kebijakan secara rinci dan memberikan contoh implementasi.
- c. Program Diskusi: Mengadakan diskusi panel di televisi atau radio yang melibatkan pemangku kepentingan untuk membahas manfaat dan tantangan kebijakan. Media massa juga memiliki peran penting dalam membangun opini publik yang positif terhadap kebijakan baru.

### **2. Pelatihan dan Workshop**

Pelatihan dan workshop merupakan pendekatan yang lebih mendalam dan interaktif untuk menyampaikan kebijakan kepada kelompok tertentu, seperti guru, kepala sekolah, atau pengawas pendidikan (Ridwan et al., 2023). Beberapa elemen penting dalam pelaksanaan pelatihan dan workshop meliputi:

- a. Materi yang Komprehensif: Pelatihan harus mencakup penjelasan tentang tujuan kebijakan, langkah implementasi, serta studi kasus yang relevan.
- b. Metode Interaktif: Diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus dapat meningkatkan pemahaman peserta dan memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman.
- c. Evaluasi: Memberikan tes atau kuis setelah pelatihan untuk memastikan bahwa peserta memahami isi kebijakan. Pelatihan ini juga dapat diadakan secara daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

### 3. Pembuatan Buku Panduan

Buku panduan adalah dokumen referensi yang memberikan penjelasan rinci tentang kebijakan dan langkah-langkah implementasinya. Beberapa aspek penting dalam penyusunan buku panduan meliputi:

- a. Bahasa yang Sederhana: Buku panduan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk non-akademisi.
- b. Struktur yang Jelas: Buku harus terstruktur dengan baik, mencakup latar belakang kebijakan, tujuan, manfaat, prosedur implementasi, dan FAQ.
- c. Distribusi yang Luas: Buku panduan dapat didistribusikan dalam bentuk cetak maupun digital untuk menjangkau lebih banyak orang. Buku panduan juga dapat disertai dengan infografis dan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman.

### 4. Penggunaan Media Digital

Kemajuan teknologi memberikan peluang besar untuk menggunakan media digital dalam proses sosialisasi

kebijakan. Beberapa platform yang dapat dimanfaatkan adalah: (Arwidayanto et al., 2018).

- a. Media Sosial: Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dapat digunakan untuk membagikan informasi dalam format infografis, video pendek, atau artikel.
- b. Webinar: Seminar daring memungkinkan interaksi langsung antara pembuat kebijakan dan audiens, memberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- c. Aplikasi Pendidikan: Aplikasi yang dirancang khusus untuk pendidikan dapat menyediakan modul pembelajaran tentang kebijakan.
- d. Situs Web Resmi: Pemerintah atau lembaga pendidikan dapat menyediakan laman khusus untuk kebijakan baru, lengkap dengan sumber daya pendukung. Keunggulan media digital adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang beragam dalam waktu singkat dan dengan biaya yang relatif rendah.

## 5. Kampanye Sosialisasi di Tingkat Lokal

Pendekatan lokal sangat penting untuk menjangkau komunitas yang mungkin tidak terjangkau oleh media massa atau digital. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pertemuan Komunitas: Mengadakan pertemuan dengan kelompok orang tua, siswa, dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan kebijakan secara langsung.
- b. Kolaborasi dengan Organisasi Lokal: Melibatkan LSM, kelompok masyarakat, atau pemimpin lokal untuk membantu menyampaikan pesan kebijakan.
- c. Kegiatan Sosialisasi Kreatif: Mengadakan kegiatan seperti lomba, pameran, atau pertunjukan seni yang mengangkat tema kebijakan pendidikan.
- d. Penerjemahan ke Bahasa Lokal: Untuk daerah tertentu, materi sosialisasi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa daerah agar lebih mudah dipahami.

Dengan berbagai strategi dan metode ini, sosialisasi kebijakan pendidikan dapat dilakukan secara efektif, menjangkau berbagai kelompok masyarakat, dan memastikan dukungan serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan.

### **C. Studi Kasus Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia**

Mengenai studi kasus sosialisasi kebijakan pendidikan di Indonesia sangat relevan untuk menilai bagaimana kebijakan besar diimplementasikan dalam praktik. Berikut adalah analisis lebih mendalam mengenai tiga contoh implementasi kebijakan:

#### **1. Sosialisasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)**

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan pendidikan besar di Indonesia yang menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan mandiri (RI, 2024). Kebijakan ini menuntut sosialisasi yang sangat komprehensif karena melibatkan banyak aspek, baik dari segi pendidikan tinggi, kurikulum, hingga hubungan dengan dunia industri dan masyarakat.

##### **a. Kekuatan:**

- 1) Beragam Saluran Sosialisasi: Pemerintah menggunakan berbagai saluran seperti seminar, pelatihan, media sosial, dan platform digital untuk menjelaskan MBKM. Hal ini memastikan cakupan informasi yang luas dan menjangkau banyak pihak.
- 2) Partisipasi Stakeholder: Banyak pihak terlibat dalam sosialisasi ini, seperti kampus, kementerian terkait, dan masyarakat umum. Ini memperkuat dukungan terhadap kebijakan tersebut.

##### **b. Tantangan:**

- 1) Kesadaran dan Pemahaman Terbatas: Meskipun banyak saluran digunakan, tingkat pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan ini di kalangan

pendidik, mahasiswa, dan orang tua seringkali masih terbatas.

2) Keterbatasan Infrastruktur Digital: Tidak semua institusi pendidikan memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi MBKM secara maksimal, terutama di daerah-daerah terpencil.

c. Pelajaran yang Dapat Diambil:

1) Pentingnya Sosialisasi Terus-Menerus: Sosialisasi tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

2) Pemberdayaan Kampus dan Penguanan Kolaborasi: Universitas dan lembaga pendidikan tinggi harus diberdayakan untuk menyebarkan informasi ini lebih efektif kepada mahasiswa dan masyarakat.

2. Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Transisi antara Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka membutuhkan pendekatan yang hati-hati, karena ini melibatkan perubahan besar dalam cara mengajar dan mengukur hasil belajar (Adla & Maulida, 2023).

a. Kekuatan:

1) Pelatihan Guru yang Intensif: Pemerintah menyediakan berbagai pelatihan untuk guru-guru agar mereka bisa mengimplementasikan kurikulum baru dengan baik.

2) Kurikulum yang Lebih Fleksibel: Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih dalam memilih materi dan metode pengajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

b. Tantangan:

1) Ketidaksiapan Beberapa Guru: Tidak semua guru siap dengan perubahan ini. Banyak guru yang merasa kurang terlatih atau kurang mendalami materi kurikulum baru, yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran.

- 2) Kesulitan dalam Penyebaran Modul: Terkadang, modul dan materi pembelajaran tidak sampai atau tidak diperbarui dengan cepat, sehingga pelaksanaan kurikulum terhambat.
- c. Pelajaran yang Dapat Diambil:
  - 1) Pendampingan yang Berkelanjutan: Selain pelatihan, perlu ada pendampingan yang berkelanjutan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum agar mereka tidak merasa terbebani.
  - 2) Penyebaran Sumber Belajar yang Tepat Waktu: Pemerintah perlu memperhatikan distribusi modul dan bahan ajar yang tepat waktu agar guru dapat mengaksesnya sesuai dengan kebutuhan.

### 3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial. Sosialisasi PIP berfokus pada penyebaran informasi yang tepat sasaran (Kemendikbudristek, 2023).

- a. Kekuatan:
  - 1) Pendekatan Multikanal: PIP disosialisasikan melalui berbagai saluran seperti pertemuan dengan orang tua, brosur, dan kampanye media. Hal ini memudahkan keluarga penerima manfaat untuk mengetahui keberadaan program ini.
  - 2) Fokus pada Penyuluhan: Melalui pertemuan dengan orang tua dan penyuluhan langsung, informasi terkait syarat dan cara mengakses bantuan dapat dipahami dengan lebih jelas.

### b. Tantangan:

- 1) Ketidakmerataan Akses Informasi: Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait PIP, terutama di wilayah terpencil atau kurang berkembang.

- 2) Birokrasi yang Rumit: Proses pengajuan dan pencairan bantuan terkadang terasa rumit dan membingungkan bagi keluarga yang membutuhkan.
- c. Pelajaran yang Dapat Diambil:
  - 1) Peningkatan Akses Informasi: Program-program pemerintah seperti PIP perlu memastikan bahwa saluran informasi dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk daerah terpencil.
  - 2) Simplifikasi Proses: Proses pengajuan dan pencairan bantuan pendidikan harus lebih sederhana dan cepat agar bantuan bisa segera dirasakan oleh yang membutuhkan.

Bab ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya besar dalam sosialisasi kebijakan pendidikan di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam hal pemahaman yang terbatas, infrastruktur yang tidak merata, dan birokrasi yang rumit masih harus diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan, penting untuk terus mengedepankan penyuluhan yang berkelanjutan, pendampingan untuk guru, serta memperkuat saluran informasi agar dapat mencapai semua pihak yang terlibat.

## **D. Evaluasi Dan Implikasi Sosialisasi Kebijakan**

Evaluasi dan implikasi sosialisasi kebijakan sangat penting karena mengevaluasi sejauh mana sosialisasi kebijakan dapat memengaruhi implementasi kebijakan itu sendiri. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam mengenai setiap poin dalam bab ini:

### **1. Indikator Keberhasilan Sosialisasi**

Indikator keberhasilan sosialisasi kebijakan berfungsi untuk mengukur apakah tujuan sosialisasi tercapai dan sejauh mana kebijakan diterima serta diimplementasikan di masyarakat.

#### **Indikator Utama:**

- a. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Pemahaman yang mendalam tentang kebijakan merupakan indikator kunci. Untuk mengevaluasi tingkat pemahaman, dapat dilakukan survei atau wawancara dengan berbagai kelompok masyarakat termasuk pendidik, siswa, orang tua, dan masyarakat umum (Jamal et al., 2021). Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, "Apakah Anda memahami perubahan yang diusung oleh kebijakan ini?" atau "Bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda?"

1) Metode Pengukuran

Survei atau tes pengetahuan mengenai kebijakan yang dapat dilakukan secara periodik untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

b. Partisipasi dalam Implementasi

Indikator kedua adalah seberapa banyak pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan, ini dapat diukur dengan melihat jumlah sekolah yang menerapkan kebijakan, jumlah guru yang mengikuti pelatihan, dan tingkat keikutsertaan siswa dalam program-program yang disarankan oleh kebijakan (Jamal et al., 2021).

1) Metode Pengukuran

Menghitung jumlah sekolah atau individu yang terlibat dalam pelatihan atau kegiatan yang terkait dengan kebijakan.

c. Dampak terhadap Kualitas Pendidikan

Indikator ini berfokus pada perubahan kualitas pendidikan sebagai akibat langsung dari kebijakan yang disosialisasikan. Pengukuran dampak dapat dilakukan melalui evaluasi hasil belajar siswa, perubahan dalam metode pengajaran, serta kualitas kurikulum dan bahan ajar (Tanjung et al., 2025).

1) Metode Pengukuran

Pengukuran dampak bisa menggunakan hasil tes dan penilaian kinerja siswa, serta observasi terhadap cara pengajaran dan kurikulum yang diubah.

## 2. Hambatan yang Dihadapi

Berbagai hambatan dalam sosialisasi kebijakan dapat menghambat pencapaian hasil yang diinginkan. Beberapa hambatan utama yang sering ditemukan adalah:

### Hambatan Utama:

#### a. Kurangnya Akses Informasi

Salah satu hambatan terbesar dalam sosialisasi kebijakan pendidikan adalah kurangnya akses informasi, terutama di daerah terpencil atau masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi. Ini berakibat pada rendahnya tingkat pengetahuan tentang kebijakan dan proses implementasinya.

##### 1) Solusi:

Meningkatkan distribusi informasi melalui berbagai saluran, seperti pertemuan tatap muka di desa-desa, radio komunitas, atau aplikasi berbasis SMS bagi mereka yang tidak memiliki akses internet.

#### b. Keterbatasan Sumber Daya

Banyak lembaga pendidikan, terutama di daerah yang lebih miskin atau kurang berkembang, memiliki keterbatasan sumber daya dalam hal fasilitas, pelatihan, atau infrastruktur teknologi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan secara optimal.

##### 1) Solusi:

Pemerintah dapat menyediakan dana khusus atau bantuan teknis untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah-daerah yang kurang berkembang.

#### c. Resistensi dari Pihak-Pihak Tertentu

Beberapa pihak, terutama mereka yang telah terbiasa dengan sistem atau metode lama, mungkin menentang kebijakan baru. Ini sering terjadi karena adanya ketidakpastian mengenai perubahan, atau rasa takut terhadap perubahan yang dianggap mengancam status quo.

##### 1) Solusi:

Mengadakan forum diskusi dan pelatihan untuk memperjelas manfaat kebijakan dan memberikan waktu transisi yang cukup agar pihak-pihak yang resistensi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan.

### 3. Dampak Sosialisasi terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Sosialisasi yang efektif memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dan inovasi lokal. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik tidak hanya membuat kebijakan diterima, tetapi juga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dari berbagai pihak, yang selanjutnya mendorong pelaksanaan kebijakan yang lebih baik.

Dampak Positif Sosialisasi:

#### a. Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Ketika kebijakan disosialisasikan dengan baik, penerima kebijakan (seperti guru, siswa, dan orang tua) akan lebih siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan karena mereka merasa lebih memahami dan merasa terlibat dalam proses tersebut (Tintingon et al., 2023).

##### 1) Contoh Dampak Positif

Misalnya, dalam kebijakan Merdeka Belajar, sosialisasi yang efektif dapat memastikan bahwa guru memahami prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek dan dapat mengaplikasikan metode baru tersebut dalam kelas.

#### b. Mendorong Inovasi di Tingkat Lokal

Ketika kebijakan diterima dengan baik oleh masyarakat atau lembaga pendidikan, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mencoba mengembangkan inovasi berdasarkan kebijakan tersebut (Tintingon et al., 2023). Misalnya, sekolah-sekolah yang menerima kebijakan kurikulum baru bisa saja mengadaptasi dan mengembangkan metode ajar yang lebih kreatif.

##### 1) Contoh Dampak Inovasi

Di tingkat sekolah, penerapan Kurikulum Merdeka bisa mengarah pada penciptaan model pembelajaran berbasis lokal atau pengembangan kurikulum tematik yang lebih sesuai dengan konteks daerah masing-masing.

Dampak Negatif Sosialisasi (Jika Tidak Efektif):

- a. Ketidakjelasan dan Kebingungannya Peserta Kebijakan

Jika sosialisasi tidak dilaksanakan dengan baik, dapat terjadi kebingungannya para pelaksana kebijakan, seperti guru atau kepala sekolah. Ini bisa mengakibatkan implementasi yang kacau, tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, atau bahkan menimbulkan resistensi terhadap kebijakan (Zantia et al., 2024).

- b. Pemborosan Sumber Daya

Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai kebijakan, bisa terjadi pemborosan sumber daya, baik itu dalam bentuk waktu, uang, maupun tenaga yang tidak efektif dalam mencapai tujuan kebijakan (Zantia et al., 2024).

Evaluasi dan implikasi sosialisasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada indikator keberhasilan yang jelas, pemahaman tentang hambatan yang ada, serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh sosialisasi yang efektif. Melalui evaluasi yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses sosialisasi dan merancang langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, evaluasi ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh pada kualitas pendidikan dan menciptakan inovasi di tingkat lokal.

## **E. Rekomendasi Untuk Proses Sosialisasi Kebijakan Yang Efektif**

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan ini sangat penting, karena rekomendasi yang jelas dan aplikatif akan membantu merancang langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam sosialisasi

kebijakan. Berikut adalah analisis lebih mendalam tentang setiap rekomendasi yang Anda sebutkan:

1. Peningkatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Kolaborasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci untuk memperkuat proses sosialisasi kebijakan pendidikan.

a. Pentingnya Kolaborasi

1) Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan tersebut disosialisasikan dengan efektif. Dalam hal ini, pemerintah harus menjadi motor penggerak dalam menyediakan materi sosialisasi yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak (Rahman et al., 2024, hal. 20).

2) Peran Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Sekolah, guru, dan lembaga pendidikan lainnya bertindak sebagai ujung tombak dalam menerapkan kebijakan. Sekolah harus aktif dalam menerima dan menyebarkan informasi kebijakan kepada siswa dan orang tua mereka (Namora & Bakar, 2021).

3) Peran Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat, baik yang berbasis pada pendidikan atau sosial, dapat berfungsi sebagai penyebar informasi tambahan yang dapat menjangkau kelompok yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin tidak terjangkau oleh media mainstream (Namora & Bakar, 2021).

4) Peran Media

Media massa (termasuk media sosial) memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada publik. Dengan menggunakan media, pemerintah dapat memperluas cakupan sosialisasi dan menciptakan kesadaran publik tentang kebijakan tersebut (Kusnato & Yusuf, 2024).

b. Rekomendasi

- 1) Memperkuat kerjasama melalui forum dialog rutin antara pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat, dan media.
- 2) Membangun jaringan kolaborasi yang lebih struktural, misalnya, dengan membentuk tim komunikasi kebijakan yang terdiri dari berbagai pihak untuk mendukung sosialisasi kebijakan secara lebih holistik.

## 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi menawarkan berbagai cara untuk mempercepat dan mempermudah distribusi informasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan, teknologi dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan interaktivitas antara pemerintah, pendidik, siswa, dan masyarakat.

### a. Pentingnya Pemanfaatan Teknologi (Kusnato & Yusuf, 2024)

#### 1) Kecepatan dan Efisiensi

Teknologi memungkinkan informasi dapat disebarluaskan secara cepat melalui berbagai platform, seperti situs web pemerintah, aplikasi, email, dan media sosial. Ini sangat penting dalam dunia yang semakin digital.

#### 2) Akses yang Lebih Luas

Teknologi dapat mengatasi hambatan geografis, memungkinkan sosialisasi kebijakan sampai ke daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak dijangkau oleh metode sosialisasi konvensional.

#### 3) Interaktivitas

Dengan memanfaatkan platform teknologi, seperti webinar atau forum diskusi online, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan atau ahli dalam bidang pendidikan untuk memperjelas hal-hal terkait kebijakan.

### b. Rekomendasi

- 1) Pengembangan platform digital yang terintegrasi untuk menyebarkan informasi kebijakan secara terstruktur, termasuk e-learning, video penjelasan, dan forum diskusi online.
  - 2) Menggunakan aplikasi mobile dan media sosial untuk memberikan update kebijakan secara real-time kepada guru, orang tua, dan masyarakat umum.
3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik adalah garda terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga pendidik sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah disosialisasikan (Utama, 2017).

a. Pentingnya Pengembangan Profesional

1) Kesiapan untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Pelatihan yang memadai akan memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan baru dengan baik. Misalnya, dalam kebijakan Kurikulum Merdeka, guru harus terlatih dalam menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran yang lebih berbasis pada kompetensi.

2) Peningkatan Kualitas Pengajara

Guru yang terlatih dengan baik tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dengan cara yang inovatif di dalam kelas, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Rekomendasi

- 1) Menyusun program pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, baik dalam bentuk lokakarya, seminar, atau kursus online yang relevan dengan kebijakan yang sedang disosialisasikan.
- 2) Meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelatihan untuk memastikan

penerapan pelatihan tersebut dalam praktik mengajar sehari-hari.

#### 4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik di lapangan. Monitoring yang baik memungkinkan identifikasi masalah sejak dini, serta memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian sebelum masalah menjadi besar (Humas, 2015).

##### a. Pentingnya Monitoring dan Evaluasi:

###### 1) Menilai Efektivitas Sosialisasi

Dengan melakukan monitoring secara rutin, pemerintah dan pihak terkait dapat menilai sejauh mana kebijakan telah dipahami oleh masyarakat dan sejauh mana implementasinya berjalan.

###### 2) Identifikasi Masalah Sejak Dini

Monitoring memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan, seperti kurangnya pemahaman atau resistensi, dan segera mengambil langkah perbaikan.

###### 3) Mengukur Dampak Kebijakan

Evaluasi membantu untuk mengukur dampak sosial dan pendidikan dari kebijakan yang diterapkan, dan apakah kebijakan tersebut mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

##### b. Rekomendasi

- 1) Mengembangkan sistem monitoring yang transparan dan terstandarisasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses evaluasi, mulai dari sekolah hingga tingkat masyarakat.
- 2) Memanfaatkan data yang ada (misalnya, hasil ujian siswa, tingkat keikutsertaan dalam pelatihan guru, dan tingkat partisipasi orang tua) untuk

mengevaluasi dampak kebijakan dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan yang kurang optimal.

Bab ini memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif untuk memperbaiki dan memperkuat proses sosialisasi kebijakan pendidikan. Melalui peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan penguatan monitoring serta evaluasi, sosialisasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih efektif. Semua langkah ini akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan pendidikan, menciptakan pemahaman yang lebih luas di masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## **F. Konteks Sosial, Politik, dan Budaya dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan**

Sosialisasi kebijakan pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa. Proses ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya di suatu masyarakat. Pemahaman tentang konteks ini penting untuk memastikan kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan efektif. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut:

### **1. Pengaruh Konteks Sosial**

Konteks sosial mencakup struktur masyarakat, hubungan antarkelompok, dan norma sosial yang berlaku. Dalam sosialisasi kebijakan pendidikan, beberapa faktor sosial yang memengaruhi meliputi:

#### **a. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung lebih mudah memahami kebijakan baru dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, penyampaian kebijakan harus mempertimbangkan keberagaman tingkat literasi masyarakat (Sari & Yasin, 2024).

#### **b. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi**

Kebijakan pendidikan sering kali dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan sosial dan ekonomi (Sari &

Yasin, 2024). Misalnya, kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) mungkin lebih sulit disosialisasikan di daerah terpencil dengan keterbatasan akses terhadap informasi.

c. Peran Komunitas Lokal

Komunitas lokal, seperti kelompok agama atau adat, memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi penerimaan kebijakan. Kolaborasi dengan komunitas ini dapat membantu mempercepat proses sosialisasi.

2. Pengaruh Konteks Politik

Dinamika politik memiliki dampak signifikan terhadap sosialisasi kebijakan pendidikan. Beberapa faktor politik yang perlu diperhatikan adalah: (Ishak, 2021).

a. Kebijakan sebagai Alat Politik

Di beberapa kasus, kebijakan pendidikan digunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

b. Stabilitas Politik

Stabilitas politik sangat penting untuk memastikan proses sosialisasi berjalan lancar. Dalam situasi politik yang tidak stabil, perhatian masyarakat dapat terpecah sehingga memengaruhi penerimaan kebijakan.

c. Komitmen Pemerintah

Keberhasilan sosialisasi kebijakan pendidikan membutuhkan komitmen yang konsisten dari pemerintah pusat dan daerah. Komunikasi yang terputus antara tingkat pemerintahan dapat menghambat proses sosialisasi.

3. Pengaruh Konteks Budaya

Budaya merupakan landasan nilai, kepercayaan, dan praktik dalam masyarakat yang memengaruhi cara mereka merespons kebijakan pendidikan. Elemen budaya yang memengaruhi sosialisasi kebijakan meliputi: (Nopriyadi, 2022).

a. Norma dan Tradisi Lokal

Kebijakan pendidikan yang tidak selaras dengan norma atau tradisi lokal mungkin akan menghadapi resistensi. Contohnya, pengenalan kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan praktik pembelajaran tradisional di daerah tertentu.

b. Bahasa

Bahasa adalah alat utama dalam sosialisasi kebijakan. Di masyarakat yang multibahasa, penyampaian kebijakan harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh seluruh kelompok masyarakat.

c. Peran Tokoh Budaya

Tokoh budaya, seperti pemimpin adat atau tokoh agama, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Melibatkan mereka dalam proses sosialisasi dapat meningkatkan penerimaan kebijakan.

#### 4. Strategi Menyesuaikan Sosialisasi dengan Konteks

Agar sosialisasi kebijakan pendidikan dapat berjalan efektif dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya, diperlukan strategi khusus, seperti:

a. Pendekatan Partisipatif

Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses sosialisasi untuk memastikan kebijakan dapat diterima dengan baik.

b. Penyesuaian Konten dengan Budaya Lokal

Menyesuaikan pesan kebijakan dengan nilai dan tradisi lokal agar lebih mudah dipahami dan diterima.

c. Penggunaan Saluran Informasi yang Relevan

Menggunakan saluran komunikasi yang relevan dengan kelompok sasaran, seperti media lokal, forum komunitas, atau teknologi digital, sesuai dengan konteks yang berlaku.

d. Pemetaan Sosial dan Budaya

Melakukan pemetaan sosial dan budaya sebelum sosialisasi untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi resistensi di masyarakat.

Kesimpulannya yaitu konteks sosial, politik, dan budaya memainkan peran krusial dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan. Memahami dan menyesuaikan strategi sosialisasi dengan elemen-elemen ini adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks, kebijakan pendidikan tidak hanya akan lebih mudah diterima tetapi juga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat.

## **G. Peran Pemangku Kepentingan dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan**

Sosialisasi kebijakan pendidikan adalah proses yang melibatkan banyak pihak. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran unik dan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa kebijakan diterima, dipahami, dan diimplementasikan dengan baik (Baharuddin, 2023). Berikut adalah rincian peran dari berbagai pemangku kepentingan utama dalam proses ini:

### **1. Pemerintah**

Sebagai aktor utama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberhasilan sosialisasi.

#### **a. Pemerintah Pusat**

- 1) Pembuatan Kebijakan: Merancang kebijakan yang relevan dan kontekstual.
- 2) Koordinasi Nasional: Mengarahkan strategi sosialisasi pada tingkat nasional untuk menciptakan keseragaman pemahaman.
- 3) Penggunaan Media Massa dan Digital: Menyampaikan informasi melalui televisi, radio, media sosial, dan situs web resmi.

#### **b. Pemerintah Daerah**

- 1) Adaptasi Kebijakan: Menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal.

- 2) Penyediaan Fasilitas dan Dukungan: Memastikan bahwa sumber daya, seperti dana dan tenaga ahli, tersedia untuk mendukung sosialisasi.
- 3) Monitoring dan Evaluasi Lokal: Menilai efektivitas sosialisasi pada tingkat daerah.

## 2. Lembaga Pendidikan

Institusi pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan pusat pelatihan, memainkan peran penting sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat.

- a. Kepala Sekolah dan Manajemen Lembaga
  - 1) Pimpin Implementasi: Membimbing staf dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan.
  - 2) Fasilitator Informasi: Menyampaikan informasi kepada guru, siswa, dan orang tua.
- b. Guru dan Tenaga Pendidik
  - 1) Penyampai Informasi: Menjelaskan kebijakan kepada siswa dan orang tua melalui pembelajaran dan kegiatan sekolah.
  - 2) Pengimplementasi Kebijakan: Melaksanakan kebijakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti pembelajaran berbasis kurikulum baru.
  - 3) Pemberi Masukan: Memberikan umpan balik tentang efektivitas kebijakan kepada pemerintah.

## 3. Masyarakat dan Orang Tua

Masyarakat umum dan orang tua memiliki peran penting sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan pendidikan.

- a. Orang Tua
  - 1) Penerima Informasi: Memahami kebijakan yang diterapkan pada anak-anak mereka.
  - 2) Pendorong Partisipasi: Mendorong anak untuk berpartisipasi dalam program kebijakan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
  - 3) Pemberi Masukan Lokal: Menyampaikan kebutuhan atau keluhan kepada pihak sekolah atau pemerintah.
- b. Komunitas Lokal

- 1) Penyebar Informasi: Melalui pertemuan masyarakat atau forum lokal, komunitas dapat membantu menyebarkan informasi kebijakan.
- 2) Pengawal Kebijakan: Membantu memastikan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.

#### 4. Media

Media berfungsi sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

- a. Media Tradisional (Televisi, Radio, Surat Kabar)
  - 1) Kampanye Sosialisasi: Menyampaikan informasi kebijakan melalui iklan, berita, atau program khusus.
  - 2) Penciptaan Opini Publik: Membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan melalui analisis dan diskusi.
- b. Media Digital (Media Sosial, Situs Web, Aplikasi)
  - 1) Jangkauan Luas dan Cepat: Menyebarluaskan informasi secara real-time dan kepada audiens yang lebih besar.
  - 2) Interaktivitas: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan bertanya tentang kebijakan.

#### 5. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Non-Pemerintah (LSM)

Organisasi masyarakat dan LSM memainkan peran strategis dalam menjembatani pemerintah dengan kelompok masyarakat tertentu, terutama yang kurang terjangkau oleh media utama.

- a. Advokasi Kebijakan
  - 1) Membantu mengedukasi masyarakat tentang manfaat kebijakan pendidikan.
  - 2) Mengadvokasi adaptasi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan lokal.
- b. Pendampingan Masyarakat
  - 1) Memberikan pelatihan atau bimbingan untuk membantu masyarakat memahami kebijakan.

- 2) Memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan akses yang setara terhadap informasi dan manfaat kebijakan.

## 6. Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat

Tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pemimpin adat memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat terhadap kebijakan pendidikan.

### a. Pemimpin Opini

- 1) Mendorong penerimaan kebijakan melalui pengaruh mereka di komunitas.
- 2) Menjadi panutan dalam pelaksanaan kebijakan.

### b. Mediator Budaya

- 1) Menyesuaikan bahasa atau pendekatan kebijakan agar lebih relevan dengan budaya lokal.

Kesimpulannya, keberhasilan sosialisasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Setiap pihak memiliki kontribusi yang unik dan saling melengkapi dalam memastikan informasi kebijakan tersebar dengan efektif, dipahami dengan baik, dan diimplementasikan dengan lancar. Dengan membangun kerja sama yang kuat di antara para pemangku kepentingan ini, kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

## **H. Inovasi dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan**

Proses sosialisasi kebijakan pendidikan membutuhkan inovasi untuk mengatasi berbagai tantangan seperti jangkauan informasi, keterbatasan sumber daya, dan keberagaman masyarakat. Dalam era digital dan transformasi sosial yang cepat, pendekatan inovatif sangat diperlukan untuk memastikan pesan kebijakan dapat diterima, dipahami, dan diterapkan dengan efektif. Berikut adalah kajian mendalam mengenai inovasi dalam sosialisasi kebijakan pendidikan:

### 1. Penggunaan Teknologi Digital

Kemajuan teknologi telah membuka berbagai peluang untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan (Ambarwati et al., 2022).

a. Media Sosial

- 1) Platform Utama: Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok digunakan untuk menyebarkan informasi kebijakan dengan cara yang menarik, seperti melalui infografis, video pendek, atau siaran langsung.
- 2) Target yang Tepat: Fitur seperti iklan berbayar memungkinkan informasi menjangkau kelompok sasaran tertentu, misalnya guru, siswa, atau orang tua.
- 3) Interaktivitas: Komunikasi dua arah melalui komentar, pesan langsung, atau polling meningkatkan keterlibatan masyarakat.

b. Aplikasi Khusus Kebijakan

- 1) Pemberdayaan Guru dan Orang Tua: Aplikasi seperti Belajar.id atau SIMPATIKA memberikan akses langsung ke kebijakan, pelatihan, dan sumber daya terkait.
- 2) Pelaporan dan Monitoring: Aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan implementasi kebijakan di tingkat lokal secara real-time.

c. Situs Web Resmi

- 1) Pusat Informasi: Situs web resmi dari pemerintah atau institusi pendidikan menyediakan informasi kebijakan dalam berbagai format, seperti dokumen PDF, video tutorial, dan FAQ.
- 2) Penyediaan Materi Pelatihan: Modul pelatihan online untuk guru dan tenaga pendidik yang memungkinkan pembelajaran mandiri.

2. Kampanye Sosialisasi Berbasis Data

Penggunaan data dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan memberikan keunggulan berupa efisiensi dan efektivitas (Handoko et al., 2024).

a. Analisis Big Data

- 1) Menggunakan data besar untuk memahami pola perilaku masyarakat dalam mengakses informasi.
- 2) Menganalisis umpan balik dari masyarakat untuk menyesuaikan strategi komunikasi.

b. Pemetaan Sasaran

- 1) Membuat peta demografis untuk mengidentifikasi kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam sosialisasi, seperti daerah terpencil atau komunitas dengan akses terbatas ke teknologi.

c. Survei dan Evaluasi Berbasis Digital

- 1) Melakukan survei melalui platform digital untuk mengukur pemahaman masyarakat tentang kebijakan.
- 2) Menggunakan alat evaluasi berbasis teknologi untuk menilai efektivitas kampanye sosialisasi.

3. Pendekatan Kreatif dalam Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi kebijakan yang inovatif dapat meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat.

a. Infografis dan Animasi

- 1) Menyajikan informasi kebijakan yang kompleks dalam bentuk visual yang sederhana dan menarik.
- 2) Animasi video pendek dapat menjelaskan inti kebijakan secara efektif dalam waktu singkat.

b. Storytelling dan Narasi Personal

- 1) Menggunakan kisah nyata dari individu yang telah merasakan manfaat kebijakan, seperti penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), untuk menciptakan dampak emosional.
- 2) Narasi personal dapat disampaikan melalui media sosial atau video dokumenter.

c. Game Edukatif

- 1) Membuat permainan interaktif yang mengajarkan inti dari kebijakan, seperti simulasi pengelolaan dana pendidikan.
- 2) Game berbasis aplikasi dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan guru.

#### 4. Pendekatan Partisipatif

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi dapat memperkuat penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan.

##### a. Forum Diskusi Digital

- 1) Mengadakan webinar atau diskusi daring yang melibatkan pemangku kepentingan untuk membahas kebijakan.
- 2) Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pembuat kebijakan.

##### b. Kompetisi Ide dan Konten

- 1) Mengadakan lomba video, esai, atau konten kreatif lainnya yang bertema kebijakan pendidikan.
- 2) Masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berkontribusi dalam menyampaikan informasi kebijakan dengan cara yang kreatif.

##### c. Keterlibatan Komunitas Lokal

- 1) Menggunakan pendekatan bottom-up, di mana masyarakat lokal diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait kebijakan.
- 2) Melibatkan tokoh masyarakat dalam merancang strategi sosialisasi.

#### 5. Kolaborasi dengan Mitra Non-Tradisional

Kolaborasi dengan pihak di luar institusi pendidikan tradisional dapat memperluas jangkauan sosialisasi kebijakan.

##### a. Kerja Sama dengan Media dan Influencer

- 1) Menggunakan jangkauan media massa dan media sosial untuk menyampaikan kebijakan.

- 2) Influencer yang relevan, seperti pendidik atau figur publik, dapat menyampaikan pesan kebijakan kepada pengikut mereka.
- b. Kolaborasi dengan Sektor Swasta
  - 1) Perusahaan teknologi dapat membantu dalam pengembangan aplikasi atau platform untuk sosialisasi kebijakan.
  - 2) Sponsor dari sektor swasta dapat mendukung program sosialisasi dalam bentuk pendanaan atau sumber daya.
- c. Lembaga Keagamaan dan Adat
  - 1) Melibatkan lembaga ini dalam menyebarkan informasi kebijakan yang relevan dengan nilai-nilai lokal.

## 6. Pendekatan Hybrid (Offline dan Online)

Menggabungkan metode tradisional dan digital untuk menjangkau masyarakat secara luas (Umaroh et al., 2021).

- a. Sosialisasi Tatap Muka
  - 1) Workshop, seminar, dan pelatihan tatap muka tetap diperlukan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi.
  - 2) Diskusi langsung dapat memperdalam pemahaman tentang kebijakan.
- b. Pendekatan Multisaluran
  - 1) Menggunakan kombinasi saluran informasi, seperti poster, radio lokal, dan media sosial, untuk memastikan jangkauan yang merata.

Kesimpulannya, inovasi dalam sosialisasi kebijakan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses ini. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pendekatan berbasis data, dan strategi kreatif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mendalam. Pendekatan partisipatif dan kolaborasi lintas sektor juga membantu menciptakan dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan. Dalam era perubahan yang cepat, inovasi harus terus berkembang untuk memastikan

bahwa kebijakan pendidikan dapat berdampak positif dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

## **I. Implikasi Sosialisasi Kebijakan terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Sosialisasi kebijakan pendidikan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap berbagai aspek kualitas pendidikan, termasuk aksesibilitas, relevansi, efisiensi, dan hasil pembelajaran (Adima, 2021). Dalam konteks ini, kajian mendalam mengenai implikasi sosialisasi kebijakan penting untuk memahami bagaimana proses ini dapat memengaruhi keberhasilan sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah analisis rinci implikasi tersebut:

### **1. Implikasi terhadap Pemahaman dan Dukungan Masyarakat**

Sosialisasi kebijakan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat kebijakan pendidikan (Risnawati et al., 2024).

#### **a. Peningkatan Kesadaran Publik**

- 1) Informasi yang disampaikan secara tepat dan jelas melalui berbagai saluran komunikasi membantu masyarakat memahami kebijakan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kurikulum Merdeka.
- 2) Pemahaman yang lebih baik mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan.

#### **b. Mengurangi Resistensi**

- 1) Sosialisasi yang baik dapat mengurangi resistensi dari pihak-pihak tertentu, seperti guru atau orang tua yang skeptis terhadap perubahan kebijakan.
- 2) Dengan menyertakan penjelasan yang rasional dan transparansi dalam proses sosialisasi, resistensi dapat diubah menjadi dukungan.

### **2. Implikasi terhadap Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Pendidik**

Guru dan tenaga pendidik adalah aktor utama dalam implementasi kebijakan pendidikan (Baharuddin, 2023).

a. Pengembangan Profesional

- 1) Sosialisasi kebijakan sering kali disertai pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan kebijakan baru.
- 2) Misalnya, pelatihan Kurikulum Merdeka membantu guru memahami konsep pembelajaran berbasis proyek dan asesmen formatif.

b. Motivasi dan Kepercayaan Diri

- 1) Informasi yang disampaikan dengan baik melalui sosialisasi dapat meningkatkan motivasi guru untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan.
- 2) Guru yang merasa didukung oleh pemerintah lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kebijakan.

3. Implikasi terhadap Implementasi Kebijakan

Efektivitas sosialisasi secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Tanjung et al., 2025).

a. Konsistensi dalam Pelaksanaan

- 1) Sosialisasi yang merata dan menyeluruh membantu mengurangi kesenjangan implementasi antara daerah perkotaan dan pedesaan.
- 2) Informasi yang jelas dan seragam memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan.

b. Adaptasi Kebijakan di Tingkat Lokal

- 1) Dalam proses sosialisasi, pemerintah dapat menerima umpan balik dari masyarakat, yang memungkinkan penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 2) Hal ini meningkatkan relevansi kebijakan di berbagai konteks geografis dan budaya.

4. Implikasi terhadap Partisipasi dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Sosialisasi yang inklusif dapat memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan.

a. Partisipasi Orang Tua dan Komunitas

- 1) Melalui sosialisasi, orang tua lebih memahami peran mereka dalam mendukung pendidikan anak, misalnya melalui pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan pendidikan seperti PIP.
- 2) Komunitas lokal juga dapat dilibatkan untuk mendukung program pendidikan berbasis budaya lokal.

b. Sinergi Antar Lembaga

- 1) Sosialisasi yang melibatkan pemerintah, sekolah, LSM, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang memperkuat pelaksanaan kebijakan.
- 2) Kolaborasi lintas sektor memastikan sumber daya dan dukungan yang lebih luas untuk implementasi kebijakan.

5. Implikasi terhadap Hasil Belajar Siswa

Hasil akhir dari kebijakan pendidikan adalah peningkatan kualitas pembelajaran siswa (Umaroh et al., 2021).

a. Peningkatan Relevansi Pembelajaran

- 1) Sosialisasi yang baik membantu guru memahami bagaimana kebijakan, seperti Kurikulum Merdeka, dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.
- 2) Pembelajaran berbasis proyek dan integrasi budaya lokal menjadi lebih efektif jika guru memahami kebijakan secara mendalam.

b. Akses yang Lebih Luas

- 1) Melalui sosialisasi, program seperti PIP dapat menjangkau siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga meningkatkan akses terhadap pendidikan.
- 2) Hal ini berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah.

6. Implikasi terhadap Sistem Pendidikan Secara Keseluruhan

Dampak jangka panjang dari sosialisasi kebijakan pendidikan mencakup perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan.

a. Efisiensi Operasional

- 1) Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, pelaksanaan program pendidikan menjadi lebih efisien, baik dalam penggunaan sumber daya maupun waktu.
- 2) Misalnya, penggunaan teknologi untuk sosialisasi dapat mengurangi biaya kampanye tatap muka yang intensif.

b. Penguatan Akuntabilitas

- 1) Sosialisasi menciptakan transparansi, sehingga masyarakat dapat memantau pelaksanaan kebijakan dan meminta pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan.
- 2) Akuntabilitas ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

c. Inovasi Berkelanjutan

- 1) Proses sosialisasi juga dapat memunculkan ide-ide baru dari pemangku kepentingan, yang kemudian menjadi dasar untuk inovasi kebijakan di masa depan.

## 7. Implikasi Terhadap Peningkatan Kebijakan di Masa Depan

Sosialisasi kebijakan memberikan pelajaran penting bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan berikutnya.

a. Evaluasi Berbasis Data

- 1) Umpulan yang diperoleh dari proses sosialisasi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan di masa depan.
- 2) Data tentang keberhasilan dan tantangan dalam sosialisasi dapat digunakan untuk menyempurnakan metode komunikasi kebijakan.

b. Pengembangan Kebijakan yang Lebih Responsif

- 1) Kebijakan baru dapat dirancang dengan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

berdasarkan masukan yang diperoleh selama proses sosialisasi kebijakan sebelumnya.

Kesimpulannya, implikasi sosialisasi kebijakan terhadap kualitas pendidikan sangat luas dan signifikan. Proses ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan terus melakukan evaluasi, sosialisasi kebijakan dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan sistem pendidikan yang relevan, efisien, dan berkualitas tinggi. Inovasi dalam sosialisasi harus terus dikembangkan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

## **J. Peran Komunikasi yang Efektif dalam Sosialisasi Kebijakan Pendidikan**

Komunikasi merupakan inti dari sosialisasi kebijakan pendidikan (Khoirul Syani et al., 2017). Proses ini tidak hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan interaksi yang mendalam antara pembuat kebijakan dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman bersama. Peran komunikasi yang efektif menjadi sangat penting dalam memastikan kebijakan dapat diterima, dipahami, dan diterapkan dengan baik (Simamora et al., 2024). Berikut adalah kajian rinci mengenai peran komunikasi dalam konteks sosialisasi kebijakan pendidikan.

### **1. Komunikasi sebagai Fondasi Sosialisasi**

Komunikasi merupakan elemen dasar yang menentukan keberhasilan sosialisasi kebijakan .

#### **a. Menyampaikan Pesan dengan Jelas**

1) Kebijakan sering kali mengandung istilah teknis dan konsep yang kompleks. Komunikasi yang efektif menyederhanakan pesan tanpa kehilangan maknanya (Ayuningtyas & Rahman, 2019).

- 2) Contohnya, konsep Kurikulum Merdeka dijelaskan melalui infografis dan video pendek yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.
- b. Membangun Kepercayaan
  - 1) Transparansi dalam komunikasi menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
  - 2) Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang jujur, dukungan terhadap kebijakan meningkat.
2. Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi KebijakanKomunikasi yang efektif membutuhkan strategi yang dirancang untuk mencapai target audiens secara spesifik (Suhairi et al., 2023).
  - a. Segmentasi Audiens
    - 1) Setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan informasi yang berbeda.
    - 2) Contoh: Guru membutuhkan pelatihan teknis, sementara orang tua perlu memahami bagaimana kebijakan berdampak pada anak mereka.
  - b. Pesan yang Disesuaikan
    - 1) Komunikasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan budaya setempat lebih mudah diterima.
    - 2) Dalam sosialisasi kebijakan di daerah terpencil, pesan sering kali disampaikan dalam bahasa lokal untuk meningkatkan pemahaman.
  - c. Penggunaan Saluran yang Tepat
    - 1) Kombinasi saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, dan tatap muka, memastikan jangkauan yang luas.
    - 2) Di daerah perkotaan, media digital mungkin lebih efektif, sedangkan di pedesaan, pertemuan langsung dan radio lokal lebih relevan.
3. Komunikasi Dua ArahProses komunikasi yang melibatkan interaksi dua arah lebih efektif dalam menciptakan pemahaman yang mendalam (Dewi et al., 2024, hal. 1).

- a. Diskusi dan Konsultasi Publik
    - 1) Forum diskusi, baik secara daring maupun luring, memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, masukan, dan kekhawatiran mereka.
    - 2) Contohnya, webinar tentang Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk bertanya langsung kepada pembuat kebijakan.
  - b. Umpang Balik dan Penyesuaian
    - 1) Komunikasi dua arah memungkinkan pemerintah menerima umpan balik yang berharga untuk menyempurnakan kebijakan.
    - 2) Masukan dari masyarakat dapat membantu menyesuaikan implementasi kebijakan dengan kebutuhan lokal.
4. Teknologi dan Inovasi dalam Komunikasi
- Teknologi memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan komunikasi kebijakan (Dewi et al., 2024, hal. 157).
- a. Media Sosial dan Platform Digital
    - 1) Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok digunakan untuk menyampaikan informasi kebijakan melalui konten kreatif seperti video pendek dan infografis.
    - 2) Kampanye berbasis tagar (#) mempermudah masyarakat mencari informasi terkait kebijakan tertentu.
  - b. Webinar dan Aplikasi Interaktif
    - 1) Webinar memungkinkan pembahasan kebijakan secara langsung kepada audiens yang tersebar di berbagai lokasi.
    - 2) Aplikasi interaktif, seperti SIMPATIKA untuk guru, membantu penyampaian informasi secara personal dan langsung.
  - c. AI dan Chatbot

- 1) Penggunaan chatbot dalam website resmi pendidikan memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi instan terkait kebijakan.
- 2) Contohnya, chatbot yang memberikan jawaban atas pertanyaan umum tentang Program Indonesia Pintar (PIP).

## 5. Komunikasi Berbasis Budaya dan Lokalitas

Masyarakat Indonesia yang beragam membutuhkan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal (Suherman & Sirajuddin, 2018).

### a. Penggunaan Bahasa Lokal

- 1) Penyampaian informasi dalam bahasa lokal membantu menjembatani kesenjangan bahasa, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi rendah.
- 2) Contohnya, sosialisasi PIP di Papua dilakukan menggunakan bahasa daerah untuk memastikan pesan dapat diterima dengan baik.

### b. Melibatkan Tokoh Masyarakat dan Pemimpin Lokal

- 1) Tokoh masyarakat seperti kepala desa, ulama, atau pemimpin adat sering kali menjadi perantara yang efektif dalam menyampaikan informasi kebijakan.
- 2) Pemimpin lokal memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan.

## 6. Hambatan dalam Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas (Dewi et al., 2024, hal. 61).

### a. Kurangnya Infrastruktur Komunikasi

- 1) Di daerah terpencil, keterbatasan akses internet dan alat komunikasi menghambat penyampaian informasi.
- 2) Alternatif seperti radio lokal dan pertemuan langsung menjadi solusi untuk daerah dengan akses teknologi terbatas.

b. Distorsi Pesan

- 1) Informasi yang tidak disampaikan secara jelas atau mengalami distorsi selama proses komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman.
- 2) Penggunaan panduan tertulis dan visual yang konsisten membantu mengurangi risiko ini.

c. Resistensi terhadap Perubahan

- 1) Beberapa pihak, seperti guru yang telah terbiasa dengan sistem lama, mungkin menunjukkan resistensi terhadap kebijakan baru.
- 2) Komunikasi yang melibatkan empati dan penjelasan manfaat jangka panjang dapat mengurangi resistensi.

7. Indikator Keberhasilan Komunikasi dalam Sosialisasi

Keberhasilan komunikasi dalam sosialisasi kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator (Imronah, 2009).

a. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Survei atau wawancara dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami kebijakan yang disosialisasikan.

b. Tingkat Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam program kebijakan, seperti pelatihan atau kegiatan berbasis kebijakan, mencerminkan keberhasilan komunikasi.

c. Perubahan Sikap dan Perilaku

Sikap yang lebih positif terhadap kebijakan dan penerapan langsung dalam praktik sehari-hari menunjukkan efektivitas komunikasi.

8. Dampak Komunikasi yang Efektif pada Keberhasilan Kebijakan

Komunikasi yang baik berkontribusi langsung pada keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan (Nani, 2021).

a. Mempercepat Implementasi

Informasi yang jelas dan tepat waktu meminimalkan kebingungan di tingkat pelaksana, seperti guru dan sekolah.

b. Meningkatkan Dukungan Publik

Dukungan masyarakat yang kuat terhadap kebijakan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan program pendidikan.

c. Mendorong Kolaborasi

Komunikasi yang inklusif mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Kesimpulan, komunikasi yang efektif adalah elemen kunci dalam keberhasilan sosialisasi kebijakan pendidikan. Dengan strategi yang tepat, penggunaan teknologi, dan pendekatan berbasis budaya, proses komunikasi dapat menciptakan pemahaman, dukungan, dan partisipasi yang lebih baik dari masyarakat. Penting untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan metode komunikasi agar kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak positif secara maksimal pada sistem pendidikan nasional.

## **K. Kesimpulan**

Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan elemen krusial dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam pembahasan dari poin A hingga L, kita telah menguraikan berbagai aspek yang mencakup dasar konseptual, strategi, implementasi, evaluasi, dan transformasi proses sosialisasi di era digital. Berikut adalah kesimpulan akhir dari keseluruhan pembahasan:

1. Pentingnya Pemahaman Dasar: Pemahaman yang kuat tentang konsep dasar sosialisasi kebijakan dan bagaimana kebijakan pendidikan dirancang merupakan fondasi bagi keberhasilan implementasi. Sosialisasi yang efektif harus berakar pada prinsip inklusivitas, keadilan, dan adaptabilitas terhadap dinamika masyarakat.

2. Strategi yang Efektif: Strategi yang digunakan dalam sosialisasi harus disesuaikan dengan karakteristik audiens. Metode komunikasi yang variatif, mulai dari pendekatan tradisional hingga digital, menjadi kunci penting. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial memperluas jangkauan sosialisasi, terutama kepada generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.
3. Pelajaran dari Studi Kasus: Studi kasus sosialisasi kebijakan seperti Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kurikulum Merdeka, dan Program Indonesia Pintar menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down. Tantangan seperti resistensi perubahan dan keterbatasan sumber daya harus diatasi dengan pelatihan dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan.
4. Evaluasi dan Implikasi: Evaluasi yang berkelanjutan adalah langkah esensial untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari proses sosialisasi. Hambatan seperti kurangnya akses informasi dan resistensi dapat diminimalkan melalui monitoring yang intensif dan inovasi strategi komunikasi.
5. Rekomendasi untuk Peningkatan: Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kapasitas tenaga pendidik merupakan rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi. Monitoring dan evaluasi yang sistematis memungkinkan deteksi dini terhadap masalah dan penyesuaian strategi.
6. Dimensi Global dan Lokal: Sosialisasi kebijakan tidak hanya melibatkan konteks lokal tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman global sebagai referensi. Adaptasi lokal terhadap kebijakan global membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan kebutuhan masyarakat setempat.
7. Partisipasi dan Inklusivitas: Partisipasi aktif dari masyarakat, guru, siswa, dan orang tua merupakan inti

dari sosialisasi yang inklusif. Upaya untuk melibatkan kelompok marginal dan daerah terpencil memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan pendidikan.

8. Inovasi dan Keberlanjutan: Transformasi digital membuka peluang besar untuk inovasi dalam sosialisasi kebijakan. Namun, kesenjangan digital dan literasi teknologi harus diatasi untuk menjamin inklusivitas. Pendekatan berkelanjutan, seperti pengembangan ekosistem berbasis teknologi, membantu menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi sistem pendidikan.

Sosialisasi kebijakan pendidikan adalah proses yang kompleks, membutuhkan perencanaan strategis, pelaksanaan yang kolaboratif, dan evaluasi berkelanjutan. Setiap langkah dalam proses ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan tantangan zaman. Dengan memanfaatkan pendekatan yang adaptif, inovatif, dan inklusif, sosialisasi kebijakan dapat menjadi katalisator untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil, relevan, dan berkelanjutan. Era digital memberikan peluang emas untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan, tetapi keberhasilan akhir tetap tergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adima, M. Z. F. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. *Muntazam: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2), 43–46.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35706/muntazam.v2i2.5878>

- Adla, S. R., & Maulida, S. T. (2023). Transisi Kurikulum K13 Dengan Kurikulum Merdeka Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(2), 262–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/lencana.v1i2.1518>
- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyiadanti, H., & Susanti, S. (2022). Studi Literatur: Peran Inovasi Pendidikan pada Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173–184. <https://doi.org/10.21831/jitp.v8i2.43560>
- Arwidayanto, A., Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. CV Cendekia Press.
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. (2019). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Implementasi Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Conference on Public Administration and Society*, 1(1), 10–27. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/view/29>
- Baharuddin, B. (2023). *Perencanaan Pendidikan* (B. Burhan & M. H. Aqli (ed.)). Ruang Karya Bersama. <http://repository.unismabekasi.ac.id/4647/1/Naskah Gabungan Perencanaan Pendidikan-1.pdf>
- Dewi, R. D. C., Ismaya, I., Masduki, D., Yusuf, Y. M., Fitrananda, C. A., Syahdan, S., Bulkis, B., Akbar, M. F., Sugandi, M. S., & Hartati, S. (2024). *Pemahaman Komunikasi: Mengartikan Pesan Dengan Tepat*. GET PRESS INDONESIA. <https://sipora.polje.ac.id/34687/1/PEMAHAMAN KOMUNIKASI Mengartikan Pesan Dengan Tepat.pdf>

- Handoko, W., Iqbal, M., & Harahap, I. R. (2024). Sosialisasi Digitalisasi Data Dalam Upaya Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Pada Disdagper Kota Tanjungbalai. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1), 06–10. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.208>
- Haryanto, H. (2018). *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal* (H. Mada (ed.); 1 ed.). PolGov. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/sosialisasi-politik.pdf>
- Hendrawati, T., Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Yustiva, F., & Masquroh, H. (2024). Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Proses Dan Strategi Pendidikan. *Technical and Vacational Education International Journal*, 4(1), 1439–1448. <https://doi.org/https://doi.org/10.556442/taveij.v4i1.593>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *JURNAL ILMIAH WAWASAN INSAN AKADEMIK*, 1(3), 13–25. [https://www.researchgate.net/publication/337485273\\_Sosialisasi\\_Kebijakan\\_Publik\\_Pengertian\\_dan\\_Konsep\\_Dasar](https://www.researchgate.net/publication/337485273_Sosialisasi_Kebijakan_Publik_Pengertian_dan_Konsep_Dasar)
- Humas. (2015). *Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah*. Sekretariat Kabinit Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>
- Imronah, I. (2009). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos*, 1–19. <https://www.neliti.com/id/publications/218199/IMPLEMENTASI-KEBIJAKAN-PERSPEKTIF-MODEL-DAN-KRITERIA-PENGUKURANNYA>

- Ishak, D. (2021). Menciptakan Kebijakan Pendidikan Yang Lebih Baik Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 4(2), 53–59. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.513>
- Jamal, J., Eka, S., & Nyoto, S. (2021). Pengaruh Pembinaan dan Sosialisasi terhadap Keberhasilan Program Keluarga Berencana pada Masa Pandemi Covid 19 di Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (E-JKPP)*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v7i2.2107>
- Kemendikbudristek, R. (2023). *Mengenal Program Indonesia Pintar, Salah Satu Program Prioritas Kemendikbudristek*. Inspektorat Jenderal Kemendikbud RI. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/>
- Khoirul Syani, A., Mufid, S., & Hazin, M. (2017). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Khazanah Pendidikan*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Kusnato, K., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Dan Tingkat Kriminalitas: Analisis Terhadap Efek Media Dalam Pembentukan Opini Publik. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1047–1061. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Lindriati, S., Suntoro, I., & Pitoewas, B. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *JURNAL KULTUR DEMOKRASI (JKD)*, 5(6), 1689–1703.

<https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13864>

Namora, D., & Bakar, A. (2021). Perbincangan Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Islam. *Al Hikmah: Journal of Education*, 2(1), 101–114. <https://doi.org/10.54168/ahje.v2i1.36>

Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 231. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>

Nopriyadi, T. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Budaya Dalam Pendidikan. *Thesis Commons*, 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31237/osf.io/gm8be>

Nuryadi, N., & Suprapto, S. (2024). Kedudukan Tanah Hak Guna Usaha Yang Tidak Diusahakan. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(7), 35–62. <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/1777>

Rahman, A., Tukiyat, T., Kuswandi, A., Budiati, A., Watunglawar, B., Rulinawaty, R., Dwiputrianti, S., & Marini, I. E. J. (2024). *Birokrasi dan Kebijakan Publik: Catatan Konsep dan Teori* (A. R. EP (ed.); Nomor February). CV. Literakata Karya Indonesia. [https://www.researchgate.net/profile/Rulinawaty-Kasmad/publication/377956624\\_BIROKRASI\\_DAN\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK\\_CATATAN\\_KONSEP\\_DAN\\_TEORI/links/65bf53a91e1ec12eff71c424/BIROKRA SI-DAN-KEBIJAKAN-PUBLIK-CATATAN-KONSEP-DAN-TEORI.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Rulinawaty-Kasmad/publication/377956624_BIROKRASI_DAN_KEBIJAKAN_PUBLIK_CATATAN_KONSEP_DAN_TEORI/links/65bf53a91e1ec12eff71c424/BIROKRA SI-DAN-KEBIJAKAN-PUBLIK-CATATAN-KONSEP-DAN-TEORI.pdf)

RI, K. (2024). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2024*. Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-MBKM-2024.pdf>

- Ridwan, A., Masquri, N. Q. Al, Lubis, S., & Solihin, S. (2023). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1966–1974. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.395>
- Risnawati, R., Hajar, A., & Cheriani, C. (2024). Sosialisasi Pendidikan; Mewujudkan Masyarakat Peduli Terhadap Pendidikan Di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 1671–1681. <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/6305/1511>
- Sari, F. A., & Yasin, M. (2024). Pendidikan Dan Stratifikasi Sosial : Kebijakan dan Praktek Pendidikan Dalam Mengurangi Stratifikasi Sosial di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2(3), 267–278. <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/jps/article/view/162>
- Simamora, I. Y., Zahra, M., Sinaga, W. A., Pandiangan, H. E., & Hasibuan, S. F. (2024). Peran Komunikasi dalam Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8(1), 8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13146>
- Siregar, D. R. S., Ratnaningsih, S., & Nurochim, N. (2022). Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia. *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 61–71. <https://doi.org/10.24127/edunomia.v3i1.3017>

- Suhairi, S., Maulida Husna, F., Hasanah, A., & Khofifah Saragih, S. (2023). Strategi Komunikasi Global: Pendekatan Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pasar Internasional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 12820–12825. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Suherman, A., & Sirajuddin, A. (2018). Kearifan Lokal Sebagai Basis Komunikasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Komunal. *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 3(2), 34–42. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.152>
- Syuhada, S., Saputra, A., & Syaifuddin, M. (2024). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16859>
- Tanjung, A., Darmansah, T., Oktapia, D., & Halawa, S. (2025). Efektivitas Sosialisasi Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Kesadaran Guru dan Siswa. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1042>
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar. *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4(2), 107–117. <https://ejournal.stp-ipi.ac.id/index.php/sapa/article/view/82>
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Umaroh, S. T., Muslim, S., Wiyanto, T., Soeryanto, S., & Warju, W. (2021). Peningkatan Kualitas Proses dan

Prestasi Belajar Siswa SMK Teknik Otomotif dengan Hybrid Learning di Masa Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(1), 1150–1156. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/2068>

Utama, E. P. (2017). Pengembangan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Peran Lembaga Pendidikan. *AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/alidarah.v7i1.1101>

Waluyo, D., & Syarifuddin, S. (2022). Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital (Practice of Public Policy Socialization in the Digital Age). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 1–8. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5018>

Zantia, G., Nadila, S., Hasibuan, S. Z. afwi, Afriza, A., & Amin, M. (2024). Tantangan Dan Prospek Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 2246–6111. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/1876>

## PROFIL PENULIS



**DANANG PRASTYO** yang lahir di Kediri, 01 Mei 1987 ini menempuh pendidikan sarjananya di UNP Kediri pada Prodi PKN sampai lulus tahun 2010, Kemudian melanjutkan Pendidikan sarjana di UT Pokjar Malang pada Prodi PG-PAUD sampai lulus tahun 2012. Penulis terjun di dunia pendidikan pertama kali saat bekerja sebagai guru sekaligus Kepala Sekolah di TK Plus Wahidiyah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada tahun 2005 sampai 2017. Keseriusan penulis

dalam menggeluti dunia pendidikan memotivasi penulis untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Surabaya mengambil Prodi Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD lulus pada tahun 2017, kemudian penulis bekerja sebagai Kaprodi PG-PAUD sekaligus Dosen di Universitas Wahidiyah Kediri. Pada Tahun 2019 penulis bekerja di Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai Dosen ASN pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Penulis juga menjadi bagian dari BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur sebagai Asesor Akreditasi PAUD sejak 2018 serta menjadi bagian dari BBGP Jawa Timur sebagai Fasilitator Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 sejak tahun 2022. Pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: [danah@iainmadura.ac.id](mailto:danah@iainmadura.ac.id) dan [24011916004@mhs.unesa.ac.id](mailto:24011916004@mhs.unesa.ac.id)

## **BAB IX**

### **DESENTRALISASI PENDIDIKAN**

#### **A. Pengertian Desentralisasi**

Desentralisasi adalah konsep yang sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk ilmu politik, ekonomi, dan teknologi (Fesler, 1965). Meskipun tampak sederhana, desentralisasi memiliki makna yang kompleks dan dapat merujuk pada fakta statis maupun proses dinamis (Bodó et al., 2021). Desentralisasi melibatkan distribusi wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau entitas lainnya dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keadilan, dan partisipasi dalam tata kelola serta penyampaian layanan. Dalam konteks pemerintahan, desentralisasi dapat diwujudkan melalui pelimpahan tanggung jawab politik, administratif, fiskal, ekonomi, atau fungsional kepada tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong inovasi lokal.

Desentralisasi sering kali menghadapi kritik terkait tantangan dalam implementasi kebijakan redistributif dan stabilisasi. Misalnya, kebijakan fiskal di tingkat daerah dapat bertentangan dengan tujuan makroekonomi nasional, sehingga menyulitkan pelaksanaan program stabilisasi ekonomi. Selain itu, desentralisasi dapat menghambat upaya redistributif baik secara interpersonal maupun antardaerah, karena koordinasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan menjadi lebih kompleks (Prud'homme, 1995). Ambiguitas konseptual juga menjadi salah satu isu utama dalam diskusi tentang desentralisasi. Istilah ini sering digunakan tanpa definisi yang jelas

dan konsisten, lebih sering berfungsi sebagai strategi retorika daripada istilah teknis (Schneider, 2019). Akibatnya, konsentrasi kekuasaan dapat tetap terjadi meskipun sistem tampak terdesentralisasi, sehingga penting untuk memahami desentralisasi secara lebih mendalam (Bodó et al., 2021).

Pengaruh desentralisasi terhadap penyampaian layanan publik juga bersifat kontekstual. Dalam beberapa kasus, desentralisasi dapat meningkatkan penyampaian layanan produktif, seperti layanan pertanian, dengan memanfaatkan pengetahuan dan insentif lokal. Namun, dampak positif yang sama tidak selalu terlihat dalam penyediaan layanan sosial, seperti air minum, terutama di negara-negara nondemokratis di mana akuntabilitas elektoral tidak ada (Kosec & Mogues, 2020). Dalam sektor kesehatan, desentralisasi dapat memengaruhi keadilan, efisiensi, dan ketahanan melalui mekanisme seperti tata kelola lokal dan akuntabilitas, tetapi dampaknya sangat bergantung pada konteks institusional dan sosial-ekonomi (Abimbola et al., 2019).

Secara historis, konsep desentralisasi telah berkembang dari fokus pada tata kelola menuju penerapan dalam sistem digital terdesentralisasi seperti teknologi blockchain. Evolusi ini mencerminkan aplikasi dan interpretasi desentralisasi yang beragam di berbagai bidang. Meskipun telah digunakan secara luas, masih ada kekurangan konsensus mengenai definisi dan pengukurannya, dengan dimensi fiskal, administratif, dan politik sebagai komponen utamanya (Di Bona et al., 2023). Dengan demikian, meskipun desentralisasi menawarkan manfaat potensial dalam tata kelola lokal dan penyampaian layanan, tantangan yang signifikan dalam implementasi dan dampak yang beragam menunjukkan pentingnya penelitian empiris lebih lanjut serta pendekatan yang lebih cermat dalam

penerapannya. Ambiguitas konsep ini, ditambah dengan hasil yang beragam, menegaskan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan strategi implementasi yang kontekstual.

## B. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan adalah proses pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau sektor swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada institusi pendidikan dan pemerintah lokal. Desentralisasi pendidikan di Indonesia mulai diimplementasikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rasional desentralisasi pendidikan mencakup aspek politik dan kualitas, dari sisi politik, desentralisasi didorong oleh federalisme dan demokrasi partisipatif, sedangkan dari sisi kualitas, desentralisasi menekankan profesionalisme pedagogis dan mekanisme pasar (Lauglo, 1995). Dalam implementasinya, konsep desentralisasi-sentralisme menggambarkan interaksi dinamis dalam proses ini, termasuk inisiasi, konten, level, dan simultanitas (Karlsen, 2000). Desentralisasi pendidikan menawarkan sejumlah dampak positif, seperti mendorong demokratisasi pendidikan melalui peningkatan otonomi dan tanggung jawab lokal, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan (Siladii, 2021). Pengalaman internasional menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di berbagai negara, seperti Polandia dan negara-negara Hispanik, menghasilkan keberhasilan yang bervariasi

tergantung pada tujuan nasional, distribusi sumber daya, dan konteks lokal (Zastrozhnikoda & CHEREMISINA, 2022) (Hanson, 1998).

Namun, desentralisasi pendidikan juga menghadapi tantangan. Salah satu isu utama adalah kualitas pendidikan, yang sering kali bergantung pada desain kebijakan, kondisi ekonomi, dan stabilitas politik di tingkat lokal (Jeong et al., 2017). Selain itu, manajemen guru sebagai salah satu elemen penting dalam desentralisasi dapat memengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran (Siladii, 2021). desentralisasi pendidikan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan dengan memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah dan institusi pendidikan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, serta adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Pengalaman internasional menegaskan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan berbasis konteks untuk memastikan keberhasilan desentralisasi pendidikan.

Di Indonesia, Kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu isu utama di Indonesia. Daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih memadai, seperti gedung sekolah yang layak, laboratorium, dan perpustakaan. Selain itu, kualitas guru di perkotaan umumnya lebih baik karena mereka memiliki akses lebih mudah ke pelatihan dan pengembangan profesional. Di sisi lain, daerah pedesaan sering kali menghadapi kekurangan guru berkualitas, minimnya fasilitas pendidikan, dan terbatasnya akses ke teknologi, seperti komputer dan internet. Hal ini berdampak pada kesenjangan hasil belajar antara siswa di kedua wilayah. Pemerintah pusat menghadapi tantangan

besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama karena luasnya wilayah dan beragamnya kondisi geografis. Kebijakan pendidikan sering kali sulit diterapkan secara merata, terutama di daerah terpencil. Distribusi anggaran pendidikan yang tidak proporsional dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan utama. Akibatnya, upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan sering kali tidak mencapai sasaran.

Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pembentukan komite sekolah, pengelolaan dana pendidikan secara transparan, dan pemberdayaan komunitas lokal untuk mendukung program pendidikan. Dengan memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat, pendidikan dapat lebih relevan dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan kualitas dan aksesibilitasnya. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kebijakan yang mendukung serta upaya edukasi agar masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam sektor pendidikan.

### C. Tujuan dan Manfaat Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan strategis yang dilakukan melalui pengalihan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada tingkat lokal, baik dalam bentuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, maupun komunitas masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, lebih efisien dalam pelaksanaannya, serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dalam konteks kebijakan publik, desentralisasi memberikan

ruang bagi tingkat lokal untuk mengatur sendiri sistem pendidikan yang sesuai dengan potensi dan tantangan masing-masing daerah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai tujuan dan manfaat desentralisasi pendidikan.

## 1. Tujuan Desentralisasi Pendidikan

### a. Redistribusi Kekuasaan

Salah satu tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah mendistribusikan kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal, baik kepada pemerintah daerah, sekolah, maupun komunitas masyarakat. Redistribusi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan relevan terhadap kondisi setempat. Menurut (Weiler, 1990) dan (Desimaria & Sri Rahayu, 2022), desentralisasi menciptakan peluang untuk mendekatkan pengelolaan pendidikan kepada masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat lebih adaptif terhadap permasalahan lokal, seperti akses pendidikan, kurikulum, dan infrastruktur. Selain itu, redistribusi kekuasaan ini juga bertujuan mengurangi sentralisasi yang sering kali menyebabkan kebijakan bersifat seragam dan tidak selalu cocok untuk daerah dengan karakteristik berbeda.

### b. Peningkatan Efisiensi

Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi lapisan birokrasi, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan memberikan wewenang pengelolaan kepada tingkat lokal. Hal ini relevan dengan pandangan (Lauglo, 1995) yang menyebutkan bahwa desentralisasi memungkinkan sistem pendidikan lebih efisien,

karena proses administrasi dapat disederhanakan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan langsung di lapangan tanpa melalui banyak tahapan prosedur di tingkat pusat. Efisiensi ini juga mencakup pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih terarah pada kebutuhan prioritas lokal.

c. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Salah satu alasan utama pelaksanaan desentralisasi adalah harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya otonomi di tingkat lokal, sekolah dan lembaga pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah mereka. (Channa, 2016) menekankan bahwa desentralisasi memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mengadopsi inovasi pendidikan yang lebih relevan dan efektif, sehingga siswa dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka.

## 2. Manfaat Desentralisasi Pendidikan

a. Pemberdayaan Lokal

Desentralisasi memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dan lembaga lokal untuk mengelola sistem pendidikan, yang pada akhirnya dapat mendorong pemberdayaan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Dengan wewenang yang lebih besar, pemerintah daerah dapat merancang strategi pendidikan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, seperti pengembangan tenaga kerja terampil yang relevan dengan sektor industri lokal. (Desimaria & Sri Rahayu, 2022) menyebutkan

bahwa pemberdayaan ini juga mencakup peningkatan kapasitas institusi lokal dalam mengelola layanan publik secara mandiri.

b. Partisipasi Masyarakat

Salah satu manfaat utama desentralisasi adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Partisipasi ini dapat berbentuk keterlibatan orang tua, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat dalam merancang program pendidikan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, hingga memberikan umpan balik yang konstruktif. (Hanson, 1998) mencatat bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap sistem pendidikan, yang pada akhirnya berdampak positif pada keberlanjutan program-program pendidikan.

c. Fleksibilitas dan Adaptabilitas

Fleksibilitas menjadi salah satu elemen penting untuk menjawab tantangan yang beragam di setiap daerah dalam konteks pendidikan, (Desimaria & Sri Rahayu, 2022) menggarisbawahi bahwa desentralisasi memberikan peluang kepada daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan spesifik, seperti kondisi geografis, budaya, dan demografi. Misalnya, daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi dapat mengembangkan pendekatan berbasis komunitas untuk memastikan pendidikan tetap berjalan.

d. Inovasi dan Kreativitas Lokal

Pesentralisasi mendorong munculnya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan Pendidikan dengan adanya kewenangan lebih besar di tingkat lokal, Sekolah dan lembaga pendidikan di tingkat daerah dapat bereksperimen dengan pendekatan baru, seperti pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh atau pengembangan program pendidikan berbasis keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan yang berorientasi pada redistribusi kekuasaan, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kualitas pendidikan dengan mendekatkan pengelolaan sistem pendidikan kepada masyarakat lokal. Manfaatnya mencakup pemberdayaan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan, serta mendorong inovasi di tingkat daerah. Namun, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi sangat bergantung pada desain kebijakan yang matang, alokasi sumber daya yang memadai, serta kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Dengan implementasi yang tepat, desentralisasi pendidikan dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

#### D. Dampak dan tantangan Desentralisasi

Desentralisasi pendidikan adalah proses pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke tingkat lokal dalam mengelola sistem pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, meningkatkan

partisipasi masyarakat, dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun desentralisasi sering dipandang sebagai langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan relevansi pendidikan, ia juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa tujuannya tercapai secara efektif dan merata.

## 1. Dampak Desentralisasi Pendidikan

### a. Redistribusi Kekuasaan dan Otonomi Lokal

Salah satu dampak utama dari desentralisasi adalah redistribusi kekuasaan, di mana otoritas lokal diberi kewenangan untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik daerah mereka. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan lokal dapat dikembangkan, yang memungkinkan sistem pendidikan yang lebih responsif dan fleksibel. Sebagai contoh, dalam konteks negara-negara berkembang, daerah dengan kebutuhan pendidikan yang unik, seperti wilayah pedesaan atau daerah dengan kekurangan sumber daya, dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran (Weiler, 1990); (Zastrozhnikova, 2019). Desentralisasi ini meningkatkan otonomi lokal dan memungkinkan pemangku kepentingan di tingkat lokal, seperti kepala sekolah dan guru, untuk terlibat lebih langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap kebijakan dan program pendidikan.

### b. Peningkatan Partisipasi dan Akuntabilitas Lokal

Dengan lebih banyak kekuasaan yang diberikan kepada otoritas lokal, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Ini memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas dan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap proses pendidikan. Peningkatan partisipasi ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas, karena masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dapat secara langsung mengawasi dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika orang tua memiliki peran aktif dalam proses pendidikan, mereka lebih cenderung untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan baik dan bahwa anak-anak mereka mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik (Bilouseac & Azamfirei, 2019). Di sisi lain, desentralisasi dapat memberikan peluang bagi pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti, memungkinkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal.

c. Potensi Inovasi dalam Praktik Pendidikan

Desentralisasi memberikan ruang bagi kebijakan pendidikan yang lebih inovatif, karena sekolah dan otoritas lokal dapat merancang program yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Inovasi ini tidak hanya mencakup perubahan dalam kurikulum, tetapi juga dalam metode pengajaran, penggunaan teknologi, serta cara-cara baru dalam melibatkan komunitas dalam pendidikan. Sebagai contoh, di beberapa negara, kebijakan desentralisasi telah mendorong penggunaan teknologi untuk

mengatasi keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada. Namun, dampaknya terhadap kualitas pendidikan tidak selalu linier. Meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dampaknya sering kali bergantung pada desain kebijakan dan sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal (Kameshwara et al., 2020).

## 2. Tantangan Desentralisasi Pendidikan

### a. Ketimpangan Sosial dan Elitisme

Salah satu tantangan besar yang sering dihadapi dalam desentralisasi adalah peningkatan ketimpangan sosial. Sumber daya dan kekuasaan seringkali terkonsentrasi di tangan kelompok elit di tingkat lokal, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Di beberapa wilayah, terutama yang lebih miskin atau terisolasi, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dapat menyebabkan kegagalan desentralisasi dalam menciptakan kesempatan yang setara untuk semua siswa. Ketimpangan ini dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah kaya dan miskin, dan menghambat pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat (Bilouseac & Azamfirei, 2019).

### b. Kendala Finansial dan Sumber Daya

Salah satu tantangan yang paling signifikan dalam desentralisasi pendidikan adalah masalah pendanaan. Meskipun desentralisasi memberikan otonomi yang lebih besar pada pemerintah lokal,

tanpa dukungan finansial yang memadai, otoritas lokal mungkin kesulitan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, pelatihan guru, atau teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keterbatasan pendanaan ini sering kali menghambat efektivitas desentralisasi dan mencegah implementasi kebijakan yang diinginkan. Di negara-negara berkembang, tantangan pendanaan menjadi lebih kompleks, mengingat adanya ketergantungan pada sumber daya eksternal dan ketimpangan antara daerah kaya dan miskin dalam kemampuan untuk mengumpulkan dana (Kyeremeh & Kor, 2022).

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Kapasitas Lokal

Infrastruktur pendidikan yang terbatas di tingkat lokal juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan desentralisasi yang efektif. Tanpa adanya investasi yang cukup dalam infrastruktur, seperti bangunan sekolah yang memadai, fasilitas teknologi, atau bahan ajar, kualitas pendidikan yang dihasilkan akan terbatas. Keterbatasan kapasitas administratif di tingkat lokal juga dapat memperburuk masalah ini, di mana daerah yang tidak memiliki keahlian manajerial atau teknis yang cukup akan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dengan efektif. Di banyak daerah, terutama yang terpencil, keterbatasan ini sering kali memperburuk ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa (Kyeremeh & Kor, 2022).

d. Interferensi Politik dan Duplikasi Fungsi

Campur tangan politik dari pejabat pemerintah atau partai politik tertentu dapat merusak efektivitas desentralisasi dengan menciptakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal atau tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Politisi yang lebih tertarik pada keuntungan jangka pendek atau agenda politik mereka sering kali mengabaikan kebutuhan pendidikan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, tumpang tindih antara fungsi pemerintah pusat dan lokal juga mengurangi efisiensi desentralisasi. Ketika pemerintah pusat masih mempertahankan pengaruh besar dalam kebijakan pendidikan, sementara pemerintah lokal tidak memiliki cukup otonomi, dapat terjadi kebingungan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan, yang mengurangi dampak positif dari desentralisasi (Zastrozhnikova, 2019)

Desentralisasi pendidikan memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong inovasi, dan memperbaiki akuntabilitas, desentralisasi dapat menghasilkan sistem pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Namun, tantangan-tantangan seperti ketimpangan sosial, kendala finansial, keterbatasan infrastruktur, interferensi politik, dan duplikasi fungsi perlu diatasi dengan hati-hati. Keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat, pendanaan yang memadai, serta kerjasama antara pemerintah pusat dan lokal. Jika dikelola dengan baik, desentralisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan.

## E. Prinsip – Prinsip Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan relevansi sistem pendidikan dengan memindahkan sebagian otoritas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sehingga menciptakan pendidikan yang lebih adaptif dan inklusif.

Salah satu prinsip utama desentralisasi pendidikan adalah transfer otoritas dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, hal ini melibatkan pergeseran kekuasaan dari kementerian pusat ke pemerintah daerah, masyarakat, hingga lembaga pendidikan. Dengan demikian, pihak-pihak di tingkat lokal dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan konteks mereka. Transfer ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya keuangan yang signifikan. Seperti yang dijelaskan oleh (Verma et al., 2024a), langkah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pendidikan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan sistem. Selain itu, desentralisasi menekankan pentingnya manajemen lokalisasi dan keterlibatan masyarakat. Sekolah didorong untuk menjadi pusat pembelajaran berbasis komunitas yang melibatkan orang tua, siswa, organisasi masyarakat, dan pejabat lokal. Pendekatan ini memperkuat rasa memiliki terhadap pendidikan di kalangan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pendidikan

mencerminkan kebutuhan lokal. (Blazeski, 2023) menyoroti bahwa kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara lebih efektif. Bahkan, otoritas lokal sering kali diberi tanggung jawab untuk memastikan pembiayaan, pengelolaan sekolah, dan perlindungan sosial bagi siswa, seperti yang dicontohkan dalam penelitian (Zastrozhnikova & Cheremisina, 2022).

Prinsip lainnya adalah efisiensi dan fleksibilitas. Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat lokal, desentralisasi memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap tantangan pendidikan spesifik di setiap daerah. Kebijakan yang lebih relevan dan adaptif dapat diterapkan tanpa harus melalui birokrasi panjang di tingkat pusat. (Verma et al., 2024b) mencatat bahwa fleksibilitas ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempercepat implementasi program pendidikan. Namun, meskipun kewenangan diserahkan ke daerah, desentralisasi harus tetap memperhatikan kesetaraan dan kualitas pendidikan. Salah satu tantangan besar adalah mencegah kesenjangan dalam akses dan mutu pendidikan antarwilayah. Pemerintah perlu memastikan distribusi anggaran yang adil dan pelatihan guru yang merata untuk menjaga kualitas pendidikan di seluruh daerah. Contohnya, di Ukraina, desentralisasi digunakan untuk mengatasi kendala anggaran dan kekurangan guru, sehingga layanan pendidikan dapat ditingkatkan di wilayah-wilayah terpencil (Zastrozhnikova & Cheremisina, 2022). Desentralisasi pendidikan menawarkan peluang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, adaptif, dan inklusif. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kerangka kerja yang jelas, pengawasan yang efektif, dan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

## F. Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

perbandingan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam konteks pendidikan:

Aspek	Sentralisasi	Desentralisasi
<b>Definisi</b>	Semua keputusan pendidikan diambil oleh pemerintah pusat.	Wewenang dan tanggung jawab pendidikan didelegasikan kepada pemerintah daerah.
<b>Pengambilan Keputusan</b>	Terpusat di tingkat nasional, tanpa banyak melibatkan daerah atau masyarakat.	Dilakukan di tingkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal.
<b>Fleksibilitas</b>	Rendah, karena kebijakan seragam diterapkan di seluruh wilayah.	Tinggi, karena kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
<b>Efisiensi</b>	Cenderung rendah karena pemerintah pusat sulit memenuhi kebutuhan seluruh wilayah.	Lebih efisien karena pengelolaan dilakukan lebih dekat dengan sumber kebutuhan.
<b>Akuntabilitas</b>	Pemerintah pusat bertanggung jawab atas hasil pendidikan secara keseluruhan.	Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan di wilayahnya masing-masing.

<b>Partisipasi Masyarakat</b>	Terbatas, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan.	Tinggi, karena masyarakat dapat berkontribusi dalam perencanaan dan pengawasan pendidikan.
<b>Kualitas Pendidikan</b>	Cenderung tidak merata, terutama di daerah terpencil yang kurang mendapat perhatian.	Berpotensi meningkat karena fokus pada kebutuhan spesifik daerah.
<b>Kendala Utama</b>	Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah karena pendekatan seragam.	Keterbatasan sumber daya di daerah, seperti dana dan kualitas tenaga pengajar.

Sentralisasi dan desentralisasi memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda dalam pengelolaan pendidikan. Pada sistem sentralisasi, semua keputusan diambil oleh pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang diterapkan bersifat seragam di seluruh wilayah. Meskipun pendekatan ini memberikan kendali penuh kepada pemerintah pusat, sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik daerah, yang menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan cenderung rendah. Sebaliknya, desentralisasi memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, desentralisasi juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan dana dan sumber daya manusia di daerah, yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, tetapi membutuhkan dukungan berupa peningkatan kapasitas daerah, penyediaan sumber daya yang memadai, dan pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat.

#### G. Keimpulan

Desentralisasi pendidikan adalah suatu pendekatan yang memungkinkan pengelolaan pendidikan lebih terdesentralisasi ke tingkat daerah, memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan institusi pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan lokal yang lebih spesifik. Dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah, diharapkan kebijakan pendidikan dapat lebih responsif terhadap kondisi dan tantangan setempat, serta menciptakan solusi yang lebih inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun, meskipun desentralisasi menawarkan potensi besar untuk perbaikan pendidikan, ia juga membawa tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan sosial dan geografis dalam akses dan kualitas pendidikan, yang seringkali terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia, misalnya, ketimpangan kualitas pendidikan antara kedua

wilayah ini masih sangat mencolok, di mana daerah perkotaan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan.

Keterbatasan infrastruktur dan kendala finansial juga menjadi tantangan dalam implementasi desentralisasi pendidikan. Banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai program pendidikan yang berkualitas, apalagi jika mereka harus mengelola berbagai aspek pendidikan secara mandiri. Selain itu, potensi interferensi politik dalam pengelolaan pendidikan di tingkat daerah juga dapat menghambat efektivitas kebijakan, karena keputusan pendidikan bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal, bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan pendidikan yang objektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan desain kebijakan yang matang dan perencanaan yang cermat. Alokasi sumber daya yang lebih merata, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, sangat penting untuk memastikan bahwa desentralisasi pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Pengawasan yang kuat dari pemerintah pusat juga diperlukan untuk menjaga agar kebijakan pendidikan yang diterapkan di daerah tetap sejalan dengan standar nasional dan tidak menyebabkan kesenjangan yang lebih besar.

Desentralisasi pendidikan dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan apabila dilaksanakan dengan mekanisme dan kondisi yang tepat. Pendidikan yang dapat menanggapi kebutuhan lokal dengan lebih baik, mengembangkan kreativitas dan inovasi di tingkat daerah, serta menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua lapisan

masyarakat, akan mendukung terciptanya generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

## H. Daftar Pustaka

- Abimbola, S., Baatiema, L., & Bigdeli, M. (2019). The impacts of decentralization on health system equity, efficiency and resilience: a realist synthesis of the evidence. *Health Policy and Planning*, 34(8), 605–617. <https://doi.org/10.1093/heapol/czz055>
- Bilouseac, I., & Azamfirei, D. (2019). The Impact of the Decentralization Process within the Pre-University Education system. A Case Study of Gymnasium School No. 1 Mileanca from Botosani County. *European Journal of Law and Public Administration*, 6(1), 119–127. <https://doi.org/10.18662/eljpa/69>
- Blazeski, A. (2023). The positive implications of the decentralization process on primary education management. *CRJ*, 1, 53–63. <https://doi.org/10.5938/crj.v1i1.2749>
- Bodó, B., Brekke, J. K., & Hoepman, J.-H. (2021). Decentralisation: a multidisciplinary perspective. *Internet Policy Review*, 10(2). <https://doi.org/10.14763/2021.2.1563>

- Channa, A. (2016). Popularity of the decentralization reform and its effects on the quality of education. *PROSPECTS*, 46(1), 131–147. <https://doi.org/10.1007/s11125-016-9380-7>
- Desimaria, M., & Sri Rahayu, A. Y. (2022). Reconnoitring Decentralization Policy of Education in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 1019–1028. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1892>
- Di Bona, G., Bracci, A., Perra, N., Latora, V., & Baronchelli, A. (2023). The concept of decentralization through time and disciplines: a quantitative exploration. *EPJ Data Science*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-023-00418-1>
- Fesler, J. W. (1965). Approaches to the Understanding of Decentralization. *The Journal of Politics*, 27(3), 536–566. <https://doi.org/10.2307/2127739>
- Hanson, E. M. (1998). Strategies of educational decentralization: key questions and core issues. *Journal of Educational Administration*, 36(2), 111–128. <https://doi.org/10.1108/09578239810204345>
- Jeong, D. W., Lee, H. J., & Cho, S. K. (2017). Education decentralization, school resources, and student outcomes in Korea. *International Journal of Educational Development*, 53, 12–27. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.12.003>
- Kameshwara, K. K., Sandoval-Hernandez, A., Shields, R., & Dhanda, K. R. (2020). A false promise? Decentralization in

education systems across the globe. *International Journal of Educational Research*, 104, 101669.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101669>

Karlsen, G. E. (2000). Decentralized centralism: framework for a better understanding of governance in the field of education. *Journal of Education Policy*, 15(5), 525–538.  
<https://doi.org/10.1080/026809300750001676>

Kosec, K., & Mogues, T. (2020). Decentralization Without Democracy. *World Politics*, 72(2), 165–213.  
<https://doi.org/10.1017/S0043887120000027>

Kyeremeh, A., & Kor, J. A. M. (2022). Challenges Affecting the Implementation of Decentralisation in Public Basic Schools in Ghana. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 9(4), 99–112. <https://doi.org/10.14738/assrj.94.12130>

Lauglo, J. (1995). Forms of Decentralisation and Their Implications for Education. *Comparative Education*, 31(1), 5–30. <https://doi.org/10.1080/03050069529182>

Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201–220.  
<https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201>

Schneider, N. (2019). Decentralization: an incomplete ambition. *Journal of Cultural Economy*, 12(4), 265–285.  
<https://doi.org/10.1080/17530350.2019.1589553>

Siladii, I. (2021). Decentralization as A Stimulating Factor of Democratization of Education. *Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Pedagogy*, 1 (13), 65–67. <https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.13.14>

Verma, P., Ratnani, D. M., Verma, S., & Avasthi, S. (2024a). Decentralized System in Education and Research. In *Decentralized Systems and Distributed Computing* (pp. 35–51). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394205127.ch2>

Verma, P., Ratnani, D. M., Verma, S., & Avasthi, S. (2024b). Decentralized System in Education and Research. In *Decentralized Systems and Distributed Computing* (pp. 35–51). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394205127.ch2>

Weiler, H. N. (1990). Comparative Perspectives on Educational Decentralization: An Exercise in Contradiction? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 12(4), 433–448. <https://doi.org/10.3102/01623737012004433>

Zastrozhnikova, I. (2019). Transformation of the National Educational System in the context of decentralization. *Public Administration and Local Government*, 4(43), 44–49. <https://doi.org/10.33287/101906>

Zastrozhnikova, I., & Cheremisina, T. (2022). Decentralization of Education Systems in Ukraine. *Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University Series Pedagogical Sciences*,

## I. Identitas Penulis



M. Fahmi Zakariyah adalah seorang pendidik dan penulis yang memiliki latar belakang akademik dan profesional yang kuat di bidang pendidikan nonformal. Lahir dan besar di Gemekan, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Fahmi saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral (S3) dalam bidang Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, ia berhasil menyelesaikan program magister (S2) di bidang Pendidikan Luar Sekolah di universitas yang sama dengan predikat cumlaude. Selama masa studinya, ia juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan akademik, termasuk menjadi Ketua HMJ PLS dan meraih berbagai penghargaan dalam lomba debat mahasiswa tingkat nasional. Sebagai seorang profesional, Fahmi memiliki pengalaman luas dalam pengembangan dan implementasi program pendidikan nonformal. Ia pernah menjabat sebagai Staf Akademik di Labschool Unesa, di mana ia berkontribusi dalam pengembangan mutu pendidikan dan media pembelajaran digital. Selain itu, ia juga berperan sebagai Tutor Program Kesetaraan di SKB Kota Surabaya dan SKB Kraksaan, serta pernah menjadi staf magang di Ditjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD, membantu monitoring program pendidikan nonformal di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga aktif menulis, dengan dua karya buku yang telah diterbitkan, yaitu HMJ PLS dan Solidaritas (2019).

dan Metodologi Penelitian Kuantitatif (2023). Dengan semangatnya untuk terus belajar dan berbagi ilmu, Fahmi berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

## **Bab XI**

### **Kebijakan Program Pendidikan**

#### **A. Landasan Kebijakan Pendidikan**

Pendidikan merupakan hak fundamental yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Landasan hukum kebijakan pendidikan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Artikel ini membahas landasan hukum yang meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang berperan dalam membangun kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai payung hukum dalam kebijakan pendidikan serta relevansinya terhadap pembangunan sumber daya manusia.

Kebijakan pendidikan memiliki definisi sebagai seperangkat keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau pihak berwenang lainnya untuk mengatur, mengarahkan, dan memajukan proses pendidikan guna mencapai tujuan tertentu (Anderson, J.E., 2014). Kebijakan pendidikan mencakup peraturan, undang-undang, dan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan. Konsep utama dalam penyusunan kebijakan ini diantaranya adalah memuat visi dan misi yang mengandung cita-cita dan tujuan pendidikan nasional. Selain itu juga mengandung adanya strategi implementasi yang mengandung langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan di berbagai tingkat, seperti lokal, regional, dan nasional (Dye, T.R., 2017). Evaluasi dan Pengawasan menjadi bagian dalam Proses menilai efektivitas kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan.

#### **a. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis kebijakan pendidikan mengacu pada nilai-nilai, prinsip, dan pandangan hidup yang mendasari kebijakan pendidikan. Di Indonesia, landasan ini berakar pada **Pancasila**, Sebagai dasar negara dan pedoman dalam menyusun kebijakan pendidikan, yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Berikutnya adalah berlandaskan pada **Filsafat Pendidikan Nasional** yang menekankan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Sedangkan

**b. landasan yuridis** mencakup aturan hukum yang menjadi dasar kebijakan pendidikan. Di Indonesia, landasan ini mencakup **UUD 1945 Pasal 31**: Menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pada **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**: Mengatur prinsip, tujuan, dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Lalu landasan yuridis pada **Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan**: Sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan di lapangan.

**c. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk Keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia, Dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, Tantangan sosial seperti kesenjangan ekonomi dan geografis.

Pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Sebagai hak dasar, pendidikan telah diakui oleh hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, kebijakan pendidikan didasarkan pada berbagai landasan hukum yang dirumuskan untuk menjamin akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap landasan hukum pendidikan sangat penting untuk

memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Landasan hukum kebijakan pendidikan di Indonesia berakar pada **Undang-Undang Dasar (UUD) 1945**. Pasal 31 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; serta Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar dan menjamin pendidikan menengah yang terjangkau.

Pada pasal 31 ayat (4) juga mengatur bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan anggaran biaya yang cukup besar ini, tentu menjadi peluang bagi negara Indonesia untuk mengembangkan sektor pendidikannya secara maksimal dan masif.

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. UU ini menegaskan prinsip-prinsip dasar pendidikan, seperti:

- Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana.
- Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik.
- Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhhlak mulia.

Landasan hukum berikutnya adalah berasal dari **Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri** yang kemudian menjadi turunan dari UU Sisdiknas, yaitu PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan juga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kurikulum, akreditasi, dan pengelolaan pendidikan.

Selain berdasarkan landasan hukum secara nasional, tentunya secara internasional juga diakui sebuah kebijakan

yang disepakati bersama berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan di dunia. Diantaranya adalah **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)**, Pasal 26, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Di samping itu ada kebijakan **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya tujuan ke-4, yang menargetkan pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti adanya Ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, Kualitas pendidikan yang bervariasi, Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut (Easton, D., 1953), Prinsip dasar dalam kebijakan pendidikan mengacu pada: 1) **Demokrasi dan Keadilan**, yaitu bahwa pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa diskriminasi; 2) **Relevansi**: Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan dunia kerja; **Efisiensi dan Efektivitas**: Kebijakan pendidikan harus memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk hasil maksimal; 3) **Kesinambungan**: Kebijakan harus mampu menghadapi tantangan masa depan tanpa mengabaikan kebutuhan saat ini; 4) **Akuntabilitas**: Kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Landasan hukum kebijakan pendidikan di Indonesia telah dirancang untuk memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat (Tilaar, H.A.R., 2004). Dengan pemahaman yang mendalam terhadap landasan hukum, diharapkan kebijakan pendidikan dapat terus disempurnakan

untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

## **B. Proses Formulasi Kebijakan Pendidikan**

Proses formulasi kebijakan pendidikan merupakan tahapan di mana kebijakan dirancang untuk mengatasi permasalahan atau kebutuhan pendidikan. Proses ini melibatkan analisis mendalam, partisipasi berbagai pihak, dan perumusan langkah strategis untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif (Tilaar, H. A. R., 2009).

Berikut adalah tahapan utama dalam proses formulasi kebijakan pendidikan (OECD, 2018):

### 1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, berbagai masalah yang dihadapi sektor pendidikan diidentifikasi. Masalah ini dapat berupa Ketimpangan akses pendidikan: Misalnya, kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. kemudian perlu juga menganalisis Kualitas pendidikan: Seperti rendahnya hasil belajar siswa, motivasi belajar peserta didik yang kurang, serta output dari proses dan hasil belajar yang beragam. selanjutnya, identifikasi masalah perlu meninjau tantangan relevansi pendidikan, seperti pada aspek Pendidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Belum lagi permasalahan administratif dan keuangan: sebagai contoh adalah alokasi dana pendidikan yang tidak efisien (Tilaar, H. A. R., 2004).

Metode yang sering digunakan dalam identifikasi masalah diantaranya adalah Analisis situasi: Menggunakan data statistik, survei, atau laporan penelitian. kemudian dengan Partisipasi masyarakat, dengan melibatkan siswa,

guru, dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan.

## 2. Pengumpulan Data dan Analisis Kebijakan

Tahap ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami akar masalah. Analisis kebijakan mencakup Analisis kontekstual: Menilai faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi pendidikan. Kemudian menganalisis dampak dengan memproyeksikan efek potensial dari berbagai opsi kebijakan. Selain itu, dapat dilakukan Benchmarking, yaitu Membandingkan kebijakan pendidikan di negara lain yang memiliki tantangan serupa (Soedijarto, 2008). Strategi yang dilakukan adalah dengan pendekatan ilmiah, seperti **cost-benefit analysis** (analisis biaya-manfaat) dan **SWOT analysis** (analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman), sering digunakan dalam tahap ini.

## 3. Penyusunan Alternatif Kebijakan

Penyusunan alternatif Kebijakan merupakan sebuah proses untuk menentukan pilihan lain sebuah kebijakan agar kebijakan yang dijalankan segera menemukan alternatif cadangan yang sesuai dan tepat sasaran. Alternatif kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Efektivitas berkaitan dengan ketercapaian kebijakan dalam mencapai tujuan. Efisiensi berkaitan dengan seberapa optimal kebijakan dalam menggunakan sumber daya dengan optimal. Pada aspek keadilan menyoroti agar kebijakan yang akan diluncurkan akan memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

## 4. Konsultasi Publik dan Partisipasi Stakeholder

Perlunya konsultasi dan komunikasi antar *expert* atau pihak-pihak yang memiliki pengalaman pada bidang kebijakan publik maupun kebijakan pendidikan akan sangat mendukung perumusan sebuah kebijakan. Pihak-pihak yang perlu dilibatkan tersebut diantaranya adalah guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah dan pusat, serta sektor swasta dan *stakeholder*. Adanya partisipasi publik tersebut memiliki manfaat untuk Meningkatkan legitimasi kebijakan, memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendapatkan masukan untuk penyempurnaan kebijakan.

## 5. Perumusan Kebijakan

Hasil konsultasi publik dan analisis kebijakan dirumuskan menjadi dokumen kebijakan. Dokumen ini meliputi Pernyataan masalah, Tujuan kebijakan, Strategi pelaksanaan, Rencana anggaran dan evaluasi. Pada tahap ini, aspek hukum dan administratif juga diperhatikan, seperti penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah.

## 6. Penilaian dan Pengesahan Kebijakan

Sebelum kebijakan diimplementasikan, dilakukan penilaian akhir untuk memastikan konsistensi dengan visi dan misi pendidikan nasional, kepatuhan terhadap peraturan hukum, kelayakan teknis dan finansial. Setelah itu, kebijakan disahkan oleh lembaga berwenang, seperti DPR atau Kementerian Pendidikan.

## 7. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan disahkan, tahap pelaksanaan dimulai. Evaluasi kebijakan dilakukan secara periodik untuk menilai dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan,

mengidentifikasi hambatan implementasi, menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

## **C. Implementasi Program Pendidikan**

Implementasi program pendidikan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau rencana pendidikan ke dalam tindakan nyata di tingkat institusi pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Keberhasilan implementasi program pendidikan memerlukan strategi yang terencana, pemilihan model implementasi yang sesuai, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang relevan.

### **1. Strategi Implementasi Program Pendidikan**

Strategi implementasi program pendidikan adalah langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan (Fullan, 2007). Beberapa strategi yang umum digunakan meliputi : 1) **perencanaan yang matang**. Dalam perencanaan ini perlu dilakukan penetapan tujuan yang jelas sesuai kebutuhan masyarakat. Kemudian, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dan relevansi dengan tuntutan zaman, serta perlu melibatkan stakeholder (pendidik, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional).

Langkah berikutnya adalah 2) **Adanya Pemberdayaan Sumber Daya** yang dapat dilaksanakan melalui adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi, penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, teknologi pendidikan, dan bahan ajar. langkah yang tidak kalah penting adalah 3) **Monitoring dan Evaluasi** yang merupakan penilaian berkelanjutan terhadap efektivitas program. Tahap ini penting untuk memberikan feedback untuk perbaikan berkelanjutan, serta menentukan langkah yang tepat pada kebijakan berikutnya. Setiap langkah dalam implementasi ini, perlu adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, yaitu

melalui kolaborasi, sosialisasi, serta kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swasta, dan juga masyarakat perihal pendanaan dan juga pelaksanaan.

## 2. Model Implementasi Program Pendidikan

Dalam menentukan dan mengimplementasikan program pendidikan, diperlukan pemilihan model implementasi yang tentunya sangat tergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat. Beberapa model yang sering digunakan meliputi:

### a. *Top-Down Model*

Jenis model Kebijakan ini dibuat di tingkat atas (nasional) dan diimplementasikan di tingkat bawah (sekolah). Model ini cocok untuk program dengan standar nasional, seperti Kurikulum Merdeka di Indonesia.

### b. *Bottom-Up Model*

Model jenis ini merupakan Inisiatif berasal dari komunitas lokal, dengan pemerintah mendukung melalui kebijakan dan pendanaan. Jenis model ini cocok untuk pendidikan berbasis masyarakat atau daerah tertentu.

### c. *Mixed Model*

Jenis model ini merupakan kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. jenis ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan dan memastikan standar kualitas terpenuhi.

### d. *Adaptive Model*

Jenis model ini merupakan penyesuaian program secara dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kendala di lapangan. Model adaptif ini sesuai untuk daerah dengan keragaman budaya, geografis, atau sosial-ekonomi.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pendidikan, tentu akan mengalami dinamika secara sosial. Terdapat faktor-faktor yang mendukung dan juga menghambat implementasi tersebut. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung diantaranya adalah: 1) adanya dukungan kebijakan dari pusat. sebagai contoh adalah adanya regulasi dan kebijakan yang memadai, seperti alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN di Indonesia; 2) Adanya Komitmen dan Kompetensi Guru atau pendidik yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran; 3) Adanya keterlibatan Orang tua dan Masyarakat, serta stakeholder lainnya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan; 4) adanya teknologi yang mendukung dan tentunya memudahkan pengimplementasian pendidikan. Beberapa contoh teknologi pendidikan ini adalah *e-learning*, perangkat lunak pendidikan, dan aplikasi pendukung pembelajaran; 5) Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.

Selanjutnya, faktor penghambat sebagai kondisi-kondisi yang menghalangi atau hal-hal yang dapat menjadi penyebab ketidaklancaran sebuah implementasi kebijakan pendidikan. Beberapa faktor penghambat tersebut adalah : 1) Kurangnya pendanaan akibat ketidakmerataan pendistribusian anggaran pendidikan, utamanya pada daerah terpencil (Barrett, A. M., et al., 2015); 2) kesenjangan kualitas pendidikan yang merupakan akibat dari ketimpangan fasilitas pendidikan, sumber daya pendidik, dan juga faktor latar belakang lain antar daerah yang tidak sama; 3) Faktor resistensi perubahan, yaitu kurang terbukanya guru maupun pihak-pihak instansi pendidikan terhadap inovasi maupun perubahan kurikulum yang terjadi; 4) minimnya literasi digital menjadi salah satu faktor penghambat,

berkaitan dengan fasilitas teknologi serta penguasaan sumber daya manusia yang belum dapat menguasai penggunaannya; 5) Masalah logistik seperti keterjangkauan lokasi pendidikan yang bermacam-macam. Lokasi pelaksanaan pendidikan yang jauh dari perkotaan, yang membutuhkan akses jalur darat maupun udara yang terlambat jauh, juga menjadi salah satu penghambat pengimplementasian kebijakan pendidikan secara maksimal.

Implementasi program pendidikan yang sukses memerlukan sinergi antara strategi, model, serta upaya mengatasi hambatan. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based approach) juga penting untuk menyesuaikan program dengan konteks lokal dan tantangan global.

## **D. Isu dan Tantangan Masa Depan**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan manusia. Dalam menghadapi dinamika abad ke-21, pendidikan menghadapi berbagai isu dan tantangan yang harus diatasi untuk menjamin keberlanjutan dan relevansinya (Kong, S. C., et al. (2014). Di era digital ini, isu seperti kesenjangan digital, kesetaraan akses pendidikan, globalisasi, dan dampak kebijakan menjadi sorotan utama. Artikel ini akan mengulas isu-isu tersebut berdasarkan kajian literatur ilmiah.

### **Era Digital dan Transformasi Pendidikan**

Teknologi digital telah mengubah cara pembelajaran dilakukan. Platform pembelajaran daring, kecerdasan buatan, dan sumber belajar digital menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pendidikan (Means et

al., 2014). Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti:

1. **Kesenjangan Digital:** Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi dan internet yang memadai. Menurut laporan UNESCO (2020), sekitar 1,3 miliar siswa di seluruh dunia tidak memiliki akses ke internet selama pandemi COVID-19, mengakibatkan ketimpangan pembelajaran.
2. **Kesiapan Guru dan Infrastruktur:** Banyak guru yang belum siap memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran (Kong et al., 2014). Infrastruktur teknologi yang tidak merata juga menghambat transformasi digital di beberapa wilayah.

## **Kesetaraan Akses Pendidikan**

Kesetaraan dalam pendidikan adalah prinsip mendasar untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Namun, beberapa tantangan masih membayangi, seperti:

1. **Ketimpangan Sosial dan Ekonomi:** Anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung memiliki akses yang lebih rendah ke pendidikan berkualitas. Penelitian oleh OECD (2018) menunjukkan bahwa siswa dari latar belakang ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kegagalan akademik.
2. **Isu Gender:** Meskipun telah ada kemajuan, ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan masih menjadi isu di beberapa negara berkembang (UNESCO, 2021).

## **Globalisasi dan Pendidikan**

Globalisasi memperluas wawasan dan peluang pendidikan, tetapi juga membawa tantangan. Globalisasi memicu homogenisasi kurikulum dan standar pendidikan, yang bisa mengancam keberagaman budaya lokal (Spring, 2014). Selain

itu, kompetisi global untuk akses ke pendidikan tinggi meningkatkan tekanan pada sistem pendidikan nasional, terutama di negara-negara berkembang.

## **Dampak Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan memiliki dampak besar terhadap kualitas dan inklusivitas pendidikan. Kebijakan yang kurang terencana dapat memperburuk ketimpangan yang ada. Sebagai contoh, implementasi kebijakan "sekolah gratis" di beberapa negara seringkali tidak disertai dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan (Barrett et al., 2015).

Namun, kebijakan yang baik, seperti investasi pada pelatihan guru dan pembangunan infrastruktur, dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Negara-negara seperti Finlandia dan Singapura menunjukkan bahwa investasi berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas tinggi menghasilkan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang (Sahlberg, 2015).

## **E. Kesimpulan**

Isu dan tantangan pendidikan di masa depan sangat kompleks, mencakup aspek digitalisasi, kesetaraan akses, globalisasi, dan kebijakan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan **Investasi Teknologi yang Inklusif**: Meningkatkan akses ke perangkat teknologi dan internet untuk semua siswa; **Kebijakan Progresif**: Mengembangkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif; **Penguatan Kapasitas Guru**: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru untuk memanfaatkan teknologi secara efektif; **Pemberdayaan Lokal**: Mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum untuk menjaga keberagaman budaya. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan dapat menjadi instrumen utama untuk

menghadapi tantangan global dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **F. Daftar Pustaka**

- Anderson, J.E. (2014). *Public Policymaking*. Boston: Cengage Learning.
- Barrett, A. M., et al. (2015). *The impact of free primary education policies on educational quality*. Comparative Education Review.
- Darling-Hammond, L. (2006). *Powerful Teacher Education: Lessons from Exemplary Programs*. Jossey-Bass.
- Dye, T.R. (2017). *Understanding Public Policy*. New York: Pearson Education.
- Dunn, W.N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction*. London: Routledge.
- Easton, D. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Knopf.
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. Teachers College Press.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Rineka Cipta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Pedoman Penyusunan Kebijakan Pendidikan Nasional*.

- Kemendikbudristek (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kong, S. C., et al. (2014). *E-learning in school education in the coming 10 years: Trends, issues, and challenges*. Educational Technology & Society.
- Means, B., et al. (2014). *The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature*. Teachers College Record.
- OECD. (2018). *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*. OECD Publishing.
- OECD (2018). *Education at a Glance*. OECD Publishing.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Soedijarto. (2008). *Landasan dan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Sahlberg, P. (2015). *Finnish Lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Spring, J. (2014). *Globalization of Education: An Introduction*. Routledge.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report 2020*.
- UNESCO. (2021). *Gender Report: A New Generation*. UNESCO Publishing.

## **G. Identitas Penulis**



Penulis bernama Desika Putri Mardiani, M.Pd, seorang dosen pada program studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Ia menuntaskan studi sarjananya pada tahun 2014, kemudian berkecimpung di dunia pekerjaan administratif pada perusahaan asuransi swasta sebagai *customer service*. Ketertarikannya pada dunia pendidikan mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan magister pada tahun 2018 di Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya.

Setelah lulus pada 2020, ia mendapatkan kesempatan untuk mengajar di STAIM Magetan hingga awal 2023. Pada pertengahan tahun 2023, Ia diterima sebagai ASN melalui formasi PPPK di Universitas Negeri Surabaya pada Prodi Pendidikan Luar Sekolah hingga sekarang. Pada saat ini ia sedang menjalani studi doktoral pada program studi Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Perempuan kelahiran Ngawi, 21 Desember 1991 ini memiliki spesifikasi akademik pada pendidikan non formal informal dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai bidang kepakaran yang didalami.

